SINTESA

INDIKATOR SIKAP INTELEKTUAL MAHASISWA

Membongkar UUD 1945

KONSTITUSI

Strategi Stabilitas Soeharto

Buyung : "Saya Menentang Konsensus Nasional ...!"

DITERBITKAN OLEH LPM FISIPOL UGM UNTUK KALANGAN SENDIRI

No. 09/VI/1993

ISSN : 0854-5359

INDONESIA, MASIHKAH ENGKAU TANAH AIRKU ?

Karya: Husni Djamaluddin

Indonesia tanah airku
tanah tumpah darahku
di sanalah aku digusur
dari tanah leluhur

Indonesia tanah airku
tanah tumpah darahku
di sanalah airku dikemas
dalam botol-botol aqua

Indonesia tanah airku
disanalah aku berdiri
jadi kuli sepanjang hari
jadi satpam sepanjang malam

Indonesia tanah airku
Indonesia dimanakah tanahku
Indonesia tanah airku
Indonesia dimanakah airku

Indonesia tanah airku
tanah bukan tanahku
Indonesia tanah airku
air bukan airku

Indonesia, masihkah engkau
tanah airku ?

Tuhan, jangan cabut Indonesiaku
dari dalam hatiku

Makasar, 28 Oktober 1992

Photo: Nungki

Pernah dimuat di Harian Republika

SINTESA

No. 09 / VI / 1993

Pelindung :
Dr. Ichlasul Amal, Dekan Fisipol UGM

Penasehat :
Drs. Mashuri Maschab , S.U.,
PD III Fisipol UGM

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab :
Eric Hiariej

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab :
Yussac F Ananda

Sekretaris :
Dyah Mutiarin
Uswatil Husna

Bendahara :
Oetami Dewi

Dewan Redaksi :
Sopril AH
Andi Arief
Iwan Gunawan
Eric Hiariej
Sunarto
Sultan Muchtar

Staf Redaksi :
Krisna Darma
Rossy
Jarot Sukrisno
Velix Wanggai
Yooke
Asrofi
Noor Wahyudi
Archam Effendi
Yan Parhas

Lay Out/artistik :
Nungki
Roesharman

Fotografer:
Chandra
Pemimpin Perusahaan :
Arie Sudjito

Staff:
Beta Tony
Hanang W
Putut
Amril
Harry Purwanto

Alamat Redaksi:
Kampus Fisipol UGM
Jl. Socio Yustisia, Bulaksumur
Yogyakarta 55281 Telp. 88688 Psw. 631

Sintesa adalah majalah berkala diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM
Misi : Mengembangkan tradisi intelektual dan membangun kultur oposisi
Redaksi menerima kontribusi tulisan, karikatur dan foto sesuai dengan misi yang diemban.



Seandainya Sintesa dapat dianalogikan dengan sebuah pesawat, yang segera akan tinggal landas maka, Kru Sintesa dapat dilihat sebagai awak pesawat yang bertanggungjawab terhadapnya. Agar, dapat meluncurkan pesawat tersebut, dengan aman, tanpa segala goncanagn yang tak dikehendaki dalam peluncurannya tersebut.

Seperti itulah kiranya kerja keras awak Sintesa selama ini di bengkel kerjanya, setelah sempat vakum selama kurang lebih dua bulan, karena alasan kegiatan kemahasiswaan, akademik atau pun kemasyarakatan. Entah itu mulai dari bulan puasa, Lebaran, mid term, dan yang terakhir adalah pesta (non?) demokrasi di kampus kita tercinta ini.

Tanggung jawab moral, minimal sebagi pemantik semangat dalam perjuangan setiap penerbitan Sintesa. Ketika kami harus menghadapi keruwetan-keruwetan yang me-loyo-kan aktivitas. Begitu pula dengan aktivitas kami di lembaga pers Mahasiswa yang terlanjur mengambil posisi sebagai indikator Sikap Intelektual Mahasiswa dituntut untuk selalu memunculkan skala-skala baru yang sesuai dengan kontinuitas waktu yang terus berlalu.

Karena tuntutan yang kritis itulah, maka kami berusaha seoptimal mungkin menerapkan dan mengembangkan sumber daya yang ada. Kondisi dinamis selalu kami jaga. Karenanya rekruitmen sumber daya manusia selalu ada demi pencarian bibit yang lebih berkualitas. Jika ada nama-nama baru, itulah bibit unggul yang disiapkan sebagi ahli waris dari generasi sebelumnya.

Akhirnya selalu dengan rendah hati kami menyertai anda, pembaca budiman, untuk melepas rindu pada edisi kali ini.

Diah Mutiarin

SINTESA

Nomor 09 / VI / 1993


dok. tempo

MIMBAR UTAMA

Demokrasi dan konstitusi

Performance politik seperti yang tampak sepanjang Orde Baru ternyata memang konstitusional.
Jadi........

10





MIMBAR KHUSUS

Peran Mahasiswa yang hilang

Mitos yang melingkupi peran mahasiswa ternyata membentuk arogansi tersendiri. Tapi kini, bahkan arogansi itu pun lenyap.

41

WAWANCARA UTAMA

Buyung

Si Abang yang baru pulang dari Belanda ini, garangnya tetap tak hilang. "Saya menentang konsensus Nasional....."

14

Sintesa Kurang Ajar

Saya telah baca terbitan Sin tesa, yang "Menggoyang suksesi."

Wah, edan tenan! Saya salut atas keberanian anda, segenap awak dan otak Sintesa. Mencermati isinya, edisi tersebut seolah jadi seperti outlet ketidakpuasan terhadap sistem politik Indonesia kekinian. Doa saya, semoga tidak ada reaksi dari "sono" yang menggoyang Sintesa.

Terus, Saya bayangkan jika saya ini orang dari "sono." Pikir saya, wah Sintesa ini kurang ajar. Kok nggak konfirmasi sama saya. Ya saya itu terserah, mungkin saya itu bisa seorang birokrat yang sedang berkuasa, atau mungkin saya itu anak birokrat tersebut yang lagi asyik bisnis. Sintesa kenal nggak sih dengan both side reporting?

Harapan saya semoga Sintesa terus bergoyang, tidak surut lantas mati.

Bimo Nugroho
Pemimpin Redaksi EQUILIBRIUM FE UGM

Media Massa, Cermin Realitas Masyarakat

Begitu selesai membaca Sintesa untuk pertama kalinya, saya langsung terpancing untuk berfikir lebih jauh. Terus terang saya salut dengan keberanian Sintesa dalam mengungkapkan realitas. Melalui tulisannya, permasalahan politik yang sedang berlangsung di negara kita dibedah tuntas, baik itu mengenai suksesi, hegemoni Soeharto dengan gaya politiknya, demokrasi paternalistik, aksi mahasiswa, dinasti Soeharto, BPPC, masalah buruh dan lain-lain. Hal ini secara langsung memberi gambaran wajah politik dan perekonomian negara kita yang mengarah ke kapitalistik (yang payahnya ternyata itu pun semu. Hal ini dicerminkan dengan penumpukan kekuasaan dan kekayaan pada satu titik).
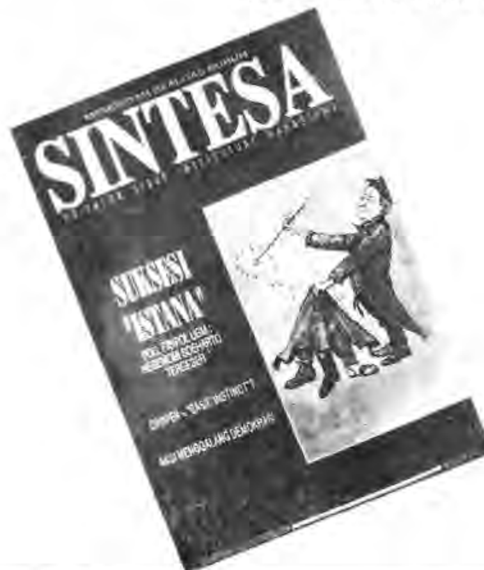
Sistem itu dipertahankan terus, karena menguntungkan dan memperkuat penguasa. Terkadang ini membuat kita pesimis akan datangnya perubahan. Sebab terjadinya perubahan tergantung da tangan penguasa itu sendiri. Kalau lagi baik ya ada kebebesan. Kalau tidak semua diremukkan.

Tetapi semakin meluapnya semangat keterbukaan dan tuntutan akan pelaksanaan demokrasi membuat kita harus tetap optimis. Bawa kita semua harus memperjuangkannya. Begitu juga dengan lembaga yudikatif dan legislatif harus berani bicara sesuai dengan hati nurani rakyat. Tidak cuma mengamini kebijaksanaan yang terkadang tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

Sebenarnya media massa adalah alat yang paling efektif untuk menyadarkan dan membuka mata, bahwa selama ini Pancasila dan UUD '45 tidak pernah dilaksanakan dengan murni dan konsekuen. Keduanya tidak cuma sekedar alat untuk melegitimasikan dan memperkuat kebebasan eksekutif. Langkah yang diambil Sintesa sebagai media massa (walau cuma sebagai pers mahasiswa yang terbatas sekali pembacanya) bagus sekali, melihat secara tajam permasalahan yang ada di negara kita. Ditengah kelesuan pers, karena bayangan ancaman permbreidelan (satu lagi bukti tak bebasnya kita bersuara). Ini penting sebagai bagian dari gerakan penyadaran. Mahasiswa sebagai calon intelektual sudah selayaknya mencari solusi dari semua permasalahan ini, yaitu bagaimana supaya sistem yang timpang ini bisa kita perbaiki. Hal yang tak kalah pentingnya, adalah soal mentalitas para pelakunya. Pengalaman penguasa sekarang, yang sebagian merupakan eksponen '66, mengajarkan bahwa mentalitas bangsa kita sa-ngat rentan terhadap godaan kekuasaan. Pendeknya, menurut saya masalah utama sekarang adalah soal budaya kita yang feodalistik, sebab meski sistem sudah diperbaiki, bila aktornya tak juga diperbaiki, sejarah akan terulang.

Dwi Soufnita
Mahasiswa FASA UGM

SINTESA No. 08/IX/1992



Pemilu Mahasiswa : Demokratisasi Kampus?

Pemilu Mahasiswa ternyata tidak lepas dari intrik-intrik politik. Primordialisme tetap menjadi tumpuan. Konon, hanya dapat diminimalisir.

Suksesi-demokrasi. Ya, sering kita mendengar kata ini, dan paling tidak di kalangan mahasiswa, dua kata ini sudah melekat di telinga mereka. Walau, kita kadang hanya sebatas menggaungkan kata ini tanpa konkretisasi yang jelas.

Suksesi adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi, artinya setiap organisasi pasti melakukan suksesi sebagai upaya alih generasi dan restrukturisasi dalam mewujudkan kelangsungan hidup organisasi. Secara sadar atau tidak keberadaannya sangatlah penting bagi organisasi itu sendiri.



dok. Sintesa

Memperjuangkan kelangsungan hidup kelompok kepentingan.

Rasanya masih menjadi tanda tanya untuk memberikan sedikit konsep pemilu di kalangan mahasiswa sebagai realisasi demokratisasi kampus yang konon mahasiswa adalah sebagai kaum idealisme demokrasi. Mengapa ?

Jelas benar apa sesungguhnya definisi dari demokrasi itu, yaitu suatu pola hubungan yang mengupayakan sistem keterbukaan, adanya kebebasan tanpa tekanan-tekanan (coersion) dari pihak manapun juga. Idealnya, dalam pemilu (baca:suksesi) diupayakan adanya kebebasan dan kompetisi yang sehat, artinya tanpa rekayasa dari pihak manapun. Mungkin banyak kalangan mahasiswa setuju dengan statement tersebut, bisa jadi lebih sarat kalau mahasiswanya beridealisme tinggi. Tapi benarkah demikian? Patutlah untuk kita renungkan. Antara benar dan salah. Pasalnya, mahasiswa bisa jadi memisahkan antara definisi demokrasi dengan realitas demokrasi, sikap demokrasi adalah demikian.

Banyak penyebab yang bisa kita paparkan, mulai dari sistem pemilihan umumnya, munculnya issue-issue primordial baik suku, ras, agama maupun golongan atau kelompok kepentingan tertentu yang ternyata masih menggejala di kalangan mahasiswa. Paling tidak bisa kita tangkap adanya kekurangterbukaan pemilu kali ini, yang berekses, apa yang menjadi tujuan semula dari pemilu sebagai bentuk demokratisasi kampus masih menjadi utopis. Kalangan tertentu (baca : kelompok-kelompok kepentingan) berusaha memanfaatkan pemilu sebagai media bertarung secara "kompetitif", untuk meraih posisi strategis, terutama dalam upaya memperjuangkan kelangsungan hidup kelompok kepentingan tersebut.

Hal ini bukanlah untuk dipungkiri, sebab sistem yang tidak sehat ini ternyata sudah terlegitimasi dikalangan mahasiswa sebagai hal yang biasa dan lumprah terjadi dan itu tidak mungkin untuk kita hindari. Seperti apa yang di kemukakan oleh Mardani, sebagai ketua Keluarga Mahasiswa Katholik Fisipol (KMK), ia menyadari bahwa isu-isu primordial baik secara eksplisit maupun implisit itu adalah issue klasik yang dari tahun-ketahun selalu saja muncul, terutama pada waktu-waktu menjelang suksesi mahasiswa. "Isu-isu itu, saya kira, berasal dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang berusaha memperjuangkan kepentingannya dalam upaya mencari posisi strategis dalam lembaga kemahasiswaan dari golongannya, karena itu menyangkut kelangsungan hidup kelompoknya", tegasnya.

Hampir sama dengan apa yang diungkapkan Mardani, dalam tempat yang terpisah Velix V. Wanggai sebagai ketua Jama'ah Musholla Fisipol mengatakan bahwa apa yang menjadi isue primordial akan kekal selama kelompok kepentingan itu ada. Orang nomor satu di Jama'ah musholla Fisipol ini menjelaskan,"Kita tidak

akan mungkin bisa menghilangkan primordial itu kecuali menekan saja". Hal senada juga diungkapkan oleh Christiyono ketua Persekutuan Mahasiswa Kristen Fisipol (PMK), yang melihat itu isu biasa. Tapi dari ketiganya sebenarnya setuju kalau isu primordial ini sedikit dikurangi untuk bisa mengupayakan kandidat yang betul-betul bisa diakui dan representatif.

Sementara itu, Ade Purnama ketu BPM Fisipol 1992/1993 menilai adanya tarikan-tarikan dari kelompok-kelompok tertentu itu sah-sah saja, artinya hal itu bisa-bisa saja terjadi. Tetapi yang paling penting kita tidak mengabaikan kualitas kandidat, bahwa seseorang yang diajukan sebagai kandidat betul-betul "berkualitas". Juga tidak kalah pentingnya, orang yang duduk dalam kepengurusan atau orang yang terpilih, nantinya tidak lagi atas nama kelompok-kelompok kepentingan tersebut ataupun jurusan dsb, tetapi ia haruslah mengatasnamakan fakultas.

Di sini nampak sekali betapa isu primordial itu dijadikan sebagai "tradisi" di kalangan mahasiswa, tetapi paling tidak dari kelompok-kelompok kepentingan tersebut secara terpisah mengomentari bahwa sebenarnya kita harus konsekwen dalam mengajukan kandidat, artinya tidak asal-asalan dari kelompoknya yang terpilih sementara kualitasnya diragukan, artinya seorang kandidat adalah mereka yang mempunyai wawasan keilmuan yang tinggi, jiwa kepemimpinan (leadership) yang handal. Seperti apa yang dkemukakan Velix," kita tidak akan memilih seorang kandidat sembarang orang tetapi adalah mereka yang kualified dan tentu saja yang bisa menjanjikan untuk membawa aspirasi mahasiswa secara umum". Begitu juga dengan Mardani ia memandang bahwa seorang kandidat haruslah bisa diterima dimana-mana dan dia haruslah seorang aktivis sejati.

Menyinggung masalah kandidat, tentunya sangatlah bisa dipahami adanya kesamaan pendapat, bahwa seorang kandidat haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diajukan terutama mereka yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun prestasi dalam berorganisi. Seperti apa yang dikatakan Heri ," sebaiknya diupayakan seorang kandidat adalah mereka yang secara administratif dan secara akademik berprestasi dan tentu saja bukanlah orang baru dalam berorganisasi, pengalaman berorganisasi haruslah dimiliki oleh seorang kandidat," jelas mahasiswa Pemerintahan 90 ini.


dok. Sintesa

Isu primorgial masih dijadikan sebagai tradisi.

Terlepas dari berbagai sengatan isu yang menyiksa, pemilu akhirnya dilaksanakan pada tanggal 14 April 1993. Pemilu ini menyertakan 7 kandidat untuk SM dan 5 kandidat untuk jabatan ketua Badan Eksekutif. Pergelaran kontes demokrasi itu kemudian menobatkan Priyo Nugroho, mahasiswa HI angkatan 89 sebagai ketua SM, serta Winarto mahasiswa Sosisatri 90 --mantan ketua Komatri-- sebagai ketua Badan Eksekutif.

Tetapi seperti yang sudah dibayangkan, pemilu ini menyertakan setumpuk kontroversi. Mulai dari soal partisipasi-mobilisasi, isu kelompok kepentingan, jurusan, primordialisme, sampai soal mutu kandidat. Berdasarkan hail jaringan opini yang dilakukan, ternyata pemilu kemarin lebih hanyak memberikan PR yang harus diselesaikan untuk pemilu-pemilu yang akan datang.

Menanggapi soal penurunan pemilih yang mencapai 50% dibanding tahun kemarin, Hikmat Budiman (Slg 89) menilai pemilu kali ini sebagai yang terburuk. Mahasiswa tidak banyak ikut memilih karena pemilu dianggap tidak penting. SEMA, lanjut Hikmat, tak banyak punya arti karena organisasi kampus itu jarang menyentuh kepentingan mahasiswa. Jadi, wajar bila mahasiswa tidak tertarik dengan pemilu. Hal senada dipaparkan oleh Ari Dwipayana (Pem 90). Jumlah pemilih menurun dan berkurang karena banyak yang acuh. Kondisi ini menurut Ari, memungkinkan mobilisasi.

Memang penurunan partisipasi dalam pemilu kemarin merupakan malapetaka bagi dinamika kegiatn-kegiatan kemahasiswaan. Orang boleh mengkambing-hitamkan apa saja. Tapi yang jelas, signifikansi kegiatan kampus oleh sementara mahasiswa mulai diangap tidak koheren dengan masa depan. Dengan lain perkataan, penurunan jumlah pemilih adalah ekses dari perbakan pragmatisme ditengah masyarakat mahasiswa. Lalu persoalannya, apakah pertisipasi masih bisa diupayakan ? ataukah mobilisasi merupakan hal yang wajar dan diperlukan ? Pertanyaan ini menjadi relevan untuk diperdebatkan mengingat mobilisasi malu-malu maupun terang-terangan yang masih mewarnai pemilu. Isu primordial menjadi senjata utama. Bahkan menjadi menu

politik dalam rangka kepentingan-kepentingan jangkat pendek.

Ari berpendapat partisipasi harus tetap dioptimalkan, terutama dalam konteks demokratisasi kampus. Pendapat ini bertolak belakang dengan pandangan Hikmat dan Velix. Menurut Hikmat, mobilisasi itu sah-sah saja. Nyatanya ia tetap berlangsung, meski malu-malu. Sedangkan bagi Velix, mobilisasi itu penting, untuk mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kampus.

Sementara diluar partisipasi, isu lain yang ikut meramaikan adalah kelompok kepentingan. Mungkin menjadi tidak begitu menarik, kalau tidak karena kemunculan beberapa kelompok baru dengan terma-terma yang cenderung sekuler. Jurusan misalnya, mengemuka sebagai basis politik penting. Selain Komahi dan Komako, hampir keempat jurusan lainnya terlibat dalam berbagai manuver politik prapemilu. Sebagian besar pendapat menilai wajar. Artinya, sudah sepantasnya korps memperjuangkan kepentingannya melalui kandidat yang berasal dari jurusannya.

Menyangkut soal kandidat berkembang banyak penilaian. Namun umumnya sepakat, seluruh kandidat telah memenuhi standar kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin.

***

Berbagai kontroversi yang dibicarakan ini, bukan komoditi basi yang tabu untuk dikonsumsikan. Ia tidak berniat sekedar menghujat pemilu kemarin. Tapi bermaksud memberi masukan bagi amal bakti kepengurusan SM/BEM yang terpilih. Patut diakui kampus belum demokratis. Primordialisme masih mengangkang. Sementara pragmatisme telah meradang. Ini adalah penyakit yang harus diobati kandidat terpilih.

Arie Sudjito

Laporan :
Ari Sudjito, Yooke, Archam, Amril

Senat Lesu

Terlepas masalah kandidat, banyak disinyalir oleh kalangan mahasiswa bahwa kegiatan kemahasiswaan dari program senat yang lalu mengalami sedikit kelesuan. Banyak kalangan mahasiswa menilai kegiatan yang dikonsepkan BPM Fakultas (kini Senat fakultas) kurang berhasil dengan baik dioperasionalkan oleh Senat yang kini diganti nama dengan Badan eksekutif Mahasiswa Fakultas(BEMF). Kegiatan yang mengarah pada pengkajian maupun penalaran dan studi ilmiah tidak banyak terlihat dalam kepengurusan senat yang lalu. Bahkan konon kabarnya, Dekan Fisipol mengkritik mundurnya bidang penalaran pada periode lalu.

Hal ini juga diakui oleh Ketua Senat Fisipol Eko Siswanto bahwa ia melihat pada bidang I yang berkonsentrasi pada bidang penalaran. Tetapi sebenarnya ia melihat bahwa kemajuan-kemajuanpun banyak diperoleh pada bidang-bidang lain, misalnya untuk bidang II yang menangani bidang minat dan bakat telah mengalami kemarakan dan maju, untuk bidang-bidang lain saya kira cukup "lumayan". Dalam kaitannya dengan keadaan tersebut di tanya tentang hubungan struktural dengan BPM, ia merasa adanya keterpisahan antara senat dan BPM dalam fungsi. Idealnya BPM adalah sebagai lembaga kontrol dan yang melahirkan konsep-konsep program senat ternyata mengalami disfungsi. Hal ini menurut Eko disebabkan selama ini BPM terlalu berkonsentrasi pada kegiatan di Universitas. "Walau itu juga merupakan tugasnya sebagai pengurus SMPT, tapi paling tidak fungsi lain mereka sebagai pengurus BPM fakultas harus dipikirkan agar tidak terjadi disfungsi dalam BPM". Kini terlihat jelas bahwa kalangan senat menilai peran ganda pengurus BPM fakultas, sebagai lembaga kontrol senat fakultas dan sekaligus pengurus SMPT belum berfungsi secara optimal. Ditempat yang terpisah Ade Purnama mengatakan sebenarnya selama ini BPM sudah mengupayakan fungsi kontrol terhadap segala kegiatan dari senat, sebagai ketua BPM ia melihat selama ini BPM setiap empat bulan sekali mengadakan evaluasi kerja senat dimana jika ada permasalahan dalam tubuh senat dengan terbuka BPM berusaha mendudukkan permasalahan dan berusaha memecahkannya. "Saya kira fungsi kontrol BPM sudah berjalan sebagai mana mestinya", tegas Ade. Menyinggung tentang banyak kalangan yang menilai terjadinya stagnasi dalam kegiatan Senat yang dikonsepkan oleh BPM, Ade menjawab bahwa hal itu sangatlah tidak beralasan. Sebenarnya konsep yang ditelurkan oleh BPM itu hanya sebagai acuan-acuan global, kemudian senat menafsirkan kembali konsep global GBHK untuk operasionalnya. Pada dasarnya Senat dituntut untuk berani bergaining dengan BPM, yang artinya otoritas Senat dalam mengoperasionalkan kegiatan sangat jelas. Dan yang paling penting kemandirian dalam tubuh senat sangat dituntut, terutama penafsiran kembali oleh Senat terhadap GBHK yang diajukan BPM sangat dituntut untuk menghindari kesan bahwa Senat hanya sebagai "team work" yang harus selalu tunduk pada BPM.

Eric Hiariej



Agenda Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa FISIPOL UGM

September 1993 - Mei 1994

SEPTEMBER 1993

- Penelitian masalah tanah di Gresik
- Studium Generale
- POR Dies Fisipol
- Apresiasi Seni dan Politik
- OPSPEK
- Dialog Civitas Akademika (Mahasiswa, Karyawan, Dosen)
- Rekrutmen dan inventarisasi kelompok peneliti
- Diskusi Fakultas

OKTOBER 1993

- Diskusi Fakultas
- Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa
- Pentas Seni Fisipol
- Kursus Kilat Metodologi Penelitian

NOVEMBER 1993

- Diskusi Fakultas
- Diskusi Antar Jurusan
- Apresiasi Seni dan Politik
- Diskusi Kepenelitian
- Seminar hasil penelitian Gresik

DESEMBER 1993

- Diskusi Fakultas
- Penerbitan SINTESA
- Studium Generale
- Dialog Antar Lembaga Mahasiswa
- Peringatan Hari Raya Natal
- Peringatan Hari Raya Nyepi
- Diskusi Kepenelitian

JANUARI 1994

- Diskusi Fakultas
- Pengiriman tim ke Invitasi Bola Basket se-Indonesia
- Peringatan Isra' Mi'raj
- Diskusi Kepenelitian

FEBRUARI 1994

- Diskusi Fakultas
- Apresiasi Seni dan Politik
- Studium Generale Bahasa Inggris
- Presentasi Penelitian Mahasiswa

APRIL 1994

- Diskusi Fakultas- Panel Forum Nasional VI
- Apresiasi Seni dan Politik
- Presentasi Penelitian Mahasiswa

MEI 1994

- Apresiasi Seni dan Politik
- Peringatan Idul Kurban
- Peringatan Waisak
- Peringatan Kenaikan Isa Al Masih
- Temu Karya Penelitian Mahasiswa Ilmu-Ilmu Sosial se-Indonesia

CATATAN :

a. Selain program di atas, BEM juga menjalankan program yang diarahkan untuk :
   1. Mengembangkan kelompok studi dan kelompok penelitian
   2. Penyediaan media penambahan informasi dengan berlangganan Surat Kabar
   3. Membantu mahasiswa yang kesulitan membayar SPP dengan menyalurkan kredit mahasiswa
   4. Perlindungan hak-hak mahasiswa

b. Program sedang dalam perencanaan dan studi kelayakan
   1. Kursus Komputer
   2. Kursus Bahasa Arab
   3. Laboratorium Ilmu Sosial

c. Mimbar Bebas dilaksanakan berdasar kebutuhan.

Selamat atas terpilihnya ketua Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fisipol UGM :

Priyo Nugroho (HI '89) dan Winarto (Str '90) masa bakti 1993 - 1994

Sintesa

Selamat datang Putra-Putri terbaik Bangsa di Kampus Rakyat Belajar dan berjuang, rakyat masih selalu menanti

Majalah kita semua Sintesa



dok. Budi

Ibadah Demokrasi

Ekskalasi isu demokrasi tiba-tiba mengemuka memperkaya gebyar politik internasional pasca perang dingin. Entah dari mana, isu ini merambah jauh, menambal kehampaan yang ditinggalkan komunisme. Dimana-mana penduduk bumi ramai membicarakan, seperti demokrasi telah menjadi cita-cita dan angan-angan diakhir abad 20.

Padahal demokrasi itu tidak efisien. Ia identik dengan diktator mayoritas. Artinya, model idaman ini mengidap sejumlah kelemahan. Tapi toh beribu orang telah berkorban atas nama demokrasi, sementara beribu lainnya siap mati untuk menegakkan nilai-nilainya. Demokrasi mungkin bukan yang terbaik tapi ia yang paling sedikit memiliki keburukan.



Di dunia Ketiga hasrat demokrasi membentur arogansi kekuasaan negara. Meski Thailand dan Korea Selatan memberi sepercik harapan, otoritarianisme tetap menjadi penyakit yang meradang. Indonesia misalnya, menganut sistem politik "supra demokrasi". Ide-ide demokrasi kerap dibumikan penguasa, tapi bagian besar masyarakat tak mampu melihat atau menikmatinya. Dimana salahnya ?

Kebingungan ini mungkin bisa diobati dengan berusaha memahami sukma konstitusi. Gagasan integralistik mungkin agak berlebihan merasuki penampilan UUD'45. Semangat kekeluargaan memadati sendi-sendi aturan ketatanegaraan. Negara adalah keluarga besar, dengan penguasa sebagai bapak yang wajib dipatuhi. Karena itu wajar bila eksekutif begitu dirajakan. Otoritasnya melindas institusi militer (Pasal 10), menafikan otonomi yudikatif (pasal 14) serta meredusir kekuatan kontrol parlemen. Dalam konteks demikian, semestinya konsep republik adalah inskonstitusional, karena konotasi konsep itu mengkhianati semangat negara kekeluargaan.

Struktur konstitusi seperti itu mula-mula dapat dimaafkan, dengan memaklumi konteks historis pembuatannya. Indonesia yang baru merdeka berkepentingan untuk tetap survive. Sebagai konstitusi sementara UUD'45 dituntut mampu menyelamatkan sebuah kondisi darurat. Kaidah-kaidah efisiensi merupakan standar pelembagaan pasca kolonial. Pemanjaan kekuasaan kepada eksekutif adalah penting, karena memungkinkan penataaan struktur politik secara efektif.Malangnya UUD Sementara tetap dipertahannkan. Dengan lai perkataan, untuk waktu yang cukup lama negara berada dalam kondisi darurat. Darurat seperti apa, itu soal yang membingungkan.

Sementara disetiap sistem otoriter, negara memiliki kapasitas untuk menjejalkan kehendaknya kepada masyarakat. Dengan kelengkapan sarana-sarana represif, masyarakat ditata menurut logika kepentingan penguasa. Dalam hal ini kepentingan penguasa secara bebas diterjemahkan sebagai akses negara ke sumber daya ekonomi dan politik. Selanjutnya, setelah menjalani internalisasi, kepentingan ekonomi dan politik menjadi elemen genetis dalam tubuh penguasa. Negara kemudian dirangsang untuk memelihara gen baru tsb.

Sebetulnya eksistensi gen baru dimungkinkan oleh semangat konstitusi. setidaknya UUD'45 memberi legitimasi dominasi negara atas masyarakat. Kondisi darurat sebagai prasarat konstitusi ini adalah kerentanan kepentingan penguasa terhadap kekuatan-kekuatan diluar negara.

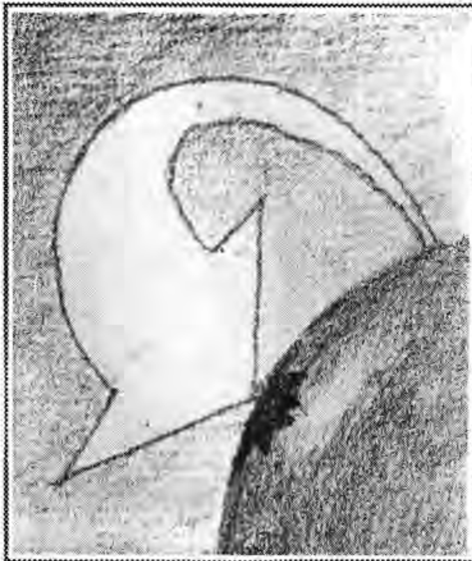
Jadi, penyembuhan penyakit otoritarianisme relevan dengan purifikasi konstisi. Hasrat demokrasi hanya akan tercapai dengan membicarakan kembali UUD'45. Revitalisasi konstitusi itu sendiri adalah ibadah dalam rangka menegakkan ajaran-ajaran demokrasi.

Eric Hiariej

Radang-Radang Kekuasaan

"Rule of Law itu tidak jatuh dari Langit ! Ia berkembang dalam satu pertumbuhan sosial yang khas (social origin), sehingga belum tentu bisa diterapkan begitu saja disini." papar seorang intelektual Hukum terkemuka dinegeri ini. Memang, sebuah nilai bukanlah suatu hypostase. Sebuah konsep bukanlah realitas obyektif, yang otonom, diluar sana. Ia tidak pernah berada diluar struktur sosial. Karenanya, setiap kali ia hendak diterapkan pada ruang dan spasi tertentu, segera diterpa relativitas nilai.

Maka, jika ide-ide luks (atau dianggap luks) seperti demokrasi, rule of law, atau Trias Politica hendak digunakan dalam masyarakat kita, konteks sejarah dan budaya lokal muncul sebagai perintang. Artinya, belum tentu ide-ide "disana" mampu berkompromi dengan tradisi "disini". Sehingga, efektifitasnya tidak seheroik ketika di tancapkan dinegeri asal. Namun, pada kenyataannya, sejarah kekuasaan raja-raja di era feodalisme negeri ini, kendatipun terdapat satu-dua diantaranya yang arif memerintah, lebih banyak yang semena-mena. Tragedi pembunuhan massal Ulama jaman raja Amangkurat II misalnya.



Dengan demikian, bila dinegeri-negeri Barat, ide-ide demokrasi modern tumbuh dan berkembang sebagai ikhtiar untuk memperhalus gerigi otoriterisme, disinipun tidak berbeda pula. Jika kekuasaan di negeri pemakan gandum dan keju itu dipusingkan oleh *malang-melintang* "tak tahu dirinya" kekuasaan, maka dinegeri pelahap singkong dan bulir padi ini, juga dibikin tujuh keliling dengan *sukses-melintangnya* kekuasaan. Kerakusan dan keserakahan adalah kodrat setiap Kekuasaan.

Maka tak ayal lagi, jika kemudian muncul arus kuat yang hendak menahan lahirnya kezaliman lama dalam status quo budaya. Pertarungan tanpa henti antara budaya modernis-realis dan budaya aristokrat-hipokrit, bak sebuah simfoni, terus-menerus berkelanjutan. Menggelombang. Naik-turun. Yang terakhir didukung oleh sejumlah instrumen paling mutakhir, dengan sekian peleton pasukan, dan arranser paling dahsyat. Tapi, arena tak pernah berhenti digelar.

Namun yang jelas, sejarah negeri ini bukanlah wilayah tak dikenal bagi Columbus demokrasi. Bau anyir darah pejuang yang tak pernah hilang, gerahan peluh buruh yang tak kunjung kering, dan rintihan petani yang terus tersuruk-suruk dibawah tindihan kekuasaan, mengundang dengan sangat memohon, dekapan dewi demokrasi. Budaya lokal kita ternyata sangat universal!

SINTESA kali ini tampil kembali dihadapan anda, dengan isu-isu aktual politik. Kembali coba menyodorkan berita berita riil yang belum terdistorsi, baik distorsi kecanggihan teknologi sensor, atau distorsi ketertinggalan mental-pikiran. ini ditawarkan dengan kerendahan hati para pecinta Demokrasi.

Untuk liputan utama kami sajikan laporan hasil wawancara dengan para pakar seperti Deliar Noer, Arief Budiman, Prof. Satjipto Rahardjo dll. Serta pandangan kaum muda intelektuil. Lantas, seperti yang sudah-sudah, Polling kami hidangkan sebagai andalan potret opini massa. Liputan khusus kali ini merangkum dinamika pendidikan yang menggejala ditanah air, dan dibagian lain, beberapa artikel serta laporan ringan kami sajikan untuk para pembaca sekalian.

(Yussac F.Ananda)

Mahasiswa Fisipol



Hampir seluruh mahasiswa, sepakat dengan perubahan UUD '45. Ketidakjelasan, kedaruratan penggodokan konstitusi diangkat sebagai dasar. Sakralisasi konstitusi perlu dirontokan.

Breidel UUD'45! Demikian kira-kira, untuk merumuskan dengan singkat, hasil poll yang digelar Sintesa, beberapa waktu lalu.

Dari 208 mahasiswa yang berhasil dijaring poll, hampir-hampir seluruhnya (8,3%), sepakat mendukung perubahan UUD '45. Item perubahan konstitusi yang disusun dalam suasana "negara darurat" itu, hanya ditolak sekitar 7,2 %. Artinya dengan tegas diproklamirkan, UUD'45 telah kehilangan legitimasinya justru dilapisan terdidik masyarakat, m a h a s i s w a !

Kendati pun area poll terbatas pada mahasiswa Fisipol UGM, namun berdasarkan asumsi; mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik menyerap dalam porsi cukup besar informasi-informasi sosial politik, sikap dan pandangannya, diperkirakan representatif. Dengan kata lain, gigitan kontekstual dan historis, jawaban-jawaban poll, memiliki derajat akurasi konseptual dan praktikal yang cukup tajam.

Seperti edisi-edisi sebelumnya, Poll ini diSebar secara acak. merangkum identitas dan latar belakang responden. Berdasarkan agama, kualifikasi seks dan struktur sosial ekonominya. Lebih lengkap , anda dapat membacanya dalam tabel 1 dan 2. Poll ini dimaksudkan sebagai upaya menjepret realita opini mahasiswa. yang belakangan, dibombardir isu-isu aktual dan strategis diseputar masalah-masalah demokrasi, konstituante dan UUD' 45. Poll diformat secara berstruktur sehingga pengamatan dapat dilakukan sesistematis mungkin.

DEMOKRASI DAN UUD '45

"Saya juga mendukung perubahan UUD '45," komentar Arief Budiman, ketika Sunarto mengkonfirmasikan hasil poll Sintesa tentang perubahan UUD. "UUD '45 sebenarnya bagus, tapi untuk tahun '45. Pada waktu keadaan darurat, UUD 45 memang cocok, karena isinya kabur. Kalau sekarang, ia sudah kadaluwarsa, sehingga kalau masih juga dipertahankan, masih juga cocok, tapi untuk kepentingan penguasa." lanjut Arief sambil tersenyum getir. Pandangannya menerawang sejenak, lanjutnya" kalau hasil Poll Sintesa, sebagian besar menghendaki perubahan UUD, saya setuju sekali." tandasnya.

Memang tak dapat dipungkiri. Bila realitas politik di bawah naungan konstitusi '45 dibilang tidak begitu ramah bagi ciri-ciri masyarakat demokratis. Pencekalan kebebasan berbicara, larangan berorganisasi independen. dan kian perkasanya unit-



dok. Tempo

Misi utama konstitusi adalah menghidupkan "ruh" demokrasi.

Sepakat Rombak UUD '45

unit ekonomi membantai kehidupan petani dan buruh. Menjadi bukti kuat proposisi di atas. Di atas segalanya, konstitusi '45 yang selama ini digembar-gemborkan --dengan nilai-nilai sakral bahkan sekualitas kitab suci-- tidak mampu membatasi kekuasaan. Padahal missi utama konstitusi dalam sejarah adalah: justru menghidupkan "ruh" demokrasi. Yang membatasi kesewenanng-wenangan.

Dalam ilmu politik, konstitusi merupakan jalan untuk membatasi kekuasaan. Gagasan ini kerap dikenal sebagai konstitusionalisme. Sedang negara yang menganutnya disebut sebagai constitutional state atau Rechtstaat. Istilah Rechstaat diperkenalkan ahli hukum Eropa Barat, seperti Imannuel Kant dan Julius Stahl. Sedang Rule of law dipromosikan ooleh ahli-ahli hukum dari anglo saxon seperti Dicey. Ide pembatasan kekuasan, sesungguhnya adalah ikhtiar untuk melindungi rakyat banyak. Agar pemimpin tidak terlanjur menjadi penguasa yang zalim. Artinya, demokrasi dapat ditegakkan. Poll Sintesa mendapati 86% responden setuju ada kaitan erat antara demokrasi dengan konstitusi. Sedang responden yang tak tetap hati , hanya 9%, apalagi yang menolak 4,3%. Lantas, UUD yang ideal itu seperti apa?

De facto, responden sepakat bahwa ia, adalah UUD yang mampu menjamin hak asasi memuat aturan penyelenggaraan pemerintahan dan ada pembatasan keuasaan. Yang menganggap perlu ketiganya sejumlah 46% responden. Mengenai kedaruratan UUD '45, sebagian besar responden mengatakan setuju. Hanya 10% menolak. Mayoritas tersebut menggaristebali faktor "ketidakjelasan" konstitusi. Pasal-pasal konstitusi yang cair menciptakan kesulitan pemaha-man dari UUD '45. Dalam praktek dominasi interpretasi negara sangat superior. Mengenai hal ini, Sintesa sempat berdiskusi singkat dengan Prof. Satjipto Rahardjo, disela Seminar Hukum di Universitas Atmajaya Jakarta. "Boleh saja orang mengajukan usul tentang perubahan UUD'45, tetapi yang perlu diingat, banyak hal dalam konstitusi itu yang belum dilaksanakan." Senada dengan beliau, Arief Budiman mengemukakan, "UUD '45 meskipun sangat longgar, akan sangat efektif bila dilaksanakan sungguh-sungguh. Persoalannya pemerintah sendiri yang menginjak-nginjaknya." Kendati pun tak dirinci oleh Arief praktek pengrusakan UUD '45 oleh pemerintah, yang jelas samarnya pasal-pasal yang menjamin hak-hak warga negara menjadi biang keladi dari "konstitusional nya" pengrusakan tersebut. Misalnya saja, interpretasi tentang masa jabatan Presiden yang tak terbatas, menimbulkan perdebatan berkepanjangan.

Padahal sebagaimana dikemukakan oleh Deliar Noer, "UUD harus ditafsirkan berdasarkan dengan jiwa zamannya. Bukan rumusan eksplisitnya saja. Mengangkat anggota DPR, misalnya, tidak pernah terfikir oleh para "the founding fathers" pada waktu itu. Argumen pakar politik ini sekaligus dapat dijadikan tangkisan bagi pendapat yang melansir pembatasan jabatan Presiden 2 kali sebagai mengebiri konsititusi."Sebenarnya pada waktu itu, para bapak Bangsa bertekad 6 bulan setelah proklamasi mengadakan pemilu. yang mana nantinya dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat (konstituante?) untuk membentuk UUD baru." tambah Deliar Noer.

HASIL POLLING SINTESA

I. IDETITAS RESPONDEN

Jumlah Responden	:	208 Orang
Pria	:	136 (65,38%)
Wanita	:	72 (34,61%)

Agama	
Islam	107 (51,44%)
Kristen	56 (26,92%)
Protestan	32 (15,38%)
Hindu	9 (4,32%)
Budha	4 (1,92%)

Latar Belakang Sosial Ekonomi Orang tua	
Pegawai negeri/ABRI	109 (52,4%)
Non Pegawai negeri/ABRI	69 (33,17%)
Lain-lain	30 (14,42%)

Sebagai informasi, perlu diingat UUD disusun oleh PPKI yang notabene bentukan Jepang. Argumen lain yang juga dilingkari responden, penyusun UUD '45 bukanlah pilihan rakyat (22%). Sementara esensinya hanya menuntut aturan pokok (20%), lainnya (15%) adalah singkatnya waktu pembuatan. Dari sini dapat dieja, rendahnya kapasitas UUD di mata sebagian besar responden, justru tidak terletak pada kendala teknis, yakni kondisi dan situasi pembuatan. Melainkan justru pada fungsi dan representasi konstitusi itu sendiri. Artinya harapan akan kemampuan UUD sendiri untuk melampaui perkiraan efektivitasnya (baca: konstitusi lugu) sebenarnya cukup kuat. Sehingga alasan penolakan konstitusi ini tepat menikam pada landasan praktisnya. Di mana, pada prakteknya dirasa kurang mampu menampung problem-problem seba- gai konstitusi yang "seharusnya". Jadi alasan responden cukup kuat berdasarkan logika argumentasinya.

KONSTITUANTE

Adalah Adnan Buyung Nasution yang dalam berbagai kesempatan, mengkampanyekan otoriterisme negara dalam membubarkan konstituante. Menurutnya Konstituante tidaklah gagal, melainkan digagalkan. Poll SIntesa tentang item ini menangkap image positif pada konstituante. Menurut 62% responden, konstituante merupakan hasil kerja rakyat. Artinya konstituante betul-betul merupakan lembaga yang menjembatani makna demokrasi secara teoritik dan makna aspek positif empiriknya. Bahkan diantara 68% dari mereka yang berarti pelonjakan pandangan positif terhadap era liberalisme. Sepakat bahwa era 50-aan adalah era demokratis!


Arief Budiman

Kesimpulan ini mengingatkan kita pada discourse yang muncul dalam konferensi tentang Indonesia di Melbourne beberapa waktu yang lalu. Di sana, para Indonesianist dari berbagai disiplin ilmu memperdebatkan kembali tesis-tesis tentang demokratisasi Indonesia era liberalisme. Sehingga, perjuangan demokratisasi kini dapat disebut sbg gerakan redemokratisasi. Merujuk pada Poll, jelas, dalam pengamatan mahasiswa, era 50-an adalah era demokrasi. Berbagai alasan dapat dikemukakan untuk mendukung proposisi ini, antara lain, bahwa waktu itu Konstituante adalah produk pemilu bebas 1955, yang konon paling demokratik sepanjang sejarah pemilu kita. Keputusan-keputusan yang diambil bebas dari pengaruh penguasa, dan representasi anggota legislatif berderajat tinggi.

Di dalam pandangan UUD, dibagi antara UUD **fleksibel atau supel dan rigid atau kaku.** Disebut fleksibel, jika untuk


Deliar Noer

II. KONSTITUSI DAN UUD 1945

Korelasi Positif Demokrasi dan Konstitusi	
Setuju	180 (86,53%)
Tidak Setuju	9 (4,32%)
Ragu-ragu	19 (9,13%)

UUD Yang Ideal	
Menjamin hak azasi	24 (11,53%)
Aturan Penyel. Pemerintahan	42 (20,195)
Pembatasan Kekuasaan	37 (17,78%)
Ketiganya	96 (46,15%)
Lain-lain	9 (4,32%)

Pemerintahan Berkonstitusi Cita-cita Kemerdekaan	
Setuju	176 (84,61%)
Tidak Setuju	28 (13,46%)
Ragu-ragu	4 (1,92%)

Kriteria Pemerintahan Yang Berkonstitusi	
Prosedur hukum Pembagian Kekuasaan	22 (10,57%)
Kendali efektif terhadap Kekuasaan	39 (18,75%)
Jaminan Hukum Bagi Warga Negara	36 (17,30%)
Ketiganya	99 (47,59%)
Lain-lain	12 (5,76%)

UUD 1942 Adalah UUD darurat	
Setuju	186 (89,42%)
Tidak Setuju	22 (10,57%)


Adnan Buyung N

merubahnya dibutuhkan persyaratan sebagaimana mengubah UU. Sedang rigid bila perubahannya tidak seprosedural perubahan UU. Di negeri-negeri di mana perubahan bercorak fleksibel, biasanya lahir dari konsep supremasi Parlemen. Misalnya, Parlemen Inggris, sehingga pernah masyhur jargon, parlemen bisa mengubah apa saja, kecuali mengubah pria menjadi wanita. Sementara aliran rigid, biasanya menjelma dalam negara yang mana UUD disusun oleh sebuah konstistuante. Anehnya yang menggejala di negeri kita, UUD '45 yang kini berlaku disebut supel. Padahal, jelas untuk mengubahnya mekanismenya cukup rumit. Menurut Soeharto, perubahan konstitusi harus lewat MPR, kemudian direferendumkan pada rakyat, dan harus disetujui MPR lagi. Jadi, sesungguhnya UUD '45 lebih tepat dikatakan rigid atau kaku. Anehnya lagi, ia tidak dihasiilkan forum seperti konstistuante, sebagaimana lazimnya sebuah konstitusi kaku. Bahkan di atas segalanya, konstituante dianggap lembaga boros dan bertele-tele. Ia diukir sebagai institusi yang tidak layak dihormati, dan dengan sistematis diisukan sebgaai perusak kesatuan bangsa.

Berbeda dengan klasifikasi yang mengikuti pemikiran C.F. Stone di atas, ternyata para penyusun UUD kita punya penjelasan sendiri tentang kesupelan konstistusi kita. Dalam penjelasan UUD disebut "Kita harus ingat dinamika masyarakat ....oleh karena itu makin supel (elastis) sifat aturan tersebut makin baik. Jadi, kita harus menjaga supaya sistem UUD jangan sampai ketinggalan jaman ". Dengan kata lain, yang dimaksud supel adalah muatan isinya, yang sekedar berisikan aturan-aturan pokok saja. Sedang lainnya seperti dijelaskan dalam penjelasan UU agar lebih mudah mencabutnya. yang menjadi persoalan kemudian, penguasa terlalu sering mengembalikan kepada UU. Sehingga soal masa jabatan Presiden misalnya, dimana belakangan ini dilontarkan untuk dibatasi dalam UU, justru ditarik ke UUD. Jadi betul-betul akrobatik yang memikat. Seperti tutur Try Sutrisno misalnya, " Kalau di konstitusi sudah demikian ... ya sudah". Mengamati kian berkembangnya aspirasi dari kekuatan masyarakat seyogyanya anggota MPR menggolkan issue yang kini semakin didukung berbagai kekuatan civil society yang ada. Yakni perubahan UUD 1945. Mengingat infra struktur politik yang ada sudah cukup mampu menampung tuntutan-tuntutan itu.


Satjipto R

Yussac F Ananda
Laporan : Andi Arief, Sunarto, Sopril AH dan dari berbagai sumber

Alasan UUD Darurat	
Hanya Memuat Aturan Pokok	38 (20,43%)
Dibuat Bukan Oleh wakil rakyat	41 (22,04%)
Dibuat dalam Waktu Singkat	28 (15,05%)
Interpretasi Beragam	72 (38,70%)
Lain-lain	7 (3,76%)

UUD 1945 Dirubah	
Setuju	173 (83,17%)
Tidak Setuju	15 (7,21%)
Tidak menjawab	20 (9,61%)

III. KONSTITUANTE

Konstituante Hasil kerja rakyat	
Setuju	129 (62,01%)
Tidak setuju	79 (37,98%)

Alasan Setuju	
Pilihan bebas Pemilu 1955	18 (13,95%)
Bebas Dari kekuasaan Pemerintah	22 (17,05%)
Bersifat representatif	21 (16,27%)
Ketiganya	63 (48,83%)
Lain-lain	5 (3,87%)

Era Demokrasi Liberal Th.50-an Era Demokratis	
Setuju	142 (68,26%)
Tidak setuju	66 (31,73%)

Alasan demokratis	
Pemerintahan Transparan	12 (8,45%)
Masyarakat Punya hak Kontrol	32 (22,53%)
Hak Azasi terjamin	15 (10,53%)
Ketiganya	81 (57,04%)
Lain-lain	2 (1,40%)

Adnan Buyung Nasution :

"... Saya Menentang Konsensus Nasional !!"


dok. Sintesa

Dalam satu kesempatan safari intelektualnya di Yogyakarta, Adnan Buyung sempat "diculik" untuk diwawancarai oleh para kru Sintesa, Andi Arief, Sopril dan Sunarto. Berikut petikannya

(SINTESA) Demokrasi Pancasila hanya secara formal didengungkan oleh pemerintah. Secara yuridis, rincian Demokrasi Pancasila yang sebenarnya sampai sekarang belum ada. Apakah sudah saatnya kita perlu rincian mengenai Demokrasi Pancasila seperti misalnya apa sebenarnya arti kebebasan berserikat, berpendapat. Apakah Demokrasi Pancasila dibiarkan saja mencari bentuknya sendiri?

(Adnan Buyung Nasution) *"Tidak"*. Kita tidak bisa biarkan, jika kita tahu bahwa demokrasi yang bernama indah "Demokrasi Pancasila" ini justru isinya secara substansial bertentangan dengan makna demokrasi itu sendiri. Jangan silau oleh nama jika itu hanya etiket tapi isinya malah bertentangan dengan nilai-nilai dalam pancasila itu sendiri, khususnya sila ke-4.

Kegagalan Demokrasi Pancasila tidak perlu diperinci lagi karena memang sudah jelas kenyataannya. Seperti misalnya bahwa dalam demokrasi harus ada kemerdekaan bagi rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Apa sekarang rakyat sudah bisa memerintah? Semua sudah diatur dari atas. Apa wakil-wakil rakyat bisa menyuarakan hati rakyat? Mereka pada Sidang Umum MPR besok hanya bisa berkata "Yes". Corong pun tidak diberikan pada mereka. Hanya satu fraksi yang bisa berbicara. Apa itu yang dinamakan demokrasi ?.

Contoh lain dari kegagalan tersebut adalah bahwa menurut konsensus nasional pemerintah kekuasaannya terbatas. Kenyataannya, apa sekarang sudah terbatas? Siapa yang membatasi, mengkontrol, meminta pertanggungjawaban pemerintah sekarang? Jawabnya: tidak ada.
Jika ada 2 menteri memberi keputusan tentang cengkeh dan jeruk yang justru membuat rakyat menderita, tidak ada forum, mekanisme, di mana wakil rakyat yang sah ini dapat meminta pertanggungjawaban menteri atas peraturan tersebut. Apa itu juga demokrasi?

Kita tidak perlu perinci lagi kegagalan-kegagalan tersebut karena kita tidak perlu mencari-cari sesuatu yang sudah nyata. Pada saat ini kita belum melaksanakan Demokrasi Pancasila sebagaimana mestinya. Ada sesuatu yang belum beres, belum pas dalam sistem atau tatanan sekarang. Pertama-tama harus ada persamaan visi atau pandangan diantara kita tentang Demokrasi Pancasila.

Proses penyadaran bahwa ada sesuatu yang tidak "klop" merupakan awal pembaharuan yang terpenting. Orang yang mempertahankan apa yang sudah ada akan mengatakan bahwa ini semua sudah baik dan sakral, tidak boleh dirubah. Kita justru akan melakukan sebaliknya, yaitu usaha untuk mendesakralisasikannya sebab dia bukanlah pemberi wahyu, barang ajaib ataupun barang keramat. Dan usaha kearah ini tidak bisa kita perjuangkan sendiri-sendiri, harus ada kebersamaan.

Sistem integralistik memiliki beberapa kelemahan, salah satu diantaranya adalah, kenyataan bahwa antara State dan society tidak mungkin disatukan. Jika dikatakan sistem Orla gagal karena konsep integralistik dilaksanakan, yang menjadi pertanyaan apakah konsep integralistik tersebut juga dilaksanakan pada masa Orba ini.

Kegagalan demokrasi terpimpin, karena Soekarno terlalu otoriter. Soekarno ketika itu dimitoskan dan kemudian ia menjadi sensitif.Di saat itulah dia lupa terhadap dirinya sehingga Soekarno melakukan tindakan-tindakan politik yang justru merugikan dirinya. Sebagai contoh, Soekarno ketika itu membubarkan Badan Pendukung Soekarnoisme dan dia malah termakan oleh agitasi komunis.

Konsensus nasional adalah suatu hal yang terjadi dibalik pintu. **Saya menentang konsensus nasional.** Mari kita lihat sejarah konsensus tersebut.

Bisa saja kita mengikuti gejolak generasi muda kita, membuang begitu saja UUD 45 untuk kemudian membuat yang baru sama sekali. Tapi apa realistis ?

Ketika Orba dimulai, niatnya adalah mengembalikan kehidupan demokrasi. Partai-partai dihidupkan kembali, pers kembali pulih, seminar-seminar dan panel diskusi digiatkan untuk menghidupkan iklim demokrasi.

Sebenarnya ada sasaran strategis yang akan dibuat pada saat itu, yaitu membuat undang-undang baru tentang pemilu serta undang-undang tentang kepartaian dan ormas-ormas. Hal ini dengan asumsi jika tetap menggunakan undang-undang lama tidak akan ada perubahan. Perlu pembaharuan, yaitu dengan undang-undang baru yang akan memberikan tempat untuk lahirnya kekuatan sosial baru dari masyarakat.

Tapi ternyata, sementara saya bersama-sama dengan Ismail Sudi, Jenderal Sugandi, Jenderal Syarif Thayeb, dll. berjuang matimatian di DPR berhadapan dengan orang-orang yang masih berpikir mempertahankan status quo, pada saat itu Soeharto dan Ali Murtopo "lewat pintu belakang" membuat konsensus dengan partai-partai lama, yaitu : PNI, NU, PSII, Perti, Parkindo, dll. Mereka menamakan ini "konsensus nasional". Menurut saya, mereka mengadakan dagang sapi dengan partai-partai lama.

Mereka membuat konsensus yaitu bahwa Pemilu tetap memakai undang-undang lama. Dengan demikian, partai-partai tersebut menjadi selamat kedudukannya. Yang lebih ironisnya lagi, ABRI juga ikut berpikir pendek. Mereka lebih memilih mendapat jatah 100 kursi di MPR daripada harus berpikir mengadakan pembaharuan. Inilah sumber penyelewengan sehingga usaha untuk menghidupkan kembali demokrasi menjadi mandeg.

***

Sekarang mengenai Dwifungsi ABRI, apa peranannya pada kondisi Indonesia sekarang ini serta melalui jalur-jalur apa ABRI berperan?

UUD kita terima sebagai suatu kenyataan sosial. Bersamaan dengan itu harus kita sadari bahwa UUD itu banyak memiliki defect atau cacat-cacat konstitusional. Terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahannya. Semua itu harus bisa diperbaiki agar tatanan politik juga bisa kita ubah menjadi tatanan yang lebih demokratis. Jika itu terjadi karena desakan dari bawah, maka ABRI harus berpikir kembali tentang

tempat dan peranannya. Tidak bisa ABRI tetap dominan seperti sekarang, menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara sepenuhnya. Harus ada perubahan dari pemikiran mereka sendiri.

ABRI dituntut untuk berperan sesuai dengan claimnya: dari rakyat, milik rakyat, membela rakyat. Tunjukanlah ABRI sebagai dinamisator. ABRI harus mengambil inisiatif jangan menunggu sampai didesak oleh rakyat seperti yang terjadi di Korea Selatan dan Thailand.

Saya lebih berharap ABRI berperan bersama-sama kita untuk mengadakan perubahan sehingga dengan demikian berperan menumbuhkan demokrasi. Perubahan apapun di Indonesia ini menurut saya tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh ke 2 pihak, yaitu sipil dan militer.

Melalui jalur apa ABRI berperan? Pertama kali Militer begitu mendominir politik Indonesia melalui jalur birokrasi. Pemerintahan sipil mulai dari gubernur sampai lurah berada dibawah subordinat militer. Pada saat itu ada penguasa-penguasa perang pusat dan daerah yang dikuasai oleh panglima-panglima, dan pemerintahan sipil tunduk kepada mereka.

Kemudian mereka masuk kedalan lembaga-lembaga konstitusional, yaitu kedalam DPR, MPR, bahkan Kabinet. Disamping itu, karena mereka yang berkuasa, maka setiap rapat panglima dengan DPR, mereka menentukan politik negara. Mereka menjadi faktor tersendiri diluar pemerintah. Ini yang saya gambarkan "The problem of power". Suatu kehidupan demokrasi nasional tidak akan berjalan kalau ada kekuatan-kekuatan yang bekerja diluar kerangka konstitusi seperti misalnya Rapim dimana dalam rapim tersebut mereka menentukan siapa yang akan jadi presiden. Apa artinya kedaulatan rakyat, apa artinya Pemilu, apa artinya Sidang Umum jika sebelumnya ABRI sudah menentukan siapa yang jadi presiden.

Penjelasan pasal demi pasal dalam UUD 45 ternyata memberi celah pada negara untuk bersifat otoriter, mencampakkan proses interaksi sosial politik yang ada di masyarakat. Apa benar demikian dan mengapa ?


dok. Sintesa

Proses penyadaran bahwa ada sesuatu yang tidak "klop" merupakan awal pembaharuan yang terpenting.

Dalam pemufakatan sidang PPKI 18 Agustus 1945 tidak ada keputusan mengenai penjelasan pasal demi pasal. Hal tersebut dibuat belakangan, diambil dari karangan Soepomo ketika pidato mengenai integralistik. Penjelasan tersebut sangat kabur dan manipulatif, memberikan peluang untuk diatur oleh pemerintah. Pemerintah yang menentukan kapan hak-hak tersebut diberikan, berapa banyak dan seberapa jauh.

UUD 45 secara konseptual dan struktur kekuasaan yang diatur, amat memberikan peluang untuk suatu "strong executive". Motivasinya adalah memberikan kepercayaan mutlak pada kekuasaan itu. Supomo memberinya istilah "concentration of power for the president"

Hal ini merupakan kebalikan dari demokrasi positivisme dimana seharusnya hak-hak asasi ini diangkat paling tinggi dan dijamin oleh undang-undang supaya tidak bisa diterobos lagi, tidak ada DPR manapun yang dapat merubahnya. Itu namanya jaminan konstitusional.

Bagaimana sesungguhnya fungsi Presiden dalam kapasitasnya sebagai mandataris MPR.

Pengertian mandat dalam ketetapan negara tidak boleh diartikan sama dengan mandat dalam hukum perdata atau pidana. Dalam hukum, jika klien memberikan mandat kepada seorang advokat, maka advokat tersebut bebas berbuat apa saja sesuai dengan profesinya. Klien tidak berhak lagi ikut campur didalamnya. Segala sesuatu yang dilakukan maupun diucapkan klien didepan sidang harus sepengetahuan advokat.

Dalam tatanan negara, tidak ada seperti itu. Kedaulatan rakyat tetap ditangan rakyat, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada seorang presiden untuk melaksanakan kedaulatan rakyat selama 5 tahun.

Dalam sistem parlementer, mandat diberikan kepada perdana menteri dan menteri-menteri untuk menjalankan pemerintahan yang sewaktu-waktu bisa dikontrol dan jika tidak becus, mandat dicabut. Disini berlaku kontrol yang bertanggung jawab.

Mandat di Indonesia ada dalam pengertian teori yang

nilainya hanya simbolik karena hanya 5 tahun sekali pertanggungjawabannya, dan sementara itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Pengertian mandataris ini harus dijernihkan karena yang ada hanya kekuasaan presiden dan itulah mandat yang diberikan rakyat. Mandat itu seharusnya hanya terbatas pada apa yang ada dalam konstitusi. Jangan ada tambahan ekstra lagi atau mandat khusus sehingga ada 2 kekuasaan presiden yaitu kekuasaan berdasar presiden dan kekuasaan karena ia merasa ada mandat khusus, misalnya berdasarkan Supersemar.

Terakhir Bang Buyung, kalau memang UUD '45 itu ternyata berwatak otoriter, kenapa harus tetap dipertahankan dan tidak diganti saja dengan yang lebih demokratis?

Maksud mempertahankan UUD 45 disini, karena dipergunakan sebagai pangkal/titik tolak untuk diadakan perubahan. Bisa saja kita mengikuti gejolak generasi muda kita, membuang begitu saja UUD 45 untuk kemudian membuat yang baru sama sekali. Tapi apa realistis ?

Kita juga harus melihat realita untuk melihat bagaimana kita bisa maju dari keadaan seperti sekarang ini. Untuk perubahan-perubahan tersebut harus ada kekuatan agar orang mau mendengarkan ucapan kita. Jadi tidak hanya dengan himbauan-himbauan.

Mengenai hasil kerja konstituante, saya melihat bahwa setiap kita memperbincangkan dasar negara, kita selalu jatuh kedalam perdebatan yang berkepanjangan dan bahkan akhirnya gagal. Perdebatan tersebut yaitu mengenai ideologi dimana pada saat itu kita mempunyai persepsi bahwa setiap negara harus mempunyai dasar ideologis. Kemudian tiap-tiap golongan, fraksi, partai, mengunggguli ideologinya sendiri. Bahkan ada yang menuntut agama sebagai ideologi negara. Ini tidak akan bisa bertemu dan akibatnya malah gagal total.

Hikmah yang bisa kita ambil ialah :" apakah perlu kita membicarakan dasar negara?" Saya cenderung mengatakan negara tidak perlu ideologi. Maka salah kalau sekarang Pancasila dijadikan ideologi. Salah besar. Kembalikan Pancasila sebagaimana aslinya yang otentik, yaitu sebagai "Guiding principals". Nilai-nilai yang menjadi acuan saja. Kalau dijadikan ideologi, akan berbahaya karena akan mempersempit pemikiran kita. Perspektif kita akan terarah pada ideologi ini dan pada akhirnya kita akan memanipulir realita. Realita sosial kita manipulasi agar sesuai dengan ideologi.


dok. Sintesa

UUD itu banyak memiliki defect atau cacat-cacat konstitusional.

Sebagai contoh yaitu adanya undang-undang atau peraturan tentang Perburuhan Pancasila dimana disebutkan bahwa antara buruh dan majikan adalah keluarga, tidak boleh terjadi pertentangan karena berada dalam naungan satu keluarga.

Ini mengingkari kenyataan karena buruh dimanapun mempunyai kepentingan yang bukan saja berbeda, tapi mungkin bertentangan dengan kepentingan majikan. Sedangkan menurut hubungan buruh Pancasila, semuanya harus selaras dan seimbang. Maka berarti diingkari hak buruh untuk berbeda pendapat, untuk mendapatkan haknya. Ini artinya ideologi menindas. Oleh karena itu saya pikir tidak perlu ideologi.

Kenapa ada kerancuan ideologi? Karena ada satu kesalahan yang metaforis. Bangsa kita pada waktu itu memikirkan negara sebagai suatu bangunan/building yang akan selalu memerlukan landasan/fondament yang kuat. Apa betul negara sama dengan bangunan? kerancuannya dimana?. Metafora di-anggap kebenaran. Ini kerancuan berpikir yang harus kita pahami. Di negara-negara modern, negara tidak perlu ideologi. Bahkan negara dengan ideologi komunis (Rusia), selama 70 tahun mereka pertahankan ideologi tersebut, tapi kemudian hancur. Dengan ideologi negara cenderung memonopoli kebenaran dengan perspektif ideologinya. Dan nampaknya, kita akan menjurus kearah itu sekarang atau bahkan sudah. Pada nantinya akan dibuat undang-undang hukum pidana yang baru, yaitu "Siapa saja yang menentang ideologi Pancasila akan dianggap subversif". ■

Konstitusi Lugu, Dizaman Para Resi



"Nanti, kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpul kan kembali MPR yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan sempurna" tutur Bung Karno, usai membidani lahirnya Konstitusi 1945. Pernyataan ini, dan kenyataan yang kemudian mengiringinya, sebutlah semacam testamen politik. Bahwa, jauh sebelum suara-suara sumbang tentang UUD '45 mengelinding kembali dewasa ini, pengakuan tentang kelemahannya pagi-pagi telah digarisbawahi. Masa penyusunan yang singkat, keadaan darurat, dan psikopolitik yang tidak memungkinkan terangkumnya opini secara selektif, sangat reasonable bagi perubahan konstitusional. Agar lebih ideal.

Bandingkan saja misalnya, konstitusi kita dengan milik AS atau India, tidak disusun dalam kondisi tergesa-gesa di bawah ancaman bedil. Juga, menghabiskan masa sekitar dua tahun. Sedangkan UUD hanya membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Maka tak heran, jika Bung Karno merasa perlu mengumandangkan saksi "keraguan" terhadap efektivitas UUD '45. Ia tercipta dalam suasana dimana "Pedang lebih berbicara ketimbang pena" sehingga, Iwa Kusumasujantri, salah satu penyusunnya, kemudian berfikir penting adanya pasal tentang perubahan dalam UUD. Namun demikian, Soepomo muncul dengan ide yang cenderung mempersulit proses tersebut. ia menyertakan syarat dihadiri 2/3 anggota MPR dan disetujui minimal 2/3 dari anggota yang hadir.

dok. Tempo



Keefektifan UUD hanya didesain untuk jangka pendek.

Pada awalnya, gagasan ini sempat ditentang kuat oleh Subarjo. Menurutnya, cukuplah suara terbanyak untuk mengubah UUD tersebut. Tidak perlu 2/3 anggota MPR setuju. Karena Subarjo khawatir usul Soepomo itu dapat melanggengkan kediktaturan. Tapi, ketika kepentingan efisiensi dan kualitas konstitusi dikedepankan sebagi pertimbangan kata mufakat pun segera terajut rapi.

Jelas kita jumpai kenyataan, dinamika penyusunan UUD, sangatlah kompleks. Namun begitu dalam proses pengkreasiannya mereka, para Bapak bangsa itu, tetap bersikap luwes. Dengan sangat antusias merangkai bunga-bunga demokrasi. Sehingga tanpa disadari, terjebak, bahwa selain sisi gemerlap, manusia juga punya sisi gelapnya. Para pemimpin pun tidak diberikan "haknya untuk dicurigai, "Padahal kekuasaan selalu cenderung korup. Para pemimpin, di mata sebagian besar mereka adalah para malaikat, adalah para resi. Tanpa ambisi, tanpa birahi. akibatnya ketika muncul pemimpin yang benar-benar otoriter (Liddle, 1991) semuanya benar-benar tersentak. Bingung. Sedang konstitusi tetap melicinkan jalan bagi otoriterisme. "Dahulu tak pernah terfikir jika pemimpinnya tidak demokratis, kalau usul pembatasan masa jabatan Presiden sekarang muncul, karena pemimpin sekarang tidak demokratis"

papar Deliar Noer, ketika ditemui Sintesa.

Di dalam sejarah, sebenarnya upaya perbaikan telah berkali-kali diupayakan, sesuai dengan konjungtural dinamika politik yang ada. Berturut-turut diberlakukan konstitusi RIS (UUD 1949), dan konstitusi 1950 yang liberal. Sebelum kembali sejarah menyaksikan kekuatan ekstra konstitusional memecah pembuluh konstitusi. Kekuatan yang sesungguhnya telah semakin menyumbat efek kebengisan kekuasaan. Dan sebagaimana kita amati kemudian, kendati pun bola zaman terus menggelinding, benang-benang demokrasi tak kunjung tersulam. Padahal, keefektifan UUD, seperti dikemukakan tadi, didesain untuk jangka pendek. Ini jelas terlihat, misalnya, ketika Soekarno memimpin tim yang berang-gotakan sembilan orang dengan tugas merancang UUD. Dari 38 saran yang disampaikan anggota BPUPKI, 26 mengusulkan agar Indonesia secepatnya merdeka. Akibatnya, soal-soal lain yang lebih prinsipil, seperti masa jabatan Presiden tak mendapat porsi kajian yang serius. Disamping karena, mereka para kontruktor UUD tersebut di atas, juga adalah tokoh-tokoh brilyan yang sudah akrab dan relatif memiliki kesamaan pandang tentang format negara yang didealisasikan, kendati pun tak urung ada distingsi tajam untuk hal-hal yang memang krusial. Sehingga demikian betapa pun secara pribadi atau kelompok mereka dekat dan punya similaritas ideologi (baca: nasionalisme), tidaklah mendorong mereka untuk menganggap konstitusi '45 sebgai konstitusi yang komplit tanpa cacat, apalagi untuk menganggapnya sakral.

***

Hingga kini, obyek pertarungan ide yang tak kunjung tuntas adalah problem separation of power, di mana Montesquei selalu menjadi referensi utama dalam setiap perbincangannya. Dan yang kembali menyeruak belakangan ini adalah soal sistem integralisme. Dipandang secar ekshaustif, kedua fenomena tersebut sesungguhnya merupakan tarik ulur antara demokrasi dan otoriterisme. Sebagaimana diketahui, gagasan Montesquei berakar pada hasrat untuk mengikis habis hegemoni sistem feodal yang mana menurut Montesquei, suatu sistem pemerintahan mestilah melindungi hak asasi warganya. Maka ditelorkanlah konsep kekuasaan yang terurai dalam tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Usul pembatasan masa jabatan Presiden sekarang muncul, karena pemimpin sekarang tidak demokratis

Salah satu konsekuensi logis dari cara berfikir di atas adalah dieksplisitkannya hak-hak asasi manusia dalam konstitusi. Kala itu Mohammad Hatta yang dapat dianggap dari kubu yang menghendaki jaminan yang jelas dalam dalam UUD '45. Dengan mengaku sebagai penentang individualisme selama 20 tahun, pemimpin bangsa yang kalem namun tegas dalam berprinsip ini merasa kawatir, jika hak seperti "mengeluarkan pendapat" tak dilindungi dalam UUD, dapat menjerumuskan negeri ini ke jurang budaya disiplin kaku seperti Jeman dan Rusia. Yang berarti menghidupkan kembali tradisi fasisme.

Namun opini tulus yang mencoba menghadirkan wajah "masyarakat" dalam dokumen "negara" ini disumbat dengan "agitasi" Soepomo. ia menuding adanya aroma individualisme dalam gagasan Hatta. Sehingga kemudian gagasan tersebut lunglai didataran nor matif-positifnya. Menurut Soepomo, yang juga didukung Ir. Soekarno, gagasan Hatta tersebut kurang cocok untuk kultur Indonesia, yakni lebih menekankan faham kolektivis. Artinya teori yang dibudidayakan Montesquei pun haruslah dianggap asing. Argumen seperti ini ternyata terus bertahan hingga kini. Tak kurang Dr. Satjipto Rahardjo misalnya, dalam wawancaranya dengan Sintesa menuturkan, " pemikiran Montesquei itu berasal dari latar belakang dan asal-usul sosial yang khas, rule of law itu tidak jatuh dari langit." Lantas Satjipto memajukan Jepang sebagai model alternatif, "at least Jepang dapat menjadi model alternatif, dengan sikap kritis tentunya.

Kenyat aan bahwa pemikiran Soepomo banyak menjiwai konsitusi '45, mungkin lebih disebabkan oleh reputasi intelektualnya waktu itu. Sebagai seorang pakar hukum senior. Negara ini, tutur Soepomo, berdiri diatas persamaan persamaan darah dan daerah antara pemimpin dan masyarakatnya. Karena itu, kata Soepomo lagi, jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan sifat dan corak masyarakat, negara kita harus berdasarkan alairan integralisitik.

Kalau gagasan individualisme dapat dihubungkan dengan dengan pemikir-pemikir seperti Locke, Rousseau, Harold Lanski, fikiran-fikiran Marxist oleh Marx, Engels atau Lenin, maka ide-ide Soepomo dapat dirujukkan pada konsep-konsep

Adam Muller, Spinoza dan Hegel. Faham ini menganggap negara sebagai kodrat suci suatu bangsa. karena itu tugas utama warganya adalah berkorban untuk kepentingan negara. Maka hanya aparatur-aparatur negara sajalah yang berhak memonopoli identitas negara. Dan karenanya setiap langkah dan tindakan negara adalah juga langkah dan tindakan masyarakat.

Namun demikian, roda terus berputar. Sementara pe-sona integralisme semakin redup. Bahkan Soepomo sendiri, termasuk Soekarno, turut memperindah jalinan kebebasan manusia. yakni dalam UUDS '50, satu konstitusi yang dikenal sangat liberal. Paling tegas membela hak asasi manusia. Tak ada lagi gema individualisme yang bercitra buruk. Soepomo seolah-olah tersadar dari kesalahannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Deliar Noer, "Bahwa Soepomo sendiri turut dalam penyusunan UUD '50, artinya telah terjadi perubahan pada pemikiran Soepomo mungkin disadarinya bahwa di tahun 1945 dia belum me-miliki kesadaran yang utuh." Sementara Adnan Buyung Nasution, mantan advokat kondang, ber-komentar tajam, "Itu karena Mr. Soepomo sebenarnya aadalah ahli hukum adat, bukan hukum tata negara, sehingga ia analogikan negara dengan keluarga, ya jelas tidak cocok!"

Memang, lepas dari penilaian bahwa Soepomo kurang punya kecanggihan dalam mekonstruksikan UUD yang ideal, yang jelas konsep integralistik, negara kekeluargaan, atau apa pun nama nya, sangat tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi. Hasrat perubahan konstitusi '45 berdasarkan pengakuan akan kelemahannya, bukan saja didukung kalangan intelektual, dan intelektual muda (mahasiswa), tetapi juga para penyusunnya.

(Yussac F.Ananda)

(Dari berbagai bahan)

Apa yang Salah pada UUD 1945


Refly H.Z.

Apa yang salah pada Undang-Undang Dasar 1945? Pertanyaan ini mencuat kepermukaan kembali, lantaran dalam atmosfir kehidupan politik dilanda suatu gejala baru, gejala "Buyungisme".

Sepulangnya dari bertapa di negeri Belanda dengan membawa oleh-oleh gelar "Doctor", Adnan Buyung Nasution, tokoh yang terkenal karena kasus contempt of courtnya, kini kembali berteriak lantang. Tak tanggung-tanggung, kali ini tentang perubahaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak cukup itu saja, dalam setiap kesempatan Buyung selalu mencaci maki teori integralismenya Soepomo, yang nota bene merupakan "falsafah" pembentukan UUD '45.

Padahal, kita tahu, adalah tidak gampang mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Perangkat birokrasi telah dibuat secanggih mungkin, hingga dalam konteks politik yang penuh harmoni dan haram beda suara ini, sangat tidak mungkin seorang, dua orang, apalagi bila sampai dua per tiga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berani mengajukan usul perubahan UUD 1945, apalagi pencabutannya. Pasal 37 UUD 1945 menyebutkan, untuk UUD 1945, cukup "hanya" dengan persetujuan dua per tiga dari anggota MPR yang hadir, dengan syarat, yang hadir pun tidak kurang dari dua per tiga dari jumlah anggota MPR keseluruhan. Tetapi perangkap birokratiknya bukan terletak di sini, melainkan di dalam TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum, yang merupakan aturan tambahan dari pasal 37 UUD 1945. Di sana ditemui aturan main yang lebih sulit lagi. Untuk mengubah UUD 1945, TAP MPR No.IV/MPR/1983 tersebut menyatakan, harus melalui Referendum, selain prosedur yang sudah ditetapkan dalam pasal 37. Referendum sendiri harus disetujui 90% rakyat Indonesia. Dengan ketentuan ini, tentu saja, sangat sulit dibayangkan, berapa biaya yang diperlukan untuk mengubah bunyi-bunyi pasal dari UUD 1945. Dahulu pernah ada usulan untuk mencabut saja ketentuan-ketentuan peralihan, karena dipandang tak berguna lagi, namun bayangan tentang besarnya biaya, bertele-telenya debat di MPR dan mekanisme lainnya yang mesti dilalui, usulan tersebut terpaksa disimpan saja. Lalu, apa yang dikehendaki Buyung? Yang dikehendaki Abang kita ini adalah aturan yang memberikan legitimasi bagi state (negara) untuk bersikap otoriter.

Jadi sekali lagi, apakah setelah tinggal lama di Belanda, Buyung jadi tidak mengerti betapa sulitnya menembus "hegemoni" negara. Apakah Buyung tidak tahu, betapa "proteksi " terhadap kemungkinnan munculnya ta-ngan-tangan yang punya keinginan mengubah UUD 1945 begitu kuat.

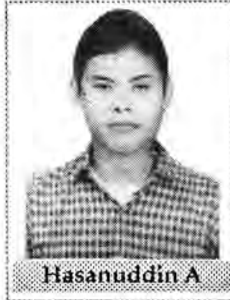
Hampir seluruh Dunia Ketiga menghadapi persoalan yang sama dalam kehidupan politiknya, yaitu betapa kuatnya negara (state) dan lemahnya masyarakat (civil society). Hal tersebut sebagian disebabkan karena kepandaian state merangkul militer dan

birokrasinya, serta legitimasi Undang-Undang yang memungkinkan state, untuk bertindak apa saja untuk mengamankan kekuasaan. Para pakar politik melihat ketakseimbangan ini sebagai sesuatu yang membahayakan. Dengan posisi yang sangat kuat, negara dimungkinkan untuk terus menerus mengontrol kehidupan masyarakat, agar tidak timbul potensi konflik yang revolutif. Kontrol tersebut, misalnya melalui jargon "pers yang bebas dan bertanggungjawab", "hubungan industrial Pancasila", atau dengan kebijakan yang tidak lagi eufenistik seperti pembreidelan, fleating-mass, subversif, dan lain sebagainya. Jalan keluar apa kiranya yang memungkinkan terdapatnya keseimbangan kekuatan (balance of power) antara negara dan masyarakat? Demokrasi! Itulah kata kunci yang selalu didengungkan para pakar politik. Tapi, nanti dulu! Bagi Buyung, mana mungkin demokrasi tercipta kalau konstitusi negaranya saja tidak mencerminkan demokrasi itu sendiri. Buktinya saja pasal 28 UUD 1945 menyebutkan, "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan mau pun tulisan **diatur dengan Undang-Undang**". Artinya untuk bersuara pun mesti diatur. Sehingga ada satu anekdot yang mengisahkan bahwa banyak orang Indonesia yang untuk mengobati giginya saja harus pergi ke Singapura. Dokter giginya tentu saja ada, tapi apalah artinya dokter gigi, kalau membuka mulut saja nggak boleh.

Karena itu pertanyaan, apa yang salah pada UUD 1945? Mestinya diganti dengan pertanyaan, Salahkah pertanyaan Adnan Buyung Nasution? Ingin saya menjawab tidak, kalau saja tidak segera sadar betapa UUD 1945, bagi bangsa Indonesia, adalah sangat sakral.

Penulis, Mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa FH UGM

Demokrasi dan Etika Politisi


Hasanuddin A

Dunia politik memang tak bisa dilepaskan dari masalah kekuasaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa masalahan politik hampir identik dengan masalah kekuasaan. Yang menjadi masalah adalah bahwa kekuasaan cenderung korup. Berdasarkan kenyataan tersebut para pemikir politik berusaha menyusun sistem yang diharapkan dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Demokrasi pada dasarnya adalah pengaturan mekanisme pelimpahan kekuasaan dari rakyat sebagai sumber kekuasaan kepada penguasa, serta mekanisme penggunaan kekuasaan tersebut dalam praktek kenegaraan. Agar proses pelimpahan kekuasaan dapat berlangsung dengan benar dan penggunaannya benar-benar diabdikan bagi kepentingan rakyat. Dengan kata lain, dalam demokrasi kekuasaan adalah alat, bukan tujuan.

Bila kita mengamati berbagai sistem politik yang umumnya mengaku melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa kekuasaan dalam dunia politik adalah tujuan, bukan alat. Lihatlah pada level individu dan kelompok misalnya, dimana para politisi berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Segala macam cara, yang pada umumnya disertai berbagai praktek kotor, dilakukan baik untuk memperoleh dukungan maupun untuk menjatuhkan lawan. Dan ketika kekuasaan itu sudah diraih, prioritas penggunaannya adalah bagi kepentingan pribadi dan kelompok.

Pada level sistem keadaannya tak lebih baik. Demokrasi dalam arti pembagian kekuasaan lebih sering tampil dalam wujud beberapa hukum besi oligarki, yaitu sekelompok pemegang kekuasaan yang membuat berbagai policy atas nama rakyat, meski seringkali bertentangan dengan aspirasi rakyat yang sebenarnya.

Terhadap kenyataan tersebut setidaknya ada dua tipe tanggapan. Tanggapan tipe pertama yang cenderung untuk tidak mempercayai demokrasi menyatakan bahwa demokrasi telah gagal dalam memenuhi hak-hak rakyat. Sedangkan tanggapan tipe ke dua yang cenderung masih menaruh harapan pada demokrasi menyatakan bahwa manusia gagal atau belum berhasil menegakkan demokrasi. Di pihak mana pun kita berada, ada satu hal yang dapat kita angkat sebagai permasalahan di sini yaitu bahwa demokrasi terlalu mengabaikan persoalan etika individu dari para politisi. Dengan kata lain dalam membicarakan demokrasi orang jarang melibatkan faktor etika politisi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap berlangsungnya sistem. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pemikiran tentang demokrasi lebih banyak dikembangkan oleh para pemikir Barat yang berpaham sekuler dengan menganggap etika individu merupakan tanggung jawab individu dan tidak ada keterkaitannya dengan sistem.

Demokrasi sampai sejauh ini terlalu percaya bahwa mekanisme kelembagaan, seperti pembagian kekuasaan, saja sudah cukup untuk memenuhi hak-hak dan amanat rakyat. Padahal

dalam kenyataannya kita melihat betapa mekanisme tersebut sangat rapuh ketika berhadapan dengan para pelaku yang menjadikan kekuasaan sebagi tujuan. Pembagian kekuasaan menjadi tidak berarti lagi ketika salah satu lembaga pemegang kekuasaan mendominasi lembaga kekuasaan lainnya. Dan yang lebih fatal adalah kektika lembaga-lembaga pemegang kekuasaan tersebut saling bekerja sama dalam melakukan penyalahgunaan kekuasaan

Bila kita masih percaya pada demokrasi, kenyataan di atas memberi kita pelajaran bahwa mekanisme yang baik saja belum cukup untuk menegakkan demokrasi. Demokrasi ternyata masih membutuhkan pelaku yang bersih dan berpegang teguh pada nilai-nilai etika. Dengan kata lain etika politisi adalah penjaga gawang terakhir bagi tegaknya demokrasi.

Pada bagian akhir dari tulisan ini saya kutipkan penggalan pidato inagurasi Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika ia diangkat sebagai khalifah yang pertama. Kata-kata Abu Bakar ini bukanlah sekedar basa-basi dari seorang politikus, melainkan merupakan cerminan dari peri laku politiknya selama ia menjabat sebagai khalifah. Barangkali peri laku politik ini dapat dijadikan inspirasi bagi para politisi dalam mengembangkan etika politik.

" ......saya telah diangkat sebagai pemimpin kalian,
walaupun saya bukan yang terbaik di antara kalian. Kalau
saya benar, ikutilah, dan kalau saya salah betulkanlah.
Orang yang lemah akan menjadi kuat di sisi ku hingga ku
kembalikan hak mereka. Orang yang kuat akan menjadi lemah di
sisiku hingga ku ambil yang bukan hak mereka dari tangan mereka......."

Penulis adalah
Mhs. Jurusan Fisika FMIPA UGM

Masih Relevankah UUD 1945


Syarifuddin

Sistem negara demokrasi yang muncul dalam sejarah merupakan reaksi terhadap pemupukan kekuasaan, entah itu sistem monarkisme maupun absolutisme ditangan Sang Penguasa Tunggal, dengan kekuasaan yang tak terbatas dan praktek kesewenang-wenangan. Sehingga kemudian perlu dibagi, dibatasi, dan dikontrol. Semangat demokrasi inilah yang menjiwai lahirnya bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Sebagai bangsa yang berdaulat, maka salah satu alat kelengkapannya dibuatlah konstitusi UUD 45 yang relativ singkat dengan hanya memuat 37 pasal dan aturan-aturan pokok saja baik tujuan negara, hubungan antar negara dan rakyat serta hak dan kewajiban warga negaranya guna mengatur jalannya pemerintahan negara.

Materi UUD yang cukup singkat ini dimaksudkan agar bisa mengikuti perkembangan jaman, sedangkan penjabarannya dilaksanakan oleh perundang-undangan dibawahnya, dengan prinsip bahwa perundang-undangan dibawahnya itu harus sesuai dengan isi dan jiwa UUD '45 juga tidak boleh bertentangan.

Yang menjadi masalah sekarang adalah, lembaga mana yang berwenang dan berhak menilai bahwa per-undang-undangan yang berada dibawahnya bertentagan dengan UUD '45, apa bukan UUD'45 sendiri yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, terlebih-lebih diera keterbukaan sekarang ini. Orde baru lahir dengan maksud melaksanakan UUD '45 secara murni dan konsekuen, dengan perwujudan institusi-institusi demokrasi seperti pemilu, adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif yang sudah diatur dalam UUD' 45. Tetapi benarkah semua itu sudah berjalan seperti apa yang diharapkan ?

Karena UUD '54 hanya mengatur yang pokok-pokok saja dari mekanisme pemerintahan, maka masih banyak hal yang kurang jelas dari pelaksanaan pemerintahan tsb. Sebagai mana yang disinyalir oleh pakar hukum Prof. Sri Sumantri "bahwa kelebihan dari pada UUD'45 adalah menjamin pemerintahan yang stabil, sedangkan kelemahannya dalam kekuasaan MPR, sehingga kekuasaan presiden terlihat sangat dominan dibanding lembaga lain".

Karena pemerintah/presiden posisinya dalam pembahasan RUU sebagai senior partner maka peranan DPR hanya sebatas mensyahkan dan menyetujui, sehingga kontrol DPR terhadap produk per-undang-undangan menjadi sangat lemah, dan tidaklah mengherankan lahirlah peraturan tentang tata niaga cengkeh dan jeruk yang sangat merugikan para petani. Yang paling kontroversial dengan lahirnya UU no. 14 tahun 1992 tentang lalu-lintas yang diakui sendiri oleh kalangan DPR sebagai Undang-undang yang gol karena kekhilafan.

Sebenarnya UUD'45 itu sendiri masih layak berlaku dalam artian bisa mengikuti perkembangan jaman, jadi tak perlu diadakan perubahan. Sebaliknya yang perlu diadakan perubahan adalah mengapa mekanisme pembuatan dan pengawasan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sedangkan kelemahan DPR sendiri tidak berjalannya hak in-

isiatif dan hak budget akibat adanya aturan litsus dan recall sehingga DPR kurang mampu berdebat dengan pemerintah. Hal ini ditambah dengan mekanisme fraksi.

Sebaliknya kelemahan MA akibat posisinya yang tidak merdeka lagi. Dengan politik korporatisasi dimana hakim sebagai pegawai negeri dimasukkan kedalam wadah Korpri yang berada dibawah binaan Mendagri. Maka objektivitas keputusan hakim tidak dapat dipertahankan, Apa lagi dengan adanya hak grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, maka presiden juga berwenang dalam hal peradilan.

Sebenarnya UUD'45 bisa saja mengalami perubahan. Akan tetapi MPR dengan Tap MPR no. I tahun 1978 telah mengebirinya.

Bahwa MPR bertekad untuk mempertahankan dan tidak berkehendak untuk merubah UUD '45. Tetapi ini bukan harga mati sebab MPR berikutnya bisa saja membatalkan dan mengganti ketetapan MPR sebelumnya. Dan kalau MPR telah menyetujui rencana perubahan tersebut, maka dilakukan referendum yang dilaksanakan oleh presiden sebagai mandataris.

Karena dominasi eksekutif /presiden sangat dominan sedangkan lembaga kontrol relativ sudah dilemahkan, lalu bagaimanakah kontrol terhadap pemerintah dilakukan.

Penulis teringat slogan "bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya". Seperti halnya harapan Prof. Soepomo 48 tahun silam sewaktu pembentukan UUD' 45 yakni, "Yang penting adalah semangat penyelenggaraan negara para pemimpin pemerintahan.... meskipun UUD itu tidak sempurna jika semangatnya baik, betul-betul baik, berkobar, UUD itu tidak akan menghalangi jalannya negara (tempo 1989)".

Syarifuddin
14546/SP/91

Hak Azasi Manusia, Pancasila, Masyarakat Kita

Umar Kayam

Permintaan agar Hak Azasi Manusia dihayati secara kontekstual, mungkin dapat pula diartikan agar persepsi tentang hak tersebut difahami seraya meperhitungkan perkembangan serta pertumbuhan sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya dari lingkungan yang kemudian membangun konsep mereka tentang hak azasi manusia yang sekarang banyak dibicarakan dan dijadikan acuan oleh negara-negara yang berorientasi kepada sistem demokrasi Barat yang memang tumbuh dan berkembang di Eropa. Ia berkembang sejalan dengan pertumbuhan berbagai sistem sosial ekonomi, politik dan sistem kepercayaan yang juga mengalami perkembangan dialektis di Barat. Dari sekian banyak kompleksitas pertumbuhan dan perkembangan sistem-sistem tersebut dapat disarikan di sini bahwa reformasi agama Kristen, revolusi industri dan revolusi borjuasi adalah yang dianggap sebagai faktor-faktor pembentuk utama dari konsep demokrasi dan hak azasi manusia yang kemudian dianggap sebagai model dunia barat. Ada pun unsur-unsur terpenting dalam konsep hak azasi manusia dalam model tersebut adalah hak untuk milik pribadi, hak untuk menentukan pilihan pribadi (kepercayaan, politik, ekonomi) hak untuk mendapat perlindungan hukum. Dalam unsur-unsur tersebut akan termasuk hak mempertanyakan doktrin agama, hak untuk berganti kepercayaan. Hak untuk memilih ideologi politik, hak untuk menyatakan pendapat politik, hak untuk mendapat perlindungan hukum bagi semua usaha, baik yang politis mau pun yang ekonomis dan sudah barang tentu, hak untuk mendapat perlindungan hukum bagi milik pribadi.

Perkembangan pembentukan sosok dari konsep hak azasi manusia di barat, agaknya sejalan dengan proses pergeseran masyarakat agraris, yang tradisional dan feodal menuju masyarakat yang borjuis, yang berdagang dan kemudian juga mengembangkan



industri dan kapitalisme modern. Pergeseran dari masyarakat agraris tradisional yang sangat menekankan kepada solidaritas komuniti, hubungan klien-patron pada waktu berkembang menjadi masyarakat feodalisme, menuju ke masyarakat yang "mengkota", lebih berorientasi ke urban, yang kompetitif, sangat sadar akan milik perorangan yang cenderung untuk terus mengembangkan milik teresebut serta melindunginya dengan sangat posesif. Suatu konsep hak asasi manusia yang membentuk diri dalam masyarakat yang sejalan dengan watak dasar dari sistem kapitalisme yang ingin terus mengembangkan modalnya, akan dengan sendirinya berkembang menjadi konsep hak asasi yang sangat menekankan kepada hak pribadi untuk selalu ekspansif dalam mengutarakan ekspresi, pernyataan miliknya serta menuntut untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari komuniti .atau negara. Konsep hak asasi manusia yang demikian juga percaya bahwa dinamika kreativitas dari masyarakat akan terjelma apabila prinsip-prinsip pemilikan hak pribadi pemilikan menetukan pilihan, serta perlindungan hukum yang kuat terhadap hak asasi pribadi dilaksanakan secara tuntas.

Model konsep demikian, seperti kita ketahui dari sejarah, bukanlah satu-satunya model perkembangan masyarkat barat. Konsep hak asasi yang telah disebutkan adalah model masyarakat demokrasi liberal kapitalis, sementara pernah ada model demokrasi kapitalis yang lain yang berasal dari dari konsep "demokrasi totaliter" yang berkembang menjadi fasisme dan satu lagi model "demokrasi totaliter" yang berkembang menjadi komunisme. Pada kedua model tersebut belakang Hak Asasi Manusia harus diacukan kepada kepentingan State, Negara (dengan huruf besar).

***

Indonesia memiliki pola tradisi budaya sistem ekonomi politik dan sosial pertanian tradisi yang berdasar pada model sistem kekerabatan dan yang berdasar pada model birokrasi aristokrasi feodalisme kerajaan. Pada sistem

yang pertama, hak asasi warga diakui sepanjang ia menempatkan dirinya sebagai bagian dari komuniti sistem kekerabatan yang utuh. Ini berarti bahwa pada tradisi yang demikian hak asasi pribadi, individu, tidak dikenal. Asas yang paling dasar adalah pemilikan bersama. lahan pertanian, lahan habitat, adalah jagad yang harus dijaga dan dimiliki bersama. Masyarakat pertanian tradisi demikian sangat menaruh perhatian pada arti yang penting terhadap kewajiban asasi manusia warga. Hak asasi untuk mendapatkan perlindungan hukum dari warga dididapat sepanjang warga melaksanakan kewajiban asasi menjadi penjaga norma dan milik bersama. Pada model budaya tradisi yang kedua, yaitu yang berhasil mengembangkan sistem sosial, politik dan dan ekonomi pertanian yang lebih rumit dalam bentuk kerjasama, hak asasi warga ditaruh di bawah perlindungan kekuasaan mutlak sang raja yang mendudukkan didirinya sebagai titisan dewa atau wakil Allah. Peranan tua-tua komuniti sebagai pengayom dan pemimpin komuniti diganti oleh suatu sistem kekuasaan mutlak yang disangga oleh suatu elit kekuasaan yang canggih. Hak asasi pribadi termasuk hak milik pribadi tidak dikenal kecuali pengakuan bahwa hak tersebut adalah atas nama raja.

Dari persepsi tentang tempat-tempat individu dalam masyarakat seperti yang kita kenal dalam model budaya masyarakat-masyarakat pertanian tradisi kita, jelaslah bahwa konsep hak-hak asasi manusia seperti dikenal dan berkembang di Eropah dan Amerika Serikat tidak dikenal dalam tradisi sosial dan budaya kita. Mungkin hal ini berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat kita yang belum sepenuhnya meninggalkan akar budaya sistem pertanian tradisi sehingga persepsi kita tentang tempat individu dalam masyarakat serta juga persepsi kita tentang kekuasaan masih sanagat erat berhubungan dengan persepsi tradisi lama.

***

Pancasila disamping sebagai dasar fisafat negara kita, agaknya, adalah juga suatu upaya pandangan jauh ke muka dari para founding fathers untuk mengantisipasi bangunan modern dari nation state, negara kebangsaan, Republik Indonesia. Ia adalah suatu rumusan yang ingin mencakup akar budaya yang ada, dan masih hidup kuat sebagai suatu sistem nilai dalam dua model masyarakat-masyarakat pertanian kita, dan menjadikannya suatu ramuan yang kreatif dalam menyangga nilai-nilai negara moderen yang demokratis. Akan tetapi disinilah, agaknya, letak dilema kita dalam keinginan kita untuk menjadikan Pancasila sebagi sumber ilham dan pengayom kepada perkembangan persepsi kita terhadap hak asasi manusia dalam negeri kita. Suatu negara kebangsaan moderen yang ingin dikembangkan sebagai suatu negara dengan perdagangan terbuka dan industri serta iptek yang canggih menuntut ramuan-ramuan yang lain yang berjalan bersama pengalaman perkembangan masyarakatnya. Adapun ramuan-ramuan yang lain tersebut yang lain itu adalah suatu sistem politik yang terbuka, demokratis, suatu sistem peradilan yang efektif, suatu perlindungan hukum yang adil, suatu pengajuan dan perhormatan bagi hak milik pribadi dan bila mungkin suatu kekuasaan yang tidak berlebihan dari negara.

Memang kita telah memiliki UUD 1945 serta begitu banyak undang-undang tetapi kenapa begitu banyak lubang dapat terus disusupi dalam penghayatan UUD dan undang-undang tersebut?

Tidak ada yang menolak Pancasila sebagai suatu Dasar Filsafat Negara yang bagus perumusannya. Pastilah ia juga akan menjadi sumber ilham dan pengayom yang baik bagi perumusan Hak Asasi Manusia dalam negara kita. Akan tetapi Pancasila dan Hak Asasi Manusia bukanlah suatu yang hidup abstrak diawang-awang. Kedua hal tersebut hidup konkrit di Bumi Indonesia. Tanpa suatu sistem politik yang terbuka, yang demokratis, tanpa suatu sistem peradilan yang efektif dan perlindungan hukum yang adil, tanpa suatu pengakuan dan penghormatan bagi hak milik pribadi dan tanpa pengendalian kekuasaan dari Negara, dapatkah Pancasila dan Hak Asasi Manusia hidup subur dan memberikan kekuatan moril dan moral bagi semua warga negara.

Memang kita telah memiliki UUD 1945 serta begitu banyak undang-undang untuk menjaga keselamatan negara. akan tetapi kenapa begitu banyak lubang dapat terus disusupi dalam penghayatan UUD dan undang-undang tersebut?

OPS
19



"Ya Tuhan beri kami pekerjaan"

"ealah ono londo Inggris tho ...."

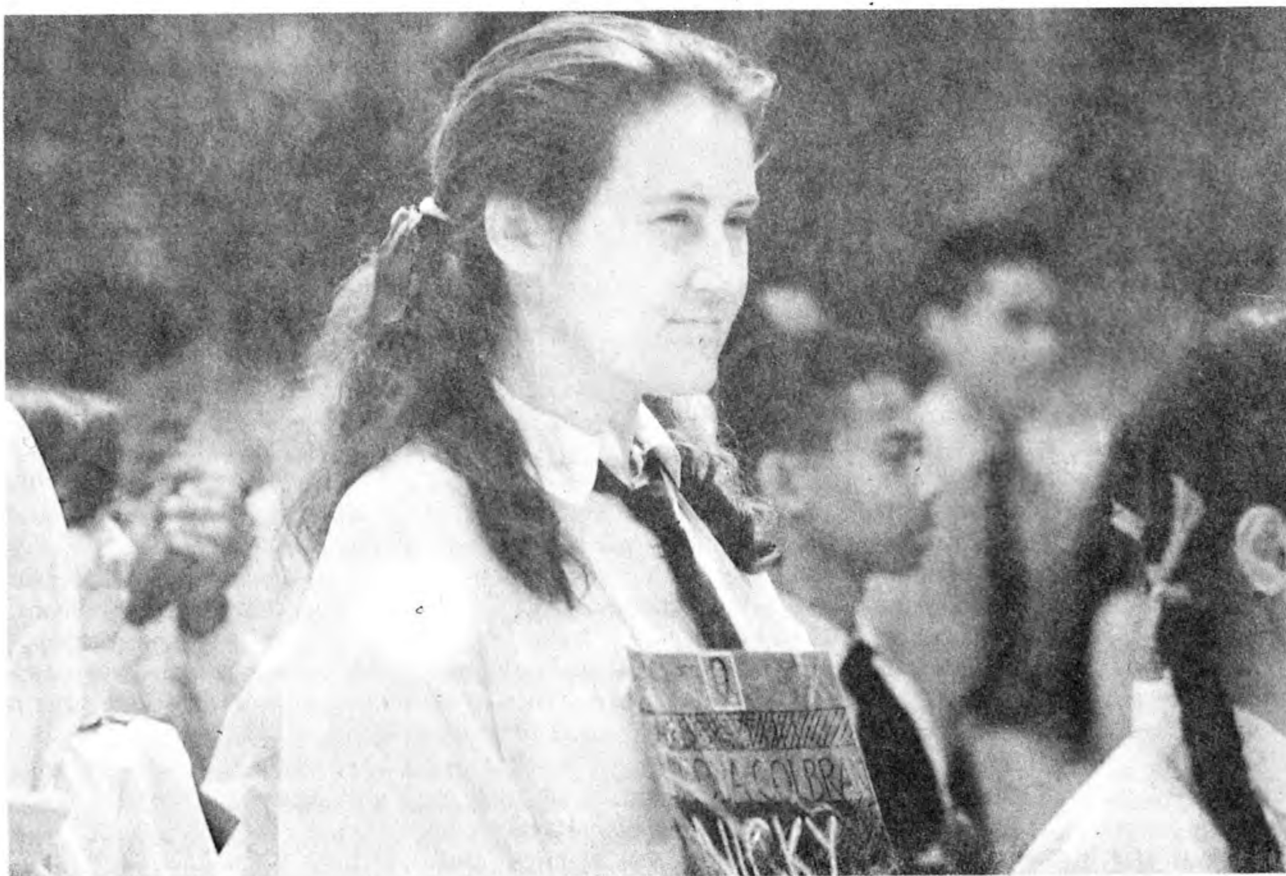


Foto
Cha

SPEK
993

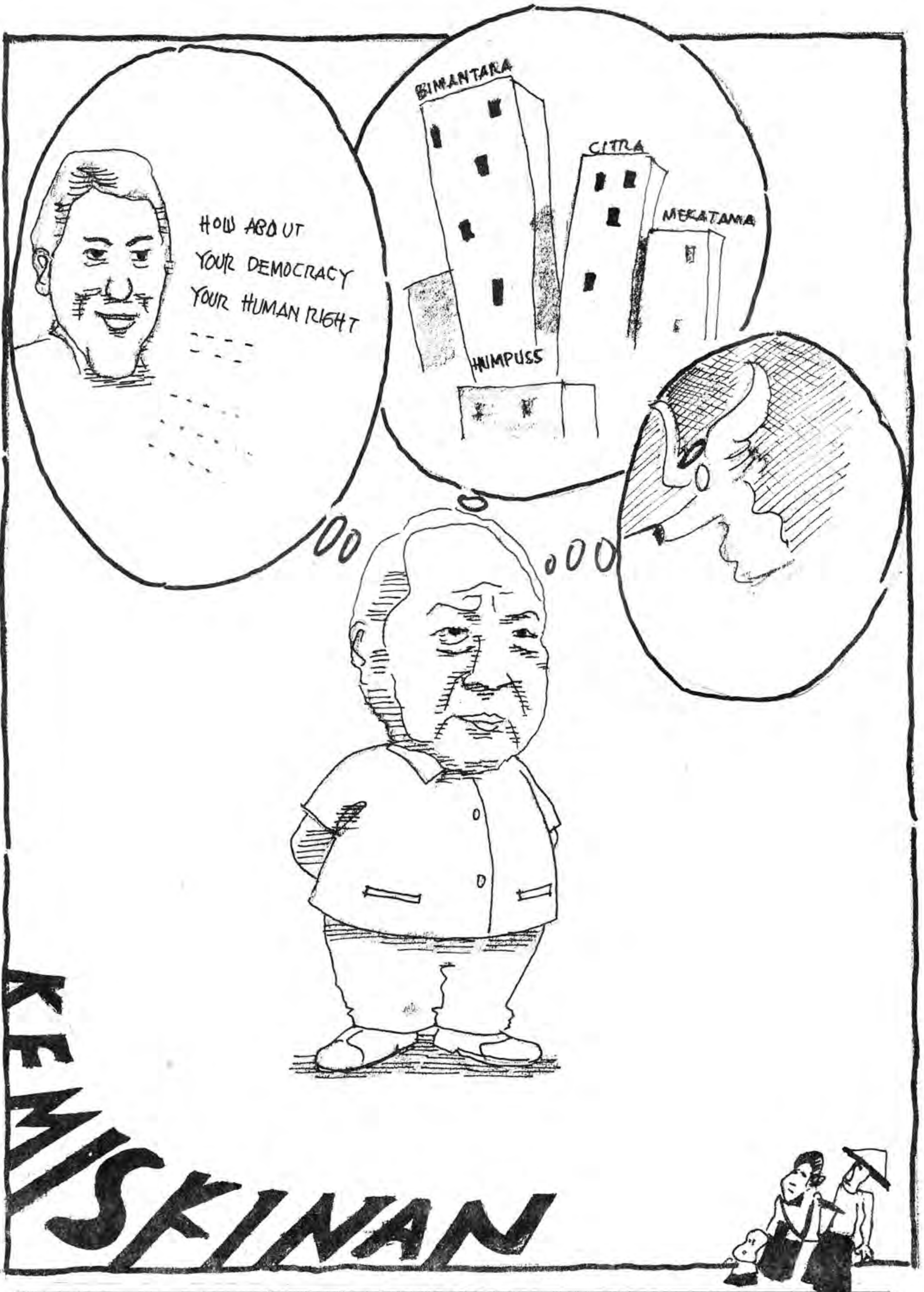


Bayang-bayang kekuasaan

"Cepat lari .... !!
Militer masuk kampus"

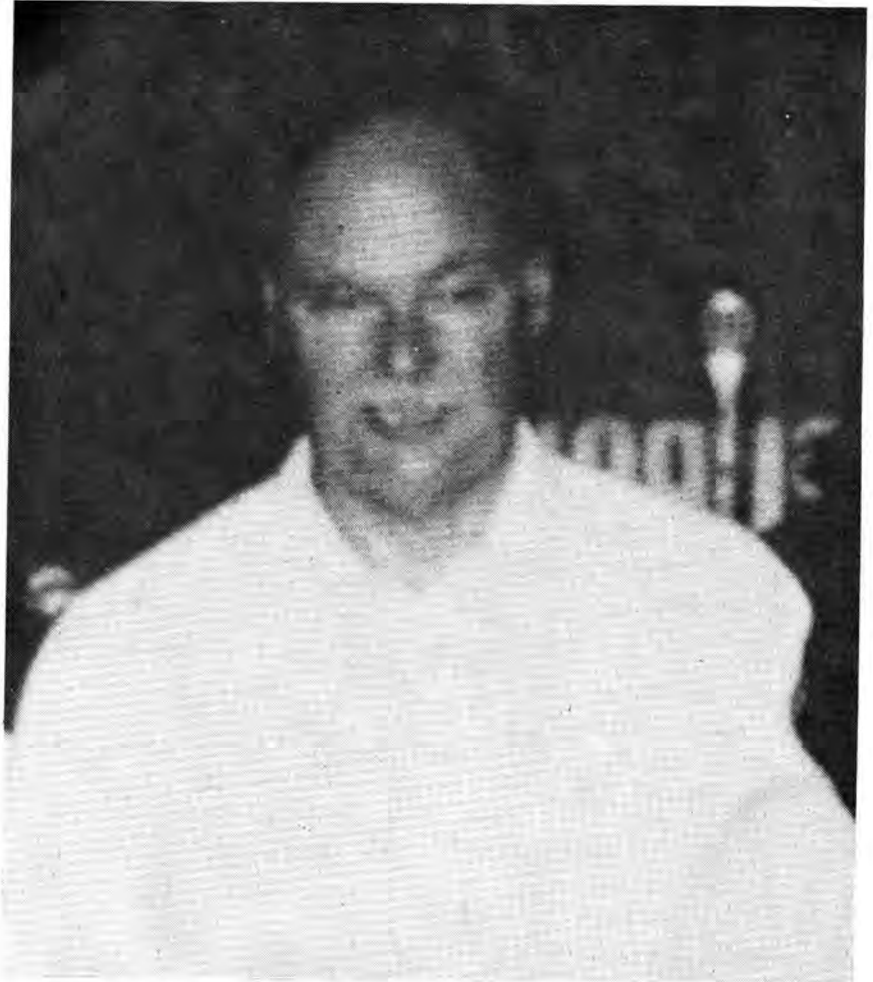


oto-foto
handra


HOW ABOUT
YOUR DEMOCRACY
YOUR HUMAN RIGHT
BIMANTARA
CITRA
MEKATAMA
HUMPUSS
KEMISKINAN

Hans Dieter Evers :

"Mereka Semua Ikut 'Bapak', . . ."



Biografi Prof. DR. Hans Dieter Evers

Guru Besar Perencanaan Pembangunan dan Direktur Pusat Penelitian Sosiologi Pembangunan di Universitas Bielefeld, Republik Jerman. Selama setahun 1987/1988 menjadi peneliti utama pada Pusat Penelitian Kependudukan dan Guru Besar tamu di Fisipol UGM. Sebelumnya juga di UI. Guru Besar dan Ketua Jurusan Sosiologi di Universitas Yale AS dan dosen pada Universitas Monash Australia. Lahir di Jerman tahun 1935. Menyunting dan menulis buku Sosiologi Perkotaan (LP3ES, 86), Kemiskinan dan Keutuhan Pokok (1985). Modernization in South East Asia. Bersama Tilman Schiel menulis Kelompok-Kelompok Strategis (Obor, 1990). Kini beliau kembali meneliti di P3Pk hingga April 1994.

Bertubuh tinggi-tegap. kekar dan setia dengan senyum ramah dibalik meja kerjanya, itulah Prof. DR. Hans Dieter Evers. Pakar asal Jerman yang gemar menguak masalah birokrasi, kelompok strategis bahkan terkadang masalah suksei ini selalu tangkas menanggapi persoalan-persolan aktual yang disodorkan kepadanya. Digedung P3PK, lantai dua, tempat beliau menghabiskan masa penelitiannya yang direncanakan setahun di Indonesia, kerabat SINTESA Archam Effendi dan Khrisna Darma menemui beliau sebagai Tokoh untuk rubrik Profil kali ini.

Berikut ini adalah wawancara dengan **Hans Dieter Ever (H)** yang berhasil dihimpun oleh **Archam Effendi** dan **Krisna Dharma** dari majalah **SINTESA (S)** berikut cuplikannya.

(SINTESA) Apa latar belakang pembentukan Teori kelompok Strategis?

(HANS DIETER EVER) Usaha kami adalah menciptakan teori makro, khususnya yang membahas perubahan dalam masyarakat, yang terkenal adalah teori kelas. Menurut saya dan Tillman Schiel, mahasiswa saya yang bersama-sama menulis buku tentang ini, teori-teori kelas dari tradisi Sosiologi Klasik tidak cocok dengan keadaan negara-negara berkembang khususnya Asia Tenggara. Teori ini merupakan campuran dari teori Sosiologi Klasik. Jadi ini teori modern. Kita ambil dari teori-teori Max Weber kemudian ditambah dengan hasil penelitian terbaru. Juga ada pengaruh dari Juergen Hebermas dari Frankfurt School (aliran Frankfurt, **Red**). Namun demikian di Jerman dan Belanda Teori Kelompok-Kelompok Strategis sudah dibahas sebagai Bielefeld School, maksudnya ini berbeda dengan Frank furt School.

Teori Anda nampaknya berada dalam kerangka pikir modernisme, yaitu bahwa setiap masyarakat selalu bergerak menuju masyarakat modern.

Benar. Dasar pemikiran kita adalah bahwa perubahan perubahan yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara dari bentuk yang non-demokratis ke yang lebih demokratis, seperti perang kemerdekaan Indonesia atau perubahan dari kerajaan ke pemerintahan...Bila ada perubahan baru di bidang ekonomi seperti introduksi sistem pertanian perkebunan dan industrialisasi, sumber ekonomi baru akan terbentuk. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan mengambil hasil dari sumber-sumber ekonomi tersebut.

Menurut Lipset demokrasi akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi sudah mencapai taraf yang cukup tinggi. Ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konglomerat sebagai kelompok strategis. Apakah tidak mungkin bila mereka akan memperjuangkan interesnya sendiri dan dengan demikian menghambat demokratisasi?

Ini suatu pertanyaan yang sulit. Menurut observasi saya ada sebagian dari konglomerat yang tidak suka dengan demokratisasi, sebab itu berarti akan ada permintaan kenaikan gaji, demonstrasi pegawai negeri dan sebagainya yang akan merugikan mereka. Ada pendapat yang lain dari industri menengah bahwa kalau pendapatan orang naik maka permintaan mereka juga akan naik.

Yang pertama terutama ber asal dari konglomerat yang berusaha di bidang eksport-import. Yang kedua dari industri textil dsb, yang percaya bahwa pendapatan penduduk akan meningkat bila ada demokrasi ekonomi dan politik. Yang kuat di antara kedua nya ini adalah konglomerat. Dari pengusaha menengah di kota-kota pinggiran seperti Klaten misalnya, ada banyak keluhan kesulitan mendapatkan hasil yang cukup, ini karena banyak investasi luar dalam bentuk pabrik-pabrik di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.



Mereka semua ikut "Bapak",dan ini merupakan ciri dari suatu kelompok strategis.

Bagaimana Anda memandang peran kaum profesional. Di satu pihak kita melihat demonstrasi di Thailand yang digerakkan oleh kaum profesional muda, dan di lain pihak banyak penelitian yang mengatakan bahwa kaum Yuppies di Jakarta sangat individualis dan terbuai oleh New Lifestyle modern mereka, pagi kekantor, sore aerobik, mungkin pada hari Minggu pergi main Golf. Konon, mereka tidak punya interes terhadap politik, demokrasi dan seterusnya.

Fakta ini benar juga. Hal semacam ini tidak saja ditemukan di Jakarta, di Singapura juga ada, bahkan jauh lebih besar. Akan tetapi saya melihat ini sebagai suatu aspek perkembangan kelas menengah sebagai ciri demokrasi. Banyak dari kaum ini yang tidak mempunyai interes terhadap demokrasi, mereka lebih suka "main golf" dari pada main politik.


dok. Tempo

> *Bahwa tidak cukup bila hanya ada institusi demokrasi, tetapi juga cara berpikir masyarakat.*

Tetapi yang perlu dicermati adalah bahwa young professionals hanyalah sebagian kecil dari kelas menengah di sini, bagian terbanyak adalah ABRI dan Pegawai Negeri. Oleh karena itu lebih baik kita melihat situasi dari teori kelompok strategis. Yang penting adalah hubungan antara perwira dengan Jenderal; young professional denga Liem Sioe Liong misalnya, sebagai atasan mereka. Mereka semua ikut "Bapak", dan ini merupakan ciri dari suatu kelompok strategis. Bila terjadi hibridisasi, di mana suatu kelompok strategis mengambil peran kelompok strategis yang lain seperti Dwifungsi ABRI misalnya, suatu koalisi yang akrab dimungkinkan untuk terbentuk. Tetapi bila terjadi diferensiasi, ada kemungkinan bahwa kelas bawah mempunyai kekuasaan juga, tetapi yang kurang dapat mengartikulasikan kepentingan mereka. Seperti sekarang kalangan elit Kelompok Strategis memiliki koalisi yang kuat, sehingga apa boleh buat, lapisan bawah harus mengikuti, so it's like a power block Sementara itu ada kecenderungan mobilitas dari Kelompok Strategis Birokrat ke kelompok swasta, yaitu pindahnya staf ahli dari kantor pemerintah. Ini dapat berakibat lemahnya patron klien di atas, yang dengan demikian keadaan mungkin akan lain.

Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, di mana terdapat kesenjangan antara kelas bawah dan kelas menengah ke atas, sangat sulit untuk dipungkiri bahwa kalaupun demokrasi itu terjadi, hanyalah di sekitar kelompok kedua saja.

Memang benar, saat sekarang yang terjadi hanyalah elit politik semata. Akan tetapi tesis saya apabila sudah terjadi diferensiasi, maka politik sudah berjalan ke arah demokratisasi; bukan berarti pula bahwa sudah terjadi demokrasi penuh, sebab belum sampai ke bawah. Salah satu aspek yang penting dalam konteks ini adalah *"The Civil Society"*, bahwa tidak cukup bila hanya ada institusi demokrasi, tetapi juga cara berpikir masyarakat, bahwa saya punya kedudukan yang sama bila pejabat-pejabat itu berjualan di Pasar Malam, belum tentu ia akan mendapat untung! Dengan kata lain, pejabat mungkin administrator yang baik dan pedagang kaki lima mungkin pula penjual yang baik; dan dengan demikian ada hal yang dia ketahui, tidak saya ketahui, dan sebaliknya. Ini adalah inti dari Civil Society: setiap orang punya status sama. Sangat dimungkinkan adanya hubungan erat antara hal ini dengan pendidikan. Di Universitas Kebangsaan, Malaysia, saya melihat banyak terjadi diskusi-diskusi mengenai demokrasi antara dosen dan mahasiswa, ada yang setuju dengan politik Mahatir, ada yang menentang dan sebagainya. Tentu di sana masih banyak kesulitan, tetapi mereka lebih maju dalam proses demokratisasi. Akibatnya kita bisa melihat, pertumbuhan ekonomi Malaysia lebih cepat dari pada di Indonesia, demikian pula dengan Thailand. "Tanpa demokrasi tidak ada kemajuan ekonomi". Dua aspek ini harus seimbang, artinya saling mempengaruhi. Saya setuju demokratisasi tetapi tidak boleh terlalu cepat. Seperti Indonesia tahun 50-an, sudah ada demokrasi tetapi ekonomi masih sangat buruk. Kesulitan muncul dan semuanya akan runtuh.

Kalau kita lihat realitas di Indonesia, Presiden adalah otoriter, dan dalam birokrasi terdapat dominasi militer. Dengan kata lain ada koalisi antara birokrat dengan militer. Apakah dengan demikian posisi sipil di pemerintahan memang ditiadakan atau ada proses setelah sampai ketaraf masyarakat industri baru sipil bisa lebih berperan?

Jadi dalam proses modernisasi, masyarakat semakin kompleks tetapi belum seperti di negara maju. Kalau semakin menjadi kompleks, politik tidak akan menjadi sesederhana sekarang: Pusat dengan Gubernur merencanakan suatu proyek dengan konglomerat dan sudah menjadi keputusan politik. Tetapi bila ekonomi dan masyarakat semakin kompleks akan semakin terdapat

banyak golongan dan industri-industri dengan interes yang berbeda-beda. Dengan demikian mereka tidak bisa digabung lagi, dan demokrasi dibutuhkan. Wakil-wakil dari petani, pedagang menengah, konglomerat harus mendiskusikan kebijaksanaan pemerintah di Parlemen. Dalam era globalisasi ini di seluruh dunia ada Popular Movement untuk demokrasi. Hal ini dapat kita lihat di Cina, Rusia dst. It's not the question whether you neeed democracy or not, tetapi kapan demokrasi itu akan terealisir. Keterlambatan akan berakibat buruk dalam globalisasi, seperti yang dialami Rusia, terjadi inflasi, sistem norma runtuh dan sebagainya.

Gambaran apa yang dapat Anda berikan mengenai birokrasi di Indonesia?

Kita bisa membaca banyak tentang perkembangan birokrasi di Indonesia, dari segi Priyayi, konsep Neo-priyayi dan sebagainya. Mungkin hal yang penting adalah meningkatkan jumlah pegawai negeri, khususnya pada tahun 80-an sampai sekarang. Memang pemerintah Indonesia melakukan Structural adjustment dalam ekonomi mengikuti kebijaksanaan bank Dunia, dimulai dengan devaluasi, deregulasi perbankan dan seterusnya. Khususnya dari IMF menyarankan pemerintah untuk menurunkan jumlah pegawai, sebab untuk industrialisasi suatu negara perlu menurunkan pengaruh pemerintah dan menaikkan peran swasta dan ekonomi pasar. Structural adjustment ini mulai nampak keberhasilannya, sekarang pertumbuhan industri cepat sekali. Namun begitu jumlah pegawai negeri terus meningkat, why? Menurut Parkinson, seorang tokoh ilmu sosial yang dulu mengajar di Universitas Singapura, katanya; pegawai pemerintah cenderung memperbanyak pegawai di bawahnya, karena dengan demikian ia akan naik pangkat, mungkin inilah yang terjadi di sini. Selain itu dari segi teori Kelompok Strategis,


dok. Tempo

Birokrasi sebagai suatu kelompok yang kuat akan berusaha menambah pegawai dan proyek-proyek karena dengan demikian anggaran negara akan masuk lebih banyak. Sekarang katanya sudah terjadi inflasi pegawai negeri. Artinya nilai pegawai dari segi pendapatannya menurun, dan status sosialnya menurun pula. Padahal pegawai negeri dulu dipandang oleh masyarakat mempunyai status sosial yang tinggi.

Ada kasus menarik yaitu ide dari Menteri Kabinet sebelum ini yaitu Sarwono, bahwa perlu diadakan perubahan status fungsional pegawai negeri ke yang lebih otomatis. Dengan demikian kepuasan kerja dan profesionalisme akan meningkat.

Hal itu sekarang memang tampak relevan, terutama saat sekarang suatu perintah dari pusat memerlukan waktu yang lama untuk sampai di daerah. Pertanyaannya apakah dana di daerah mencukupi. Seperti sekarang memang sudah ada ide desentralisasi, akan tetapi tampaknya dari segi finansial belum mampu direalisir.

Bila desentralisai dilakukan, bukan berarti kontrol terhadap lapis bawah kelompok strategis birokrat menjadi lemah?

Ide dari kelompok strategis adalah bahwa, kelompok adalah merupakan strategi, strategi untuk berkuasa. Yang merupakan realitas strategi dari kelompok ini adalah jumlah pegawai dan proyek. Jika otonomi dilaksanakan, memang kekuasaan lapis bawah akan lemah, sementara di atas terjadi koalisi dengan militer. Jadi ini menjadi sulit bagi perjuangan kelompok strategis birokrat, karena perpecahan bisa terjadi.

> ***Nilai pegawai dari segi pendapatannya menurun, dan status sosialnya menurun pula.***

Dalam diskusi-diskusi di Melbourne, Desember tahun lalu, yang kebetulan Anda hadir di sana, terdapat beberapa kritik terhadap Herbert Feith, khususnya mengenai arah perkembangan masyarakat Indonesia. Bagaimana pendapat anda mengenai hal itu?

Pertama-tama, Feith memang kawan saya. Saya pernah juga mengajar di Monash sewaktu saya muda, sekitar tahun 60-an, dan saya waktu itu bekerja dengan dia. Kritik terhadap Feith datang dari Henry Benda, dan perdebatan ini sudah lama berlangsung. Menurut Benda dari sudut sejarah, periode Demokratis yang dibicarakan Feith dalam bukunya *"The Decline of Constitutional Democracy"*, hanyalah periode yang sangat pendek dari

sejarah kemerdekaan yang panjang. Periode sebelum tahun 50-an dan sesudahnya politik Indonesia diwarnai oleh sifat otoriter. Kritik Benda ini menjadi bahan diskusi di Melbourne. Memang pada zaman dahulu pasti ada Sultan dan kekuasaan yang otoriter, tetapi sampai kemerdekaan Indonesia proses demokra-tisasi sudah dimulai. Ini banyak dibicarakan di Universitas Leiden.

Maksud Anda terdapat per bedaan politik Orde Baru dengan Orde Lama?

Bukan, di Melbourne itu tidak diperhitungkan, sebab masa akhir dari pemerintahan Soekarno sudah otoriter. Dari Melbourne disepakati bahwa saat ini sudah ada jalan ke arah demokratisasi. Ini suatu proses yang pelan dan dari dasar.

Pandangan terakhir ini sejalan dengan teori kelompok strategis, bahwa semakin industrialnya suatu masyarakat tuntutan akan demokrasi juga akan semakin tinggi, bukankah begitu?

Jadi memang benar. Menurut teori kelompok strategis, dalam memperebutkan sumber ekonomi kelompok-kelompok strategis, akan saling bersaing. Selain militer, birokrat, dan konglomerat, kelompok strategis baru yang muncul sekarang adalah kelompok profesional, lulusan universitas yang bekerja di sektor swasta. Namun begitu mereka belum punya akses terhadap hasil perkembangan (development). Dan mereka punya interes untuk mendorong kearah demokratisasi. Sementara sekarang yang kuat adalah ABRI dan birokrat. Kong-lomerat sementara punya aset baru. Kasus-kasus perbankan saat ini merupakan cerminan dari konflik antara konglomerat dan birokrat yang dalam kasus ini Bank Indonesia. Kasus Bank Summa misalnya. Dengan kata lain kalau dulu terdapat koalisi antara ABRI, dengan Dwifungsinya, Birokrat dan Konglomerat, sekarang mulai terlihat adanya diferensiasi. Dalam keadaan ini disinyalir juga adanya kelompok strategis baru, yang erat kaitannya dengan LSM, karena yang bekerja di sana adalah kaum profesional lulusan universitas. Diferensiasi ini memungkinkan terjadinya demokrasi yang lebih baik. Paling tidak dari segi situasi, ada peluang munculnya orang yang mendorong demokratisasi unutuk memperjuangkan kebutuhannya.



dok. Sintesa

Periode sebelum tahun 50-an dan sesudahnya politik Indonesia sangat diwarnai oleh sifat otoriter.

Dengan demikian demokratisasi di sini dipahami sebagai free fight untuk memperebutkan resources hasil modernisasi.

Benar. Akan tetapi yang ter jadi sekarang belum demokrasi betul tetapi suatu differentiation of power.

Akan tetapi kita melihat adanya jalinan hubungan-hubungan pribadi yang dijalin oleh presiden Suharto, demikian juga dalam pemilihan Presiden yang terakhir tampaknya koalisi ini masih sangat kuat, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini?

Mungkin itu benar, tetapi bukankah kita tidak pernah tahu apa yang mereka bicarakan dikantor misalnya. James Scott mengatakan ini sebagai The Hidden Transcript, yang tidak akan pernah kita dapati dalam publikasi-publikasi misalnya. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa sekarang telah terjadi perubahan situasi.

Salah satu aspek yang penting dalam konteks ini adalah "The Civil Society", bahwa tidak cukup bila hanya ada institusi demokrasi, tetapi juga cara berpikir masyarakat.

Wakil-wakil dari petani, pedagang menengah, konglomerat harus mendiskusikan kebijaksanaan pemerintah di Parlemen.

Kasus-kasus perbankan saat ini merupakan cerminan dari konflik antara konglomerat dan birokrat yang dalam kasus ini Bank Indonesia. Kasus Bank Summa misalnya.

Selain militer, birokrat, dan konglomerat, kelompok strategis baru yang muncul sekarang adalah kelompok profesional, ...

■

Demokrasi Model Indonesia

Y.B. Mangunwijaya



Konferensi di Monash University mengharapkan Indonesia akan semakin demokratis. Harapan ini didasarkan kepada beberapa peristiwa: pemogokan buruh yang semakin sering terjadi --tiap hari; kampanye PDI yang sempat melibatkan dua juta orang di Jakarta; diizinkannya rapat Akbar NU di Senayan; maraknya demonstrasi-demonstrasi mahasiswa, dan terakhir peristiwa DIlli, Timor-Timur. Ini semua dipandang para peserta sebagai kecenderungan bangsa kita untuk semakin demokratis. Masalahnya kemudian adalah: demokrasi yang bagaimana, dan seperti apa?

Dalam persepsi para pakar Barat yang hadir di sana (dari Australia sendiri, AS, Belanda nggak datang) demokrasi yang diharapkan adalah demokrasi parlementaris, dengan pemilu yang lebih fair dan perwakilan rakyat yang lebih vokal serta semakin menurunnya militerisme. Jadi pada dasarnya, demokrasi yang mereka harapkan adalah seperti demokrasi Barat.

Sebagian besar rakyat kita adalah petani, lengkap dengan budaya agrarisnya, sementara Belanda merupakan wakil dunia industri modern. Revolusi 1945, yang dipuncaki kemenangan 1949, pada dasarnya adalah revolusi budaya, yakni budaya petani melawan industri. Prof. Sartono menunjukkan bahwa setiap kali petani bergerak melawan Belanda setiap kali itu pula mereka dikalahkan. Anehnya, pada tahun 1949 petani bisa menang. Ternyata kali ini mereka dibantu oleh kaum intelektual (dari Wahidin sampai Soekarno-Hatta). Ketelibatan banyak fihak ini sudah disebutkan oleh Sutan Sjahrir, melalui tulisannya '45, Dalam Konsep Perjuangan Kita, yaitu "Revolusi kita bukan semacam revolusi Perancis atau revolusi Rusia. Revolusi Perancis adalah revolusi borjuasi, revolusi middle class, sedang revolusi '45 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia."

Namun kemenangan ini barulah dari segi politis, tapi belum dari segi ekonomi, dalam sejarah kemudian tercatat, revolusi kita berkembang menjadi semacam revolusi Perancis. Yang menikmati baru kaum middle class. Sejak 1945 itu, kemenangan tidak pernah lagi dimiliki para petani. Petani selalu dianaktirikan dan yang selalu dimenangkan adalah kaum industrial borjuis (orang kota). Di Indonesia sebetulnya belum ada borjuasi, dalam artian murni, yang ada hanyalah kaum priyayi atau borjuasi yang mendasarkan diri pada ersatz capitalismus (kapitalisme semu).

Para perintis kemerdekaan kita dulu semuanya sosialis, sebagai kelompok yang sadar melawan segala bentuk kapitalisme. Soekarno-Hatta (dan generasi '28 lainnya) bertindak sebagai perintis. Mereka dididik oleh guru-guru Belanda, yang sebagian besar menghormati "rule of law", sehingga mereka berpegangan pada prinsip humanisme. Sebenarnya cita-cita Pancasila merupakan konsep-konsep baru, hanya sila Ketuhanan yang digali dari tradisi bangsa. Sedang generasi '45 masih muda saat itu. Chairul Saleh, Adam Malik, Soeharto dan guru-guru mereka dari Jepang memberikan image kemerdekaaan bangsa melawan USA dan negara Barat.

Cita-cita generasi '28 dan '45 adalah "Indonesia Raya dream". Tidak aneh sebenarnya, karena seluruh dunia saat itu, jaman sebelum perang dunia II, seluruh dunia diliputi impian raya: Great Britania, Jerman Raya, Perancis Raya, Jepang Dai Nippon Asia Timur Raya. Jepang telah mengajar mereka (generasi '45) bagaimana to wake up a nation of Indonesia Raya. Sebelum generasi '45, dalam hal cara mengelola bangsa, dipakai dalam pengertian model Jepang kolektif. Generasi '28 telah mencapai kesepakatan melalui kongres Indonesia Muda dalam mempersatukan bangsa, sampai Irian Barat masuk RI, juga likuidasi RIS menjadi RIK. Generasi '45 mengubah Indonesia 17 Agustus menjadi Indonesia yang lain, bukan lagi pada bagaimana memanage Indonesia jadi kesatuan yang kokoh dan berusaha untuk tidak hanya Indonesia sebagai suatu state tetapi juga enterprise.

Hal ini secara eksplisit pernah dinyatakan oleh Daoed Yusuf, Menperdag. Arifin Siregar dengan konsep Indonesia Incorporated meniru Jepang Incorporated. Secara implisit adanya rekayasa negara kita menuju Indonesia Incorporated. Menurut Buyung Nasution dalam demokrasi 50-an: terdapat suatu progress dibanding era '45-50-an saat konstituante hendak membuat UUD yang cemerlang dihancurkan Soekarno dan Nasution sehingga kembali pada UU Darurat, UUD '45. Menurut Soepomo Indonesia harus integral supaya tidak gampang didivide et imp era. Problemanya sekarang generasi muda mau apa?

Dirangkum dan ditulis kembali dari diskusi SINTESA oleh Sopril AH.

Agama, Integrasi dan Disintegrasi Sosial

Oleh : Bambang Kusumo

Sudah menjadi kenyataan sejarah, bahwa agama sampai kini tetap menunjukkan eksistensinya pada kehidupan umat manusia. Dari titik pandang teori fungsional, yang menyatakan bahwa segala sesuatunya yang tidak berfungsi dalam masyarakat akan hilang dengan sendirinya, dapat dikatakan bahwa keberadaan agama sampai saat ini berarti mempunyai fungsi dalam masyarakat. Meski agama mendapat hantaman dari berbagai macam faham, seperti sekularisme, rasionalisme dan juga atheisme, ternyata agama tetap langgeng. Naisbitt justru meramalkan datangnya era kebangkitan agama dalam bentuk new religius movement.

Teori fungsional memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya, yakni transendensi pengalaman sehari-hari dalam lingkungan alam. Mengapa manusia membutuhkan sesuatu yang mentransendir pengalaman atau meminjam istilah Parsons "referensi transedental"? Mengapa masyarakat harus mebutuhkan berbagai praktek dan lembaga yang menyatukan serta melestarikan mereka? Aksioma teori fungsional menjawab, bahwa kebutuhan tersebut sebagai hasil dari tiga karakteristik dasar eksistensi manusia. **Pertama**, manusia berada dalam kondisi ketidakpastian; **kedua**, kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan mempengaruhi kondisi kehidupannya yang mempunyai keterbatasan; **ketiga**, manusia harus hidup bermasyarakat yang mempunyai



satu alokasi teratur dari berbagai fungsi, fasilitas dan ganjaran (O'Dea, 1987). Max Weber menyebutkan bahwa keberadaan agama, karena keinginan manusia untuk mengatasi problema makna (the problem of meaning) yang diakibatkan oleh problem masyakat mendekati dunia, aktivitas-aktivitasnya, pengolahan alam, waktu kehidupan, masa depan dan kematian. Dengan demikian agama menyediakan matriks makna. Sedangkan menurut Durkheim, agama memberi fungsi sosial, kepercayaan sebgai kesatuan suci, sebagai satu jiwa dan hati. Maka agama merupakan sistem kolektif pemahaman diri yang memainkan peranan penting (Baum, 1980).

Sejalan dengan perubahan yang selalu terjadi pada kehidupan masyarakat, agama pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu, terkait erat dengan konteks sosial yang melingkupinya. Cara pemahaman praktek penghayatan dan kebutuhan akan wadah lembaga, akan muncul sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya tulisan ini akan membahas secara khusus aspek "kelembagaan agama" beserta implikasinya pada masyarakat sebagai fenomena sosial.

Pelembagaan Agama

Perkembangan agama telah meluas ke berbagai kegiatan dan hubungan sosial masyarakat, ada dua kecenderungan yang memacukan perubahan, dari situasi agama primitif dan kuno yang berciri kelompok, ke arah agama yang terorganisasi secara khusus. **Pertama**, meningkatnya secara total perubahan batin atau kedalaman beragama. Disini proses division of labour dalam masyarakat mempengaruhi pemikiran ke arah fungsionalisasi, masyarakat mengembangkan sistem spesifikasi fungsi yang lebih tinggi. Konsekuensinya adalah bermunculannya kelompok-kelompok sosial yang ingin memenuhi sesuai dengan fungsinya yang lebih jelas dan terperinci untuk melaksanakan cerbagai kegiatan seperti pendidikan, produksi, dan sejenisnya, yang tadinya bisa dipenuhi oleh kelompok-kelompok yang lebih kabur, misalnya keluarga. **Kedua**, meningkatnya pengalaman beragama yang mengambil bentuk dalam berbagai corak organisasi keagamaan baru akan menunjukkan pengaruh umum proses kemasyarakatan dan perubahan-perubahan ke-dalam-an beragama (O'Dea, 1987). Dalam sejarahnya dengan adanya organisasi yang baru maka terjadi konversi yang meninggalkan masa lalu

dan membentuk tatanan baru, perbedaan-perbedaan yang tadinya muncul menjadi hapus dan mewujud pada adanya kesatuan penganutnya.

Jika mengikuti proses perkembangan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Berger (1991), masyarakat selalu berdialektik dalam pengertian bahwa masyarakat adalah produk manusia, yang akan selalu memberi timbal balik kepada produsernya, keduanya merupakan bentuk dialektik inheren dari fenomena masyarakat. Melalui **eksternalisasi** maka masyarakat merupakan produk manusia; melalui **obyektivasi**, masyarakat menjadi suatu realitas **sui-generis**; melalui **internalisasi** maka manusia merupakan produk masyarakat. Kerangka yang ditawarkan Berger akan sejalan dengan proses pembentukan lembaga agama dimana merupakan hasil dari manusia dan sebaliknya. Dalam hal ini ada suatu nilai yang paling tinggi dan mendasari proses pelembagaan, yaitu nilai-nilai agama. Maka dunia dimana manusia hidup (kosmos) akibat ditegakkan oleh agama akan mentransenden dan juga meliputi manusia. Kosmos menjadi keramat dan dihadapi oleh manusia sebagai suatu realitas yang sangat berkuasa dan bukan dari dirinya sendiri, namun realitas itu tertuju pada dirinya sendiri dan menempatkan kehidupan manusia dalam suatu tatanan yang bermakna (Berger, ibid).

Oleh karena itu dapat dipandang bahwa lembaga agama menjadi kendaraan bagi ekspresi-ekspresi doktrin agama (Robertson, 1970). Dalam artian ini internalisasi doktrin agama seperti yang dinyatakan Berger lebih berperan. Internalisasi doktrin ini dalam perkembangannya meluas tidak hanya diwilayah agama perse, namun berimplikasi luas pada situasi kemasyarakatan: ekonomi, politik, budaya, sosial dan sebagainya. Pada level fenomena ini kita dapat melihat berbagai bentuk seperti seni (lukis, sastra, drama dan musik), ilmu pengetahuan dan bentuk-bentuk mekanisme kenegaraan yang dibingkai oleh nilai-nilai agama. Kemudian dapat dilihat kemunculan sastra Islami, jika diwarnai oleh nafas Islam, ekonomi Islami, wayang wahyu, yang dibingkai oleh sejarah dan isi ajaran Katolik, jalan samurai di Jepang yang bernapaskan Zen, dan pada level kenegaraan kita mengenal adanya teokrasi. Sebaliknya juga bahwa realitas diluar bidang agama akan mempengaruhi perkembangan pemahaman dan penghayatan keagamaan pula. Ketika ajaran agama dipakai untuk mengolah dunia inilah yang oleh Weber disebut sebagai proses **rasionalisasi agama**.

Ketika ajaran agama dipakai untuk mengolah dunia inilah yang oleh Weber disebut sebagai proses rasionalisasi agama.

Integrasi dan Disintegrasi Sosial

Terbentuknya Integrasi Sosial

Pelembagaan agama mau tidak mau akan memunculkan kesadaran kolektif yang membentuk juga pola-pola kebudayaan masyarakat. Kenyataan itu terjadi apabila mengikuti Parsons (1951) bahwa suatu ide-ide sistem kepercayaan merupakan susunan jawaban atas problema makna yang mengandung dua hal; **pertama**, memperhatikan kognisi definition of situation untuk tindakan secara keseluruhan, ini merupakan bagian dari kepercayaan-kepercayaan ideologis (ideologi believe); **kedua**, juga memasukkan problema makna kedalam perasaan filosofis makna pada obyek-obyek kognisi empiris, alam, dunia, manusia, masyarakat, perubahan, perubahan kehidupan manusia, dan sebagainya. Dari titk pandang ini terjadi integrasi sistem sosial, untuk itu ide-ide religius menyatakan diri sebagai puncak integrasi dari sistem orientasi kognisi dalam implikasinya sebagai suatu tindakan. Dalam artian demikian maka individu yang diikat oleh kesamaan kepercayaan akan mempunyai solidaritas tinggi. Jelas sekali, bahwa pola pola kebudayaan suatu masyarakat akan terkait erat dan dipengaruhi oleh kepercayaan yang melingkupinya. Dapatlah disini agama disebut sumber potensial untuk terciptanya kohesi sosial. Durkheim memandangnya sebagai hal penting dari agama. Selanjutnya ia menyatakam "the idea of society is the soul of religion".

Terjadinya Disintegrasi Sosial

Sepintas lalu terjadinya disintegrasi sosial yang ditimbulkan agama kelihatan berlawanan dengan ide dasar atau esensi agama, memang demikian kalau ditinjau dari roh agama. Tetapi dalam hal ini kita mengkaji fungsi lembaga agama. Maka ibaratnya mata uang, lembaga agama menampilkan dua sisi : satu sisi berupa kebaikan dan sisi lain sebaliknya. Maka kalau agama disatu sisi mendorong ke arah integrasi sosial bukan mustahil pula kalau disisi lain mendorong disintegrasi.

Terjadinya dis-integrasi sosial dapat didorong berbagai variabel yang mengatributi lembaga agama. **pertama,** dunia yang semakin plural mendorong tumbuhnya berbagai lembaga, terlebih lagi penyebaran agama yang memungkinkan berbagai agama saling bersinggungan pada wila-

yah yang sama. **Kedua**, lembaga agama sering terjebak membakukan ajaran agama yang dikandungnya menjadi ideologi, maka kebenaran menjadi absolut miliknya. **Ketiga**, adanya kenyataan sosiologis bahwa berbagai agama membawa perbedaan karakter oleh ideological carriers yang juga menyebarkan iman yang berbeda (Turner, 1991; Weber, 1964). Kemudian isi ritual dan teologis dikembangkan secara rasional oleh kepentingan-kepentingan profesional dari intelektual-intelektual religius, tetapi karakteristik dari esensi dunia agama dinyatakan oleh gaya hidup dari pembawa ideologi (ideological carriers) mereka, itulah yang menentukan formasi dunia agama (Turner, 1991).

Oleh beberapa penyebab diatas, ketika agama bersinggungan pada konteks sosial aspek persaingan dan pertentangan tidak bisa dielakkan lagi. Kalau ini yang menonjol bisa dikatakan bahwa disintegrasi sosial segera terjadi entah bersifat implisit atau eksplisit.

Penutup

Demikian bahwa dalam perkembangannya, agama ketika melalui berbagai tahap rasionalisasi pemahaman ajaran selalu menimbulkan collective conciousness, yang mendorong tegaknya sebuah lembaga agama. Ketika agama dilembagakan, seketika itu xela muncul dua sisi, yaitu aspek integratif dan dis-integratif.

Kalau dimensi dis-integrasi yang mencuat, hal itu tentu merupakan agenda persoalan. Sebagai suatu solusi sosial kiranya diperlukan adanya bentuk **konsensus** bersama antar agama sehingga aspek-aspek dis-integratif dapat dieliminir agar tidak terjadi kekacauan sosial.

*) Bambang Kusumo Atmadibrata, mahasiswa Sosiologi, Fisipol, UGM.

Kami Segenap Redaksi dan Pengurus Majalah Sintesa
menyatakan :
BELA SUNGKAWA
atas berpulangnya tiga orang pembimbing kami
yang tercinta :
Bapak Herqutanto S
Bapak Syaifullah Mahyudin
Bapak Aslam Hady

Semoga semua amal ibadah mereka
di terima dan mendapat ganjaran layak di sisi-Nya

Amin

Segenap Awak Majalah
SINTESA
menyatakan :

BERDUKA CITA

Atas :
GAGALNYA KONGRES IV PDI
21-25 Juli 1993
di Medan



Strategi Stabilitas Soeharto

President Suharto remains in charge, but, as even he concedes, an iron hand is no longer enough

By RICHARD HORNIK JAKARTA

Ketika Presiden Soeharto memberikan suaranya pada pemilu bulan Juni lalu, ia ditanya, apakah pemungutan suara tersebut merupakan referendum bagi kekuasaannya. "Tidak, kami mempenyai sistem yang berbeda", jawabnya. Kenyataan kemudian membuktikan Golkar, partai Pemerintah yang mendukung Soeharto, pada pemilu kali ini hanya memenangkan 68% suara, merosot dibandingkan pada pemilu tahun 1987 ketika memenangkan 73% suara, walau pun ia memiliki kontrol terhadap pemegang kekuasan yang berpengaruh. Tidaklah mengherankan, jika kemudian MPR yang beranggotakan 1000 orang kembali memilih Jenderal (Purn) Soeharto menjadi Presiden. Untuk yang keenam kalinya. Dan dipilih secara aklamasi karena 600 dari anggota MPR adalah orang-orang pilihan Soeharto.

Minggu lalu, Soeharto merubah kabinetnya yang terdiri dari 41 orang menteri. Penempatan 25 wajah baru menunjukkan kekuatan dominasi Soeharto dalam kehidupan politik Indonesia. Pada kenyataannya 180 juta penduduk negara ini tiadak memiliki calon lain. Militer yang telah membentuk kehidupan awal Soeharto, mendukung pemerintahannya dan menjaga keterlibatan negara kepulauan, yang terdiri dari lebih kurang 13 ribu pulau dan dihuni sekitar 300 kelompok etnis: pertentangan politik kurang dapat ditolerir di sini. Legitimasi Soeharto tidak hanya berasal dari metode otoritarian atau lamanya masa berkuasa. Namun juga melalui berbagai slogan yang menggelari dia sebagai "Bapak Pembangunan" Indonesia.

Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto, setelah percobaan kudeta oleh PKI tahun 1965, negara yang kepadatan penduduknya menduduki rangking 4 dunia, menjadi salah satu pengekspor minyak terbesar dunia. Pendapatan perkapita melonjak 8 kali lipat menjadi US$ 600. Jumlah penduduk miskin turun dari 60% menjadi 15% dari total populasi, dan tergolong kelompok negara-negara industri baru (NIC'S). Seorang Diplomat Barat di Jakarta mengakui bahwa, " Soeharto selalu melakukan tindakan yang tepat dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul".

Evolusi yang dialami Indonesia menggambarkan perkembangan ekonomi dengan demokrasi terbatas yang telah menjadi ciri Asia Timur. Pertanyaanya: Dapatkah kebijakan stabilitas tetap bertahan, dan seberapa jauh negara mampu mewujudkan apa yang digembar-gemborkan Soeharto sebagai tahap "Tinggal Landas", yaitu suatu usaha, menaikkan pendapatan perkapita di atas US$ 1.000 pada tahun 2000 nanti. Dibalik usaha-usaha peningkatan ekonomi tersebut, ketegangan politik mulai muncul kepermukaan, seiring dengan kekhawatiran tentang suksesi. Pembangunan berkelanjutan yang pesat merupakan suatu keharusan, karena sautu alasan yang jelas untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Meski pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% sejak tahun 1970, In-



donesia masih harus mengembangkan ekonominya, untuk menyediakan lapangan kerja kepada lebih dari 2 juta angkatan kerja per tahun. Di bawah kondisi ekonomi yang cukup baik dewasa ini, diperkirakan secara kasar jumlah pengangguran mencapai separuh dari angkatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi semakin sulit dipertahankan. Pertummbuhan pasar bebas yang selama 5 tahun terakhir memacu pertumbuhan ekspor, sekarang menurun karena pasar domestik semakin jenuh. Indonesia harus menghadai persaingan yang semakin tajam dari Cina dan Vietnam dalam meperebutkan investasi asing bagi industri-industri ekspor. Sementara korupsi dan "sistem koneksi" terus berjalan. Ekonom-ekonom Barat menyebutkan bahwa kegiatan "suap-menyuap" dapat melemahkan pertumbuhan potensial Indonesia hingga 2-3% per tahun. Lebih jauh, disamping meperlambat pertumbuhan ekonomi, "sistem koneksi" --beberapa diantaranya melibatkan anak-anak Presiden-- telah meperlambat deregulasi dan usaha-usaha perbaikan. "Anak-anak Presiden tidak lagi semata-mata menjadi batu sandungan di sini", komentar seorang Diplomat Barat.

Seberapa jauh negara mampu mewujudkan apa yang digembar-gembor kan Soeharto sebagai tahap "Tinggal Landas"

Pemerintah melakukan usaha-usaha untuk memperkecil campur tangannya di bidang ekonomi. Namun Jakarta tampaknya lamban dalam swastanisasi PN-PN raksasa yang tidak efisien seperti pembangkit listrik dan minyak. Sementara swastanisasi dibiarkan menguasai kegiatan-kegiatan hajat hidup orang banyak. Januari silam, ketika pemerintah melakukan swastanisasi progarm satelit komunikasi Palapa, 60% tender diberikan kepada PT Satelindo, yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan milik Bambang Trihatmodjo, 40 tahun, anak laki-laki Presiden Soeharto. Seorang ekonom Barat di Jakarta berkomentar, "kita menyaksikan adanya usaha untuk memonopoli industri telekomunikasi". Dua anaknya yang lain memonopoli pemasaran jeruk dan cengkeh yang sangat esensial bagi produksi rokok kretek. Sebuah laporan rahasia dari Bank Dunia tahun lalu menyebutkan bahwa kedua monopoli itu telah merendahkan harga beli dari petani dan menaikkan harga jual kepada konsumen.

Usaha-usaha deregulasi ekonomi pemerintah mencapai puncaknya pada tahun 1990. Namun sejak tahun 1991 tidak



banyak yang dilakukan. J. Soedradjad Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia yang baru, menjelaskan, "Deregulasi dimulai dari bagian-bagian yang mudah terlebih dahulu, jadi wajarlah kalau geraknya melambat." Pembaruan-pembaruan yang telah dimulai sejak tahun 1988 dalam sekejap mata berhasil memacu pertumbuhan sektor Bank. Tapi juga membuat beberapa keruntuhan tragis seperti kebangkrutan Bank Summa sebesar US$ 770 juta tahun lalu, yang kemudian ikut menjatuhkan PT Astra International, salah satu konglomerat utama Indonesia.

Peristiwa tersebut membuka kesempatan bagi para teknolog- sekelompok teoritisi pem bangunan yang lebih mempercayai campur tangan pemerintah daripada deregulasi. Mereka dipimpin oleh Menristek B.J. Habibie, seorang penukung blak-blakan dari pembangunan dan proteksi teknologi tinggi pemerintah. Dia tidak setuju dengan pengembangan lebih jauh sektor-sektor industri rendah -tekstil, pakaian jadi, alas kaki- yang telah berkembang sebelumnya. "Kita membutuhkan pembangunan nasional, tidak hanya pembangunan ekonomi," tegas Habibie.

Masih dalam rencana Habibie adalah pengembangan industri penerbangan dan perkapalan, serta konstruksi 12 buah reaktor nuklir, yang keberadaannya masih diperdebatkan bagi sebuah negara penghasil minyak dan gas alam yang melimpah. Program penegembangan tersebut diperkirakan menyedot biaya puluhan juta Dollar. Menurut seorang ekonom Barat di Jakarta, "sumber-sumber daya yang adatifak mung kin mampu menopang loncatan besar ke depan".

Sejauh ini Soeharto tidak menghentikan Habibie, namun selalu mengawasi dengan ketat. Peran Presiden di bidang fiskal dan moneter sangat penting. Tidak dapat dibayangkan ia akan mensia-siakan kepercayaan finansial Internasional yang telah diperoleh dengan susah payah, dengan memberikan setiap dana kepada para tekonolog.

Bangkitnya Habibie dapat dijadikan indikator dari adanya kekuatan-kekuatan lain yang kini bekerja. Setelah selama dua dekade menghindari sikap favoritisme kepada kelompok mayoritas Islam Indonesia, Soeharto sedikit berubah pada dua tahun terakhir ini. Salah satu usahanya adalah ICMI: Soeharto menunjuk Habibie sebagai ketuanya. Menurut Eugene Galbraith, Presdir PT HG Asia Indonesia, "alasan tindakan ini karena manajemen ekonomi negara secara tidak proporsional berada di tangan kelompok inteletual Kristen." Seberapa jauh Soeharto akan memainkan kartu agama, bagaimana pun masih menjadi pertanyaan. Presiden memahami dengan baik bahaya-bahaya yang terlibat, dan Goenawan Mohammad, Pemred majalah TEMPO, mengatakan, "bermain-main dengan kelompok muslim untuk menguasai mereka".

Laporan rahasia dari Bank Dunia tahun lalu menyebutkan bahwa kedua monopoli itu telah merendahkan harga beli dari petani dan menaikkan harga jual kepada konsumen.

Sebagian besar analis memperkirakan Soeharto akan dapat menyelesaikan waktu lima tahun mendatang tanpa banyak halangan. Selama pemerintahannya lima periode sebelumnya, ia selalu menghindari memilih wakil Presiden yang mungkin dapat menggeser dirinya. Dua minggu lalu Presiden melanggar pola itu dengan mengangkat Try Sutrisno, 57 tahun, seorang Jendral (Purn.) dan mantan Pangab, untuk memduduki posisi tertinggi kedua di negara ini. Try memiliki tiga persyaratan yang menurut para analis harus dipunyai oleh pengganti Soeharto: Seorang Jawa, Islam dan tentara.

Soeharto dan Golkar menunggu hingga menit terakhir sebelum menunjuk Try, yang beberapa minggu sebelumnya telah pensiun dari ABRI: pemunduran ini menyebabkan adanya spekulasi yang beredar bahwa Angkatan Bersenjata telah mendesak pilihan tersebut. "Soeharto suka menahan kartu-kartu penting sehingga ia dapat menguasai skenario, "kata Goenawan.

Soeharto tampaknya menyadari bahwa keberhasilan ekonomi tidak menjamin keabadian sistem politik yang telah ia bangun selama ini. Pada pidato pembukaannya di Depan MPR ia mengatakan, "Kita telah menikmati stabilitas nasional yang dianamis selama lebih dari seperempat abad. Stabilitas ini tidak dapat dipertahankan dengan tangan besi, tanpa adanya kekuatan bersama". Jika ia menharapkan warisannya abadi, ia harus melakukan manuver dengan berhati-hati untuk menjaga perkembangan masyarakatnya yang pesat selalu dalam stabilitas. Di atas segalanya, ia harus mulai membangun sebuah sistem yang dapat terus hidup tanpa sentuhan tangan ajaibnya.

(Disadur dari *TIME* edisi 29 Maret 1993)

Mahasiswa, Peran Politik dan Sistem Pendidikan



Dinamika kemahasiswaan, atau katakanlah, gerakan kemahasiswaan ternyata juga mengalami masa pasang-surut. Aksi-aksi mahasiswa yang menjadi simbol peran politisnya, dari berbagai generasi dilansir --dan demikian memang tampaknya-- terus merosot. Mahasiswa kini lebih sibuk berpacu dengan prestasi akademiknya, mengukir kejayaan kuantitatif dan dengan manis mematuhi logika kurikulum yang melanggengkan kekuasaan. Demonstrasi, pasang poster dan aksi-aksi protes kini tak marak lagi di kampus-kampus. Meskipun bukan tidak ada. Tapi, tampaknya tinggal sisa-sisa belaka.

Namun demikian, benarkah mahasiswa mesti seperti dulu? Bukankah ada konteks tertentu, yang terus berubah, dan memang tak memberikan relevansi bagi aksi-aksi politik mahasiswa? Di jaman pembangunan ini, seperti sering dilontarkan, kita butuhkan para profesional-profesional yang memenuhi mesin industrialisasi. Berpolitik seperti era 66 dulu, hanya menjerumuskan mahasiswa pada romantisme belaka.

Tampaknya, orientasi rezim yang dipancangkan secara formal sejak 21 Januari 1978 itu perlu tinjauan kritis. Setelah lebih satu dekade kita menyaksikan era normalisasi kehidupan kampus, penglihatan kita lebih tepat dibidikkan tajam-tajam pada membengkaknya angka pengangguran intelektual. Profesionalisme mahasiswa ternyata sekedar omong-kosong. Apalagi, soal kaderisasi kepemimpinan sipil, sungguh-sungguh babak-belur di kampus yang "abnormal".

Berikut ini SINTESA menemui beberapa pakar yang dianggap cukup kompeten dalam menguak dinamika kampus. Beberapa reporter bergerilya merangkum pendapat mereka yang juga mantan aktivis kampus.

Ada kerinduan, pada mahasiswa, untuk meng ulang kembali puncak kejayaan prestasi sebagai kaum muda yang kritis dan kreatif, menjadi ujung tombak pembela kebenaran dan keadilan. Akan tetapi iklim baru yang di pandu oleh industrialisasi dan pembangunan telah menyudutkan dirinya menjadi manusia yang "hampa nilai." Berbagai ironi hadir di tengah gelora idealisme mahasiswa era orde baru. Sistem pendidikan yang semakin terumuskan, membuatnya tidak mampu melepaskan dirinya dari himpitan-himpitan keresahan. Satu-satunya idealisme yang sah adalah menjadi sekrup industrialisasi. Intelektualismenya menjadi sorotan. Pengangguran, demonstran yang (gam pang) "ditunggangi", penjiplak skripsi, komitmen sosial politik yang rendah dan beragam tudingan lainnya membuatnya gentar. Aspirasi, aktivitas, dan kreati vitasnya senantiasa tercampak ke kantung-kantung sampah pemba ngunan.

Diskursus mengenai "makhluk kampus" ini, terus bergulir tak pernah berhenti, karena posisinya semakin kabur. Di tengah-tengah harapan sebagai generasi penerus kepemimpinan bangsa, atribut mahasiswa malah menjadi beban. Beban masyarakat, beban penguasa dan sekaligus beban bagi penyandangnya. Rendra, penyair kawakan, dengan sangat tepat memotret kegelisahan ini dalam salah satu bait puisinya yang berjudul Sajak anak muda:

Gelap,
pandanganku gelap,
pendidikan tidak memberikan
pencerahan

Masihkah mahasiswa punya harapan untuk menegakkan kembali harga dirinya?

ORIENTASI YANG TIDAK RELEVAN

Perguruan Tinggi seharusnya tidaklah melepaskan diri dari dinamika kehidupan masyarakatnya, karena "makhluk" yang diproduksinya adalah manusia yang akan hadir dalam kancah hiruk-pikuk cita-cita masyarakatnya. Mereka adalah manusia terdidik dan memilik bekal ilmu pengtahuan. Mereka adalah sebagian kecil dari masyarakat yang memiliki keistimewaan, hingga dikemudian hari diharapkan dapat mengakselerasi perputaran roda masyarakatnya. Oleh karena itu, lembaga perguruan tinggi haruslah dapat memepersiapkan diri aktor-aktor yang dapat mengisi dinamika masyarakatnya yang sekaligus berperan sebagai partner in progress

Dalam pandangan Adi Sasono, mantan aktivis mahasiswa angkatan "66, ada tiga problem yang sangat mendasar dalam lembaga perguruan tinggi kita. Pertama, bahwa pendidikan itu untuk memenuhi kebutuhan pasar, tidaklah sepenuhnya tepat. Karena ada ketidakselarasan antara pendidikan dan kebutuhan pasar. Misalnya pada saat ini kurang lebih ada 200.000 sarjana sosial yang menganggur. Sementara dilain fihak ada kebutuhan atas tenaga-tenaga tekhnik. Sedangkan problem yang kedua, orientasi pendidikan tinggi kita kurang memperhitungkan dinamika ekonomi. Hal ini bisa dilihat, seperti digambarkan di atas, di mana orientasi pendidikan tinggi pada umumnya tertuju pada sektor ekonomi moderen, meski pun ada kesenjangan antara kualitas produk disatu fihak dengan tuntutan kebutuhan sosial ekonomi difihak lain. Misalnya, dicirikan adanya sejumlah instrumen kebutuhan sektor informal yang tak ditemui dalam produk-produk yang ditawarkan oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh arsitek lulusan UGM atau ITB, akan memiliki kemampuan yang mengagumkan dalam mendesain rumah mewah, namun mereka belum tentu mampu (atau mau?) mendesain



dok. Tempo

Mengekspresikan tanggung jawab sosial



Jumhur Hidayat

organisasi harus dilihat sebagai suatu alat atau arena dimana mungkin terjadinya proses penyadaran

ngan pemahaman metodologi yang lemah, dan penguasaan bahasa asing terbatas, yah sulit untuk bersaing dengan sarjana-sarjana lulusan asing." Lebih lanjut Marwah menambahkan mentalitas cuma berorientasi ijazah harus diganti dengan kompetensi. Jadi misalnya, mahasiswa punya sedikit kompetensi menulis dia dapat memulai memperoleh pekerjaan. Hanya kadang-kadang ketidakmampuannya di alih kan dengan menyalahkan fihak lain, padahal masih banyak yang harus diperbaiki dalam dirinya.

Hal senada, juga diungkap oleh Burhan Magenda. Menulis, sebagai kemampuan yang sangat penting dalam dunia akademis pun mulai mengalami penurunan, selain metodologi dan penguasaan bahasa Inggris yang minim. "Padahal itulah yang dibutuhkan sekarang ini."

Lantas, bagaimana caranya agar kampus-kampus kita punya iklim akademis yang baik? Marwah mencoba membandingkan antara sistem perkuliahan di Indonesia dengan yang di Amerika. "Di sana, dosen menjadi moderator dan fasilitator saja." Mahasiswa tidak akan mendapat apa-apa bila tidak pernah membaca buku-buku literatur, yang jumlahnya bisa puluhan. Bahkan ada satu mata kuliah yang literaturnya lebih dari seratus jilid. Itu belum lagi ditambah dengan jurnal, artikel dan sebagainya, yang masih harus dibuat summarynya. Jadi mahasiswa masuk kelas bukan cuma untuk mendengar dosen, melainkan menangkap isi kuliah untuk kemudian didiskusikan.

Iklim akademis bukan hanya menuntut kecerdasan, tetapi juga etika, kata Dr. Ichlasul Amal, Dekan Fisipol UGM. Kejujuran intelektualitaslah yang menjadi dorongan utama dalam proses pendidikan. Seperti kalau mau mengutip pendapat orang, harus ada foot notenya. Itu memang hal kecil akan tetapi itu suatu proses sosialisasi supaya mahasiswa jujur dalam berfikir.

SUSUTNYA PARTISIPASI POLITIK

"Nilai efektivitas politik mahasiswa semakin menurun" demikian kata Adi Sasono. Mahasiswa dan kalangan intelektual lainnya kurang berhasil mengembangkan potensinya untuk bisa berpengaruh secara efektif, kalau pun ada, pengaruh tersebut sangat periferal. Mengapa bisa demikian, dalam pandangan Adi, hal ini karena dominannya pendekatan stabilitas, selain pemerintah telah begitu berhasil merekayasa pendapat umum di media massa, sehingga menyudutkan kalangan mahasiswa dan cendekiawan untuk berbicara secara kritis. Selanjutnya Adi mengambil contoh Sidang Umum MPR, sebagai proses pengambilan keputusan tertinggi dalam demokrasi Pancasila. Di mana aturan resmi dalam pembuatan keputusan menggunakan asas musyawarah atau pemungutan suara, sekarang diganti dengan formulir. "Sehingga pengambilan keputusan tidak lagi bebas dan rahasia." Jadi fungsi kedaulatan rakyat yang diemban oleh MPR, direduksi melalui mekanisme formulir, yang menyebabkan orang tak berani berbeda pendapat. Ini sudah merupakan preseden buruk, nilainya.

Jumhur Hidayat hampir senada pendapatnya dengan Adi. "Mahasiswa sudah kehilangan arogansinya," kata Jumhur. Karena memang, menurutnya, peran mahasiswa kian tahun kian menipis. "Sadar nggak sadar mahasiswa sedang direkayasa dengan NKK-BKK atau SMPT, dan mahasiswa pun kemudian tidak lagi mampu merekayasa dirinya sendiri."

Selanjutnya Jumhur berpendapat untuk mempertajam daya kritis intelektualnya, mahasiswa harus mengorganisir diri dan massa untuk membentuk suatu kekuatan dan kekuasaan. "Satu-satunya jalan adalah organisasi" Organisasi jangan dilihat hanya sebagai suatu kelompok orang yang berkumpul atau melakukan suatu kegiatan. Akan tetapi organisasi harus dilihat sebagi suatu alat atau arena dimana mungkin terjadinya proses penyadaran, sedikitnya terhadap diri sendiri, untuk kemudian, kalau bisa, ditularkan kepada orang lain.



Marwah Daud Ibrahim

Di bawah matahari Indonesia masih terlalu banyak yang tidak dilarang

perumahan sederhana yang layak huni. Jadi menurut beliau, ada hal yang diabaikan dalam orientasi pendidikan sekarang yaitu wawasan kerakyatan.

Problem ketiga adalah problem politik, dimana pendidikan tinggi lebih tertuju pada orientasi teknis. padahal lembaga pendidikan tinggi, terutama seharusnya dipersiapkan juga untuk menyuplai lapisan kepemimpinan nasional. Dengan demikian, mahasiswa di kampus harus diberi wawasan maupun pendidikan yang sifatnya mengembangkan wawasan demokrasi, hak azasi manusia, dan kepemimpinan, sebagai bekal agar kalangan terdidik ini cakap memimpin bangsanya. Berkaitan dengan hal terakhir, pemberlakuan NKK-BKK, nilai Adi, sangat mengebiri wawasan politik mahasiswa. Sehingga kampus menjadi sangat "tidak normal" diukur dengan standar universal.

Misorientasi lembaga Perguruan Tinggi ini, dalam pengamatan Burhan Magenda, dosen Fisip UI yang juga Dekan Fisip Unhas, dikarenakan perkembangan dunia pendidikan jauh melampaui kecepatan pertumbuhan dunia kerja, oleh sektor industri sekali pun, satu sektor yang paling cepat pertumbuhannya. Maka wajar saja bila pengangguran lulusan perguruan tinggi terus menumpuk.

Akar ledakan pendidikan semacam ini, bila ditelususri lebih dalam, ternyata disebabkan oleh banyaknya aturan-aturan yang mewajibkan warga kita menjadi warga yang terdidik, seperti kebijakan mengenai "wajib belajar". Dengan meningkatnya warga yang memasuki dunia pendidikan dasar, maka semakin meningkat pula jumlah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai tingkat sarjana. Jadi, saran Burhan, harus ada koordinasi dan pengarahan sekaligus pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk mengendalikan kuantitas, kualitas dan relevansi antara kurikulum universitas dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya perlu adanya koordinasi antara Depdikbud dengan Departemen Perindustrian. Dari koordinasi semacam ini diharapkan lulusan perguruan tinggi cukup responsif terhadap dinamika dunia kerja.



DR. Burhan Magenda

Misorientasi lembaga Perguruan Tinggi ini, dikarenakan perkembangan dunia pendidikan jauh melampaui kecepatan pertumbuhan dunia kerja.

Adanya diskrepansi pendidikan tinggi dengan dinamika lapangan kerja ini, barangkali dikarenakan pendidikan ternyata sekaligus juga merupakan lahan bisnis yang menguntungkan. Sehingga dalam pendirian jurusan pun dicari yang biaya operasionalnya rendah, agar profit margin bagi lembaga pun bisa cukup besar. Kasus over supplynya sarjana ilmu sosial di atas, sangat mungkin dikarenakan berlebihannya institusi yang menawarkan jurusan sosial, karena biaya operasionalnya jauh lebih murah daripada jurusan eksakta. Hal ini diperparah dengan didapatinya kenyataan bahwa 60 persen sarjana tidak bekerja dibidangnya, yang berarti telah merampas lahan kerja para sarjana sosial.

IKLIM AKADEMIS

Semakin ke dalam menggali, ternyata masalah pendidikan bukan sekedar karena tidak adanya relevansinya antara apa yang diajarkan dengan kenyataan sosial ekonomi yang berkembang dalam masyarakat, akan tetapi juga sangat terkait dengan apa yang sedang berlangsung dalam kampus itu sendiri. Misalnya tentang metode perkuliahan. Dr. Marwah Daud Ibrahim, seorang staff BPPT, berpendapat, "seharusnya sistem perkuliahan dapat mendukung bagi pengembangan daya kritis, kreatif dan inovatif mahasiswa. Sehingga mahasiswa selalu termotivasi untuk menuntut ilmu."

Sistem pendidikan sekarang, menurut Marwah, masih sangat lamban. "Belajar disini satu tahun sama dengan belajar di luar negeri (Amerika) satu semester. Itu belum lagi dengan banyaknya buku-buku tambahan, tugas-tugas penelitian dan sebagainya. Kalau mahasiswa hanya datang, duduk dan mencatat. Lalu membaca cuma satu dua literatur, de-



Adi Sasono

...saat ini kurang lebih ada 200.000 sarjana sosial yang menganggur.

Bagi Marwah setiap masa punya logika dan dinamikanya sendiri, oleh karenanya ia berpendapat bahwa aktivitas politik mahasiswa masa lalu merupakan respon atas politik yang bertentangan massa. Sehingga, "kecenderungan mahasiswa sekarang untuk semakin profesional disebabkan karena tantangannya memang begitula adanya. Tidak lagi seperti dahulu yang melakukan aktivitas penggalangan massa." Selain itu, Marwah kurang sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa merosotnya partisipasi politik mahasiswa disebabkan oleh NKK-BKK. Marwah berpendapat yang terlibat dalam dunia politik itu senantiasa terbatas, meski "kemauan politik tak bisa dibatasi." Di bawah matahari Indonesia masih terlalu banyak yang tidak dilarang, sayang mahasiswa terlalu berkonsentrasi kepada hal-hal yang dilarang. Dilarang teriak anda masih bisa bicara, dilarang menulis anda masih bisa bisik-bisik. Jadi bila memang mahasiswa tak suka pada suatu kondisi, carilah jalan untuk merubahnya, kalau tak mampu, yah konsekwensinya harus merubah diri, tuntasnya.

Mahasiswa bukanlah aktor tetap dalam politik, ujar Burhan Magenda, Aksidental saja, yaitu bila ada masalah dalam suatu sistem politik yang tidak fungsional. Namun demikian, karena pendidikan sekarang sudah semakin spesialis, aktivitas politiknya pun tak akan lagi massal. Oleh karena itu Burhan lebih setuju bila mahasiswa lebih memfokuskan aktivitasnya dalam bidang akademisnya masing-masing. Sehingga bila kemudian menjadi pandai dan sukses, menjadi ilmuwan, politisi atau pengusaha. Dengan demikian mereka akan lebih mampu berperan secar optimal dalam masyarakat nantinya. Sebab kalau terlibat dalam aktivitas politik selagi mahasiswa, resikonya cukup tinggi. Yaitu kuliahnya bisa lama, yang dapat menyebabkan mahasiswa tersebut kena D.O.

Ichlasul Amal kurang setuju dengan bila partisipasi politik mahasiswa selalu dikaitkan dengan organisasi sosial politik. "Kalau kita sadar, posisinya dalam proses politik secara keseluruhan porsinya lebih kecil. Misal nya dalam kasus Kedung Ombo," jelas beliau. Orsospol nggak berbuat apa-apa. Padahal masalah itu merupakan pemerasan secara politis. Tampaknya Ichlasul Amal sepakat dengan partipasi politik mahasiswa. Meski yang diperbuat cuma kecil saja, misalnya demonstrasi dengan isu-isu kecil. "Soalnya mau nunggu isu-isu besar sulit, nunggu waktu." Karena meski kecil, hal yang diperbuat tersebut lebih substansial dalam rangka membiasakan diri mengekpresikan tanggung jawab sosial.



Ichlasul Amal

"Kalau kita sadar, posisinya dalam proses politik secara keseluruhan porsinya lebih kecil. Misalnya dalam kasus Kedung Ombo"

Yang tak kalah pentingnya, adalah partisipasi politik tersebut dilandasi oleh motivasi intelektualitas dan bukan kepentingan pribadi. "Bagaimana pun mahasiswa dihargai bukan karena otot atau hartanya tapi karen intelektualitasnya." Dengan kejujuran intelektualnya, mahasiswa bisa diharapkan lebih bisa bersatu.

Partisipasi politik mahasiswa bukanlah suatu kenyataan yang dibuat-buat, akan tetapi merupakan suatu ekspresi daripada tuntutan jiwa akademis yang senantiasa merangsang mahasiswa untuk mencari dan membela kebenaran. Sebagaimana dituliskan Hatta dalam artikelnya yang berjudul Tanggung jawab Kaum Intelegensia:

> ... tanggung jawab seorang akademikus adalah intelektual dan moral,... (Oleh karena itu) ..berdiam diri melihat kesalahan dan keruntuhan masyarakat atau negara berarti mengkhianati kepada dasar-dasar kemanusiaan, yang seharusnya menjadi pedoman hidup kaum intelegensia pada umumnya"

Barangkali karena prinsip inilah yang membuat Hatta terlibat ke dunia politik ketika dia masih menjadi mahasiswa dan kemudian menjadi negarawan ulung yang demokrat. Patut direnungkan teladan dari Bapak bangsa ini. Bukan tidak mungkinkah, bahwa menurunnya partisipasi politik mahasiswa, dikarenakan kita sudah tidak lagi memiliki etos ilmiah atau kualitas akademis kita. Padahal dari sanalah diharapkan datangnya kepedulian yang tinggi.

Mahasiswa, masihkah berhasrat untuk menemukan arogansinya yang hilang?

***

Iwan Gunawan
Laporan : Arin, Asrofi *dan Yuke*

Mitos Skripsi Para Intelektual

Untuk dapat meraih gelar kesarjanaan, mahasiswa harus menyelenggarakan penulisan skripsi, mau tak mau, mampu tak mampu. Sementara kapasitas dan bekal kuliah sering tak memadai. Akibatnya, banyak mahasiswa memilih jalan pintas.



Menulis skripsi adalah ritus. Dalam pengerjaannya, mahasiswa dituntut untuk memenuhi persyaratan tertentu: pengajuan proposal, penelitian, penulisan diakhiri ujian. Semua dijalani hampir tanpa pertanyaan. Sebenarnya, semua ini dimaksudkan agar mahasiswa terbiasa untuk mengamati gejala empiris dengan berdasarkan kepada kerangka teori tertentu, dengan tingkat abstraksi ter tentu pula, dan kemudian memformulasikannya dalam bahasa tulisan.

Bila seorang mahasiswa hendak menulis skripsi, pertama-tama dia harus mengajukan rencana penulisan, yang lazim disebut proposal, kepada fihak jurusan. Proposal tersebut berisikan rencana judul, pokok permasalahan, latar belakang, metode penelitian serta kerangka teori yang digunakan. Walau tidak ada kriteria resmi tentang kelayakan suatu proposal, namun hal yang dipentingkan darinya adalah substansi dan penguasaan metodologinya. Menurut dosen sosiologi merangkap staf peneliti Fisipol UGM, Dr. Sunyoto Usman "Yang penting dari suatu skripsi adalah visible, artinya bisa diteliti atau tidak, dan kerangka teori yang dikuasai. Apabila teknik-teknik penelitian telah dikuasai, no-problem." Selanjutnya beliau men contohkan penelitian di sosiologi, yang menggunakan analisa jalur yang menuntut jenis data tertentu, skala tertentu dan penggunaan teknik statistik tertentu pula.

Sedangkan Drs. Bambang Sunaryo MSc, salah seorang staf

pengajar jurusan Administrasi Negara Fisipol UGM, memberikan gamabaran bagi pertimbangan judul yang diajukan mahasiswa dengan menekankan relevansinya dengan ilmu yang diambil, orisinalitas topik, dan yang terpenting, apakah topik tersebut telah sungguh dikuasai oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Pendapat senada dikemukakan oleh Dra. Ratnawati, SU, dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. Selain mensyaratkan kesesuaian masalah dengan metodologinya, hendaknya topik tersebut bukan merupakan duplikasi atau pengulangan. Dari sini nampak bahwa ternyata menulis skripsi tidaklah terlalu mudah, meski "Sebenarnya tidak ada masalah apabila mahasiswa telah benar-benar siap," kata seorang mahasiswa senior Fisipol UGM.

Sulit atau tidak, yang jelas belakangan ini Yogyakarta kembali mengejutkan tanah air dengan kasus terbongkarnya penjualan skripsi. Berbagai macam skripsi dari berbagai PT, dari Yogya mau pun luar Yogya, seperti UGM, UI, Unpad dan lainlain ditemukan dijual bebas di pasar buku murah Yogya, Shopping Center. Entah sudah berapa ratus atau bahkan berapa ribu skripsi lahir dengan bantuan "skripsi van Shopping" ini.

Menanggapi hal ini, Dra. Ratnawati berkomentar, " sebenarnya hal itu berpulang pada mahasiswa itu sendiri. Ada beberapa motivasi yang membuat mahasiswa mencari jalan pintas. Mungkin mahasiswa tersebut terhadang keterbatasan waktu, terancam D.O., misalnya." Sedang menurut Bambang Sunaryo, hal tersebut memang patut diprihatinkan, karena ini menunjukkan trend mundurnya idealisme mahasiswa dalam memperjuangkan cita-citanya. Mestinya skripsi bisa merupakan karya monumental selama masa mahasiswa. Difihak lain beliau juga melihat pada sistem yang belum jalan, dalam arti belum dipunyainya kriteria yang jelas untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu judul. Jadi, simpul beliau, kesalahan tersebut tidak sepenuhnya ada pada mahasiswa.

"Memang, dalam dunia penelitian, ada yang dikenal dengan istilah penelitian replikatif," demikian dijelaskan oleh Sunyoto Usman, "yaitu penelitian dengan tema yang pernah diteliti orang lain. Misalnya penelitian tentang agama di Jawa, yang pernah diteliti oleh Clifford Geertz. Mungkin bisa diamati konsep-



konsep santri, abangan. Apakah untuk saat ini masih cukup relevan, karena mungkin abangan Geertz dari tahun '50-an sudah bergeser untuk jaman sekarang. Tetapi harus jujur diakui oleh mahasiswa bahwa agama di Jawa pernah diteliti oleh Geertz." Hal yang senada diungkapkan oleh Ratnawati, bahwa kalau pun terpaksa pengulangan topik itu dilakukan, setidaknya ada perbedaan pada lokasi, waktu, dan pendekatan yang digunakan.

Tapi memang tanpa sistem kontrol, akan mungkin sekali terjadi kecolongan. Seperti yang dialami sendiri oleh Sunyoto Usman, ketika dia meloloskan juara II dalam suatu lomba penulisan, belakangan diketahui ternyata makalah juara tersebut jiplakan." Tidak mungkin bagi saya untuk membaca semua artikel," akunya," Jadi diperlukan kejujuran"

SANKSI DAN SOLUSI: TERGANTUNG PADA MAHASISWA SENDIRI

Menyinggung soal sanksi bagi pelanggaran etika akademik seperti itu, Bambang berkata bahwa sanksi terberat adalah moral pelaku. Lebih tegas lagi, Sunyoto Usman menyatakan bahwa akan ada pembatalan pene-litian apabila ketahuan se-belum mahasiswa tersebut lulus. Tapi kalau ternyata diketahui setelah mahasiswa tersebut lulus, akan agak sulit juga karena tidak mungkin memanggil kembali mahasiswa tersebut untuk menerima sangsi. Jadi kembali kepada moral mahasiswa tersebut untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran etika akademik tersebut.

Untuk mengatasi kemelut ini, ketiga narasumber Sintesa ini sepakat mengenai perlunya pembenahan pada sistem. Misalnya, menerbitkan satu jurnal berkala yang memuat skripsi-skripsi yang pernah ditulis lengkap dengan sinopsis/resumenya sehingga fihak lain dapat dengan mudah mengetahui bahwa masa-lah tersebut pernah diteliti. De-ngan demikian kemungkinan penjiplakan atau pengulangan bi-sa ditekan seminimal mungkin." Selain itu, upaya yang bisa dikerjakan adalah misalnya mengga-lakkan diskusi intern dengan me- nyertakan dosen pembimbing un-tuk berbicara tentang judul, meto-dologi, topik dan sebagainya, de- ngan demikian selalu ada meka-nisme saling kontrol," demikian usul Bambang Sunaryo. Hal ini

dikemukakan, berdasarkan kenyataan tidak ada satu lembaga pun yang menangani masalah skripsi atau tidak efektifnya mekanisme perwalian mahasiswa, ketua jurusan dan lain-lain."

Sunyoto Usman memandang bahwa sudah saatnya kita perlu mengembangkan spesialisasi studi, misalnya jurusan sosiologi dikembangkan dengan terkonsentrasi pada fenomena modernisasi ekonomi, isu-isu pembangunan, pergeseran kekuasaan dan lain-lain. Diharapkan agar mahasiswa menjadi berminat terhadap spesialisasi studi tersebut dan mempersiapkan diri sejak awal. Kalau ingin variatif, sejak semester awal mahasiswa sudah harus dapat memmengartikulasikan apa yang menarik baginya untuk dikaji sehingga tidak harus secara mendadak. Selain itu tantangan bagi dosen untuk pengembangan misalnya Capita Selecta untuk mewadahi dosen-dosen bahasan/kreasi lain, misalnya isu lingkungan hidup yang tidak ada ditahun '70-an, akan dikembangkan sekarang, agar mahasiswa dapat dapat mendapatkan cukup resources dari teori-teori mata kuliah capita selecta. Atau bagi mahasiswa sendiri diharapkan dapat mengdesain mata kuliah baru untuk mengakomodir kepentingan mahasiswa sendiri. Misalnya mahasiswa tertarik untuk mengammati pergeseran struktur kekuasaan dalam pesantren, yang kebetulan hal ini tak ditemui di ruang kuliah, maka ia bisa mengkreasikan mata kuliah baru, dengan menghubungi dosen yang mempunyai cukup pengetahuan tentang hal tersebut. Hal itu bermanfaat bagi mahasiswa agar tidak mengambil topik sekenanya karena tidak direncanakan sejak awal. Tidak mendadak dalam menentukan topik, sehingga kecenderungan menjiplak atau setidaknya pengulangan tema dapat direduksi.

Sedangkan mengenai hak cipta intelektual, sebenarnya tidak perlu karena akan menjadikan dunia akademik/ilmiah seperti barang dagangan. Budaya menghargai orisinalitas harusnya sudah lebih awal dikembangkan. Tetapi dari segi lain, hukum ini ada juga positifnya, paling dengan begitu secara formal sudah ada hukum sebagai pegangan. Tentunya harus juga didukung oleh suatu mekanisme kontrol yang jelas agar tidak useless, tetapi bisa gayuh dan menyentuh. Demikian pendapat Sunyoto Usman dan Bambang Sunaryo menjawab pertanyaan Sintesa tentang pemberlakuan hak cipta intelektual yang secara hukum melindungi ide-ide atau karya ilmiah dari segala bentuk penjiplakan yang tidak sah.

"....ini menunjukkan trend mundurnya idealisme mahasiswa dalam memperjuangkan cita-citanya.

SKRIPSI BISA TIDAK PERLU

Setuju atau tidak dalm sistem pendidikan tinggi di negara kita skripsi masih menjadi media utama bagi mahasiswa untuk menggondol gelar kesarjanaannya. Ketika ditanya Sintesa mengenai apakah mekanisme skripsi masih cukup relevan, Sunyoto Usman menjawab bahwa bahwa skripsi sebenarnya bisa saja tidak lagi diperlukan, syaratnya apabila kegiatan ilmiah di dalam kelas sungguh-sungguh efektif, sehingga mahasiswa betul-betul terstimulir untuk berfikir secara ilmiah, dengan menggunakan perspektif teori tertentu. Jadi efek skripsi sudah menempel di dalam semua mata kuliah. Sebaliknya apabila susasana perkuliahan belumlah seperti yang disyaratkan di atas, maka skripsi masih tetap perlu. Dengan skripsi, maka mahsiswa akan dipaksa untuk mengekplorasi kepustakaan, mengadakan pengamatan, mengumpulkan data, menuliskannya serta mempertanggungjawabkannya secara ilmiah.

Alternatif lain, ditawarkan oleh Bambang Sunaryo, adalah diversifikasi cara. Artinya, bagaimana pun tidak semua mahasiswa akan bercita-cita menjadi peneliti, sehingga seharusnya pula skripsi bukanlah media satu-satunya untuk syarat kelulusan, diganti, misalnya, dengan magang di Departemen tertentu atau mangambil mata kuliah tambahan dengan beban SKS yang sama. Lalu, soal metodologinya, metodologi yang selama ini berlaku tidaklah harus selalu jadi patokan. Tidak tertutup kemungkinan, misalnya, menjadikan bidang perencanaan sebagai obyek pengamatan, sehingga skripsi bisa mewujudkan kegayuhan dan kepekaan universitas terhadap pewmbangunan bangsa. Jadi tidak melulu menulis dan menghubungkan dua variabel atau yang sejenisnya. Universitas sudah harus mulai memikirkan tentang pasar kerja yang membutuhkan sumber daya manusia yang tepat agar tidak menjadi menara gading semata, yang tidak gayuh dengan realitas yang terus berubah.

Djarot
Laporan Ari S. dan Djarot Purnawan S.

Menggapai Model Pembangunan Otosentrik

Bagi para mahasiswa yang akrab dengan teori-teori ketergantungan, nama Samir Amin bukan lah suatu nama yang baru. Amin dikenal sebagai salah satu teoritikus ketergantungan yang terkemuka, yang banyak mencurahkan perhatiannya terhadap problema-problema kegagalan pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga. Salah satu pendapatnya yang penting kemudian banyak mewarnai karya-karyanya, adalah tesis yang mengatakan; terdapat pertukaran yang tidak adil antara negara-negara industri maju dengan negara-negara dunia ketiga. Di mana, negara-negara industri maju berada dalam posisi yang diuntungkan. Sebaliknya, bagi negara-negara dunia ketiga menyebabkan dirinya tereksploatasi dan terjebak dalam kondisi "keterbelakangan".

Hingga saat ini proses pembangunan di negara-negara dunia ketiga memang masih merupakan problema rumit yang belum terpecahkan. Proses pembanguna saat ini, meminjam salah satu tesis Berger, adalah tingginya biaya-biaya manusiawi yang harus dibayar dalam mencapai apa yang ditargetkan, dan dituntun oleh, teori-teori modernisasi Barat. Fenomena ini masih terus berlanjut, bahkan baru-baru ini Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian melaporkan, dalam 20 tahun terakhir ini, kemiskinan di negara-negara Dunia ketiga telah meningkat 40% sebagai akibat gagalnya konsep trickle down effect (Bernas, 24 November 1992). Buku Samir Amin ini juga masih bercerita betapa suramnya wajahnya pembangunan di negara dunia ketiga, yang dalam buku ini ia banyak bercermin di negara-negara benua Afrika. Amin masih tetap konsisten dengan pendiriannya, kegagalan pembangunan di negara dunia ketiga tadi diakibatkan oleh hubungan yang erat dengan negara-negara industri maju dalam kerangka sistem kapitalis internasional yang tidak adil.

Judul	**: MALDEVELOPMENT**
Karya	**: SAMIR AMIN**
	The United Nation University, Tokyo 1990
	244 hal



Sistem kapitalisme, menurutnya, sejak dari kelahirannya hingga saat ini telah melekat di dalamnya kecenderungan polarisasi antara "center" dan "peripheri", di mana dalam masyarakat peripheri polarisasi sosial demikian meningkat (hal. 156). Bermula dari integrasi negara-negara dunia ketiga inilah Amin kemudian menganalisis kegagalan pembanguna dari berbagai aspek sehingga membentuk suatu anatomi global. Ia menganalisa dari aspek negara, sistem internasional, gerakan kerakyatan, budaya dan etnik. Tetapi dari sekian aspek ini, ia lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada aspek negara (bab 3) dan sistem internasional (Bab 2 4,7,8).

Setelah bereksplorasi Amin kemudian mengajukan sebuah alternatif bentuk pembangunan, yang disebutnya sebagai autosentrik (autosentris), atau National and Popular Development (hal 159). Secara konseptual, mungkin ita dapat meletakkan konsep ini diantara statisme dan liberalisme. Konsep yang ditawarkannya ini kelihatan sangat besar sekali dalam memberikan peran otonomi dari suatu negara dalam menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Hubungan ini sangat ditentukan oleh logika dan dorongan-dorongan akumulasi internal suatu negara, pandangan ini jelas bertolakbelakang dengan kondisi saat ini dimana banyak negara justru selalu mengadakan penyesuaian terhadap tuntutan sistem kapitalis internasional.

Dengan kata lain, model pembangunan Amin ini, lebih cenderung "melihat ke dalam", berorientasi kerakyatan atau mungkin lebih mengacu pada konsep sosialisme yang sebenarnya. Berbeda dengan miodel pembangunan yang sangat menekankan pada eksport-oriented maka model pembangunan ini mempunyai dua ciri yang amat menonjol yaitu, mengutamakan prodksi alat-alat produksi dan memproduksi barang-barang konsumsi massa. (tidak elitis) (hal 159).

Proses pembangunan memang tidak berlangsung dalam kekosongan dimensi ruang dan waktu. Untuk menjalankan apa yang dilontarkan Amin ini, maka satu syarat yang dituntut mutlak adanya sistem politik yang demokratis. Gerakan kerakyatan mutlak ditumbuhkan sehingga instrumen negara betul-betul berada dalam kendali rakyat. Jika negara berada dalam tangan oligarki, maka pembangunan sudah pasti berada diambang pintu kegagalan, karena dalam sistem internasional yang kapitalistis, oligarki

ini akan menjalankan peran sebagai komprador. Dalam kata-kata Amin,

"In all cases, democracy is the sole means within the national and popular society of reinforcing the chances of socialism, isolating the internal capitalis relations of production from comprador integration in the world capitalis system and reducing external vulnerability".

Model pembangunan otosentrik ini terutama memang ditakwarkan kepada negara-negara dunia ketiga dalam menghadapi ketidakadilan sistem internasional. Tetapi hal ini tidak tertutup bagi negara-negara maju untuk mengadopsinya. Menurut Amin, dalam jangka panjang jika banyak negara menggunakan model pembangunan ini, maka sistem internsional saat ini yang konfliktif dan dan tidak adil akan tergantikan. Sebagai gantinya akan muncul yang dinamakan polycentric. Dalam sistem yang baru ini, sistem internasional tidak hanya dikuasai oleh: AS, Soviet, Jepang, Cina dan Eropa saja, tapi oleh seluruh negara yang ada. Semua negara adalah aktor yang otonom. Tidak ada lagi "center" atau "peripheri", karena semuanya betul-betul saling bekerjasama dalam sistem yang really interdependent. Dengan demikian harapan akan dunia yang damai dapat direalisasikan.

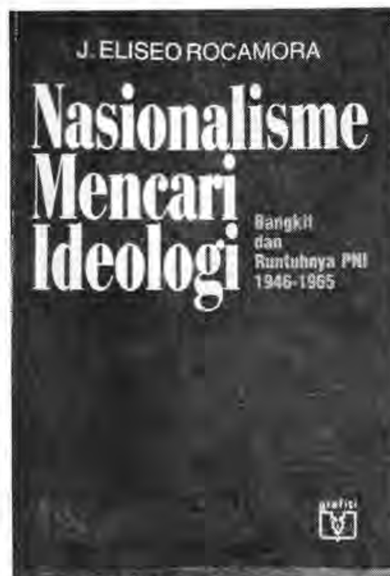
Cita-cita Samir Amin memang indah terdengar, tapi di dalamnya menuntut suatu perjuangan yang amat berat, dengan menciptakan kekuatan rakyat sehingga betul-betul menjadi "tuan di negaranya sendiri". Secara keseluruhan, buku yang terdiri dari delapan bab ini memang menarik, isinya kaya akan nuansa-nuansa pemahaman baru tentang pembangunan di negara dunia ketiga, walau alternatif jawabannya bukanlah sesuatu yang baru.

***

Nasionalisme Ditinjau Ulang

Setelah membaca buku ini, saya melihat ada tiga aspek yang bisa didiskusikan yaitu pertama, tentang buku itu sendiri, mengenai detail PNI, yang mungkin bisa kita bandingkan dengan PDI. Kedua, atas dasar buku ini sebenarnya kita tidak bicara tentang PNI, tetapi bicara tentang proses sosial, politik,ekonomi pada tahun 50-an. Aspek ketiga, aspek teoristis yang ternyata tidak dibahas sama sekali oleh J. E. Rocamora yaitu teori mengenai ideologi nasionalisme. Apakah nasionalisme itu? Apakah nasionalisme itu bersifat progresif atau konservatif? Memang nasionalisme itu tidak jelas sebenarnya. Dan apakah bisa dipakai sekarang.

Dalam buku ini sangat tidak ada teori. Bahkan dari pendahuluan sampai bab pertama, hanya langsung membahas soal PNI secara deskriptif. Jadi, bagi yang ingin studi tentang PNI, buku ini sangat berharga. Karena kaya akan informasi dan studi tentang PNI. Tapi kalau mau mengambil yang umum-umum, misalnya tentang teori umum, kita harus mencari sendiri. Apa yang dibuktikan tidak jelas. Ia hanya mau membuktikan bahwa memang benar pada saat itu PNI terombang ambing mencari inti ideologi nasionalisme. Kadang-kadang ditarik ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Saya melihat hal ini disebabkan karena kelemahan ideologi nasionalisme itu sendiri.



Kemudian, analisa tentang partai-partai lain terlalu sedikit dan terkonsentrasi pada PNI. Padahal, tingkah laku sebuah organisme itu hanya bisa dipahami kalau kita mengerti lingkungannya. Selain itu politik internasional tidak dibahas disini. Proses-proses global, seperti pengaruh Amerika, Rusia, sama saekali tidak dibahas. Padahal, politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh proses politik di luar negeri, sebagaimana peranan CIA pada pemberontakan PRRI Permesta, seperti yang diungkapkan oleh Kahin di seminar Melbourne silam.

Proses Politik Tahun 50-an

Periode 1950-1957 adalah periode politik Indonesia yang sangat demokratis. Pada saat itu pemilihan umum dan partai-partai hidup. Konstituante dibentuk. Proses politik inilah yang paling disalahkan oleh orde baru sebagai demokrasi

yang anarkhi, dimana parlemen selalu menggulingkan kabinet. Periode 50-57 dianggap negatif sekali. Barang kali perlu kita tanyakan, apa yang positif dari sana.

Paling tidak ada dua hal yang positif yaitu, orang sangat hidup membicarakan nasib negara ini dan rule of law sangat kuat. Siapa yang salah diproses. Misalnya, Roeslan Abdulgani di proses dipengadilan, hanya karena sebagai menteri luar negeri membawa devisa yang jumlahnya kecil, 100 dolar. Karena UU menyatakan tidak boleh membawa devisa ke luar negeri, tanpa ijin pemerintah.

Kebebasan berbicara ini secara dramatis juga disampaikan oleh Adnan Buyung dalam disertasinya yang mencoba membuktikan bahwa dalam konstituate ada perdebatan yang sangat berharga. Dan tampak sekali bahwa orang-orang Indonesia berpikir matang disana dan berani disana. Dengan gampang Masyumi mengungkapkan pendiriannya untuk mendirikan negara Islam, yang lain mau mendirikan negara Pancasila. Hal itu diperdebatkan secara intelektual di dalam forum.

Yang sekarang versi resmi dari orba adalah jangan kembali pada demokrasi liberal. Kalau dihidupkan sistem kepartaian dan pemilu yang bebas, nanti kembali ke demokrasi liberal. Memang kita ingin kembali ke demokrasi liberal. Why not? Asal kita tahu mana yang positif, mana yang negatif. Jadi kehidupan kepartaian yang bebas adalah demokrasi liberal. Dan itu ditentang untuk menjustifikasi mengapa pemerintah hanya menghidupkan tiga partai.

Dari buku ini kita dapat belajar bagaimana proses politik tahun 50-57. Saya kira salah satu kehilangan kita pada ORBA sekarang ini adalah bukanlah karena kita diperintah oleh militer atau penyalah gunaan kekuasaan negara saja, tetapi yang palin parah terjadi adalah ketakutan, kreativitas kita dibunuh.

Judul	:	NASIONALISME MENCARI IDEOLOGI
PENULIS	:	J. ELISIO ROCAMORA
		PT. Pustaka Utama Grafiti, 1991
		508 hal termasuk Indeks

Menarik untuk dipelajari disini koalisi antara tiga aktor, Sukarno, PKI, AD, tahun 57-63 dan 63- 65. Disinilah PNI mulai terombang-ambing. Kadang-kadang di kuv kanan, tetapi setelah negara yang tetap kuat memerlukan dukungan massa, reli-reli dan rapat akbar mulai diadakan, maka PNI kanan tidak bisa mengumpulkan massa. Yang bisa adalah PNI kiri. Pada saat itu--disebut oleh Racamora dengan me-narik sekali--GMNI dan buruh Marhaeni menjadi kuat. Itu membuat PNI dekat dengan PKI. Jadi PNI bergeser ke kiri akibat sua-sana politik juga, bukan hanya pertarungan antar elit seperti yang disebut oleh Rocamora.

ASPEK IDEOLOGI NASIONALISME

Apakah nasionalisme masih laku sampai sekarang, ataukah kita harus beralih ke pasca nasionalisme? Seperti perdebatan antara Romo mangun dengan DR. Sartono, Romo Mangun selalu disebut-sebut anti nasionalisme, se--akan-akan menjadi orang universalisme. Tetapi menurut Romo Mangun, sebenarnya seorang pasca nasionalis adalah bukan dia tidak nasionalis, tetapi sudah mentransir nasionalis menjadi internasionalis. Seorang pasca nasionalis tidak berarti tidak lagi menjadi bangsa Indonesia, tetapi orang Indonesia yang internasional. Karena nasionalisme bisa menjadi sempit, picik. Seperti pepatah Righ or wrong is my country. Padahal yang benar, righ or wrong is righ or wrong. Lalu dimana posisi nasionalisme?

Saya pikir, seperti juga diungkapkan disini, nasionalisme itu dapat menjadi progresif. Seperti ideologi nasionalisme diarahkan pada kolonial pada jaman kemerdekaan. Nasionalisme pra 45 itu memberi jawaban dua hal yaitu, mengatasi rasa kesukuan dan anti kolonialisme.

Tetapi nasionalisme juga bisa menjadi konservatif yaitu nasionalisme pembangunan seperti yang diungkapkan oleh Raja Rathnam, mantan PM Singapura, ketika Lee Kuan Yeuw masih berkuasa. Dan ini ditolak oleh Goenawan Mohamad yang mengatakan bahwa ideologi itu konservatif. Persatuan, dalam nasionalisme pembangunan itu untuk apa dan seperti apa?

Bersatu bisa berarti untuk menjaga stabilitas politik. Dalam fenomena nasionalisme sekarang, sering kali dikritik bahwa nasionalisme itu digembar-gemborkan kalau Rakyat diminta berkorban. Tetapi apabila untuk pembagian rejeki, itu namanya persaingan bebas. Jadi nasionalisme patut dicurigai. Lalu apa peran nasionalisme sekarang dinegara ini? Apakah nasionalisme bisa menjawab problematik kita? Nasonalisme politik, ekonomi? Dimana nasionalisme dalam menghargai petani-petani yang miskin? Itulah yang ingin saya lontarkan disini.

Nasionalisme sekarang menurut saya, diterjemahkan ke dalam stabilitas politik dan persatuan. Persatuan memang perlu. Stabilitas politik siapa yang anti? Tetapi stabilitas politik untuk apa? Kalau untuk membela BPPC saya tidak setuju. Tetapi kalau untuk membagikan kekayaan negara bagi seluruh bangsa, ini lain soal. Tetapi itu bisa tidak stabil, karena kekayaan dijaga oleh satu kekuatan. Sama juga dengan persatuan. Persatuan itu unuk siapa dan untuk apa?

Disarikan dari pembahasan
***DR Arief Budiman** pada diskusi*
di Tempo.
Oleh Sunarto dan Sopril

Politik Itu Tahu

Oleh:jAroT d.p.

MENDENGARKAN ceramah demi ceramah, khotbah berganti khotbah, dari satu mimbar ke mimbar lain, penulis sering diyakinkan pembicara bahwa akhir abad ini adalah zaman kebangkitan atau pencerahan Islam. Serangkaian bukti faktual disodorkan guna mendukung argumentasinya. Kehidupan di kampus-kampus kian marak warna religiusnya, makin banyak ilmuwan dan politisi mengaku Islam, masjid-masjid berebut dibangun. Saya pun sebentar jadi yakin: ya, Islam telah bangkit.



Di hari lain saya datang ke perbincangan yang lain. Islam, menurut bincang-bincang ini, berdiri dibawah kangkangan lobi Yahudi. Beribadah di bawah pornografi, bukannya kaligrafi. Kesuksesan orang Islam di bidang ekonomi dan politik, menurutnya, tak lebih dari "dosa besar kaum oprtunis yang membawa-bawa panji Islam." Ilmu yang mulai kembali dikuasai umat Muhammad tak lebih dari jiplakan produk sekularisme Barat.

Saya jadi **bingung** sendiri. Kemana kaum **abangan** seperti saya harus percaya. Saya abangan yang mau menyantrikan diri ke **mainstream** kesantrian. Tapi santri mana yang mau saya anut? Kedua kelompok sama-sama **ngotot** sebagai paling santri.

* * *

Sebagai warga negara sadar politik, umat Islam ramai-ramai berpolitik. Banyak gayanya tentu saja. Kelompok **si Fulan** berlanggam politik **ramah. Si Fulin** melantunkan Islam yang **marah**. Tujuannya sama saja: duduk di singgasana negara.

Saya sendiri sebagai abangan suka mencoba-coba gaya, dan kadang malah menggabung-gabungkan gaya. Perilaku saya ini dicap **Herbert Feith** sebagai irama **sinkretisme**. Yah, terserah orang luar luar menilai. Saya sendiri "tidak mengenal" sinkretisme, apalagi opo-sisi, golput, voting, dan macam-macam "sampah impor" liberal itu. Saya **ya** saya. Saya orang Islam abangan Indonesia. **Titik.**

* * *

Suatu kali si Fulan mengajak saya gabung ke grupnya. **Wong** saya abangan, saya terima saja dengan gampang. Saya jadi jurkan lalu caleg, lalu **calmen** (baca: calon menteri). Sayang yang terakhir terbatas calon saja. Tapi bukan karena ini bila kemudian saya "melari-kan diri" dari si Fulan. Eksodus saya semata karena kuping saya tak tahan lagi dicap para "arus lain" sebagai penjilat, oportunis, akomodasionis, mengga-daikan idealis-me, dan sinonim-sinonimnya.

Lalu si Fulin buru-buru mengajak saya masuk kelompoknya. Saya pun kembali menjurkamkan diri. Jadi caleg lagi. Saya kampanyekan, "Saya ingin rubah **sistem** ini, biar lebih Islami." Si Fulin berbisik keras, "...tapi tidak harus dengan perubahan **figur**." Saya kaget setengah mati, berani-beraninya si Fulin **menginte-rupsi** jurkamnya sendiri. Saya sendiri tak yakin apa bisa dijalankan konsep yang diinginkan si Fulin itu. Perubahan sistem tanpa ganti figur, beresiko dicap **piln-plan** figurnya. Tapi ya sudah, saya abangan, saya tak punya **posisi tawar menawar** kuat lawan si Fulin. Saya ikuti saja langkahnya **berdagang sapi.**

* * *

E, e, di akhir masa darmabhakti saya sebagai caleg **jadi**, saya terlambat sadar... Sapi saya tak ada yang mau beli.

Justru sapi si Fulan yang laku keras. Anehnya, untuk sapi si Fulan yang naik daun, santriwan dan santriwati bertepuk. "**Selamat--selamat--selamat**. Inilah potret kebangki-tan kita... " kata-kata mereka. Saya yang abangan begini tambah linglung lagi, dan bertanya-tanya sendiri, **ngapain** mereka tak dituduh seperti saya dulu sebagai oportunis, akomodasionis, dan macam-macamlah.

Bingung, saya putuskan pulang saja ke desa. Di sini ternyata saya temukan kedamaian dalam jatidiri ke-abangan saya. Santri atau abangan, rukun bergandengan. Semua tak lebih dari serpihan **massa mengambang.**

Dan lama-lama saya akhirnya tahu, ternyata politik itu tak jauh beda daripada **tahu**. Tahu boleh sama, yang menggoreng dan bagaimana menggorengnyalah yang membedakan rasanya.

***

TANTANGAN MENGASYIKKAN

Mandi di sungai memang mengasyikkan, rame-rame

lagi . . . . **SYUUR** lah.

Namun bila hal itu menjadi rutinitas karena tak punya M C K (Mandi, Cuci, Kakus) lain lagi persoalannya.

Sungguh sangat menyesakkan bila ternyata 31,5% atau 20.633 *) desa di Indonesia

tergolong **miskin.**

Dan suatu tantangan yang mengasyikkan bila kita mampu membasmi kemiskinan tersebut bukan dengan JARGON belaka.

Mari !!!



Ajakkan ini dipersembahkan oleh :

SINTESA

INDIKATOR SIKAP INTELEKTUAL MAHASISWA

*) Sumber Biro Pusat Statistik



HARMONI

....

di langit ada neraka

....

di bumiku ada rakyat

....

N-2A '88